



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI GRUP A PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
DALAM MENGATASI ANCAMAN TERORISME TERHADAP
PRESIDEN DAN KELUARGANYA**

TESIS

MASHUDI ROFIK

120190102009

**PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

BOGOR

2021



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI GRUP A PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
DALAM MENGATASI ANCAMAN TERORISME TERHADAP
PRESIDEN DAN KELUARGANYA**

TESIS

MASHUDI ROFIK

120190102009

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

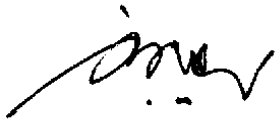
BOGOR

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Mashudi Rofik
NIM : 120190102009
Prodi : Peperangan Asimetris
Fakultas : Strategi Pertahanan
Judul : Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya

Pembimbing I



Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P
Letnan Jenderal TNI (Purn)

Tanggal, Februari 2021

Pembimbing II



Dr. Drs. Surryanto DW, M.H., M.M., CIQaR
Kolonel (Purn)

Tanggal, Februari 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,








Dr. Deni D.A.R, S.Sos, M.Si (Han)
Mayor Jenderal TNI

Tanggal, Februari 2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Mashudi Rofik
 NIM : 120190102009
 Prodi : Peperangan Asimetris
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Judul : Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing I Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P Letnan Jenderal TNI (Purn)		
2	Pembimbing II Dr. Drs. Surryanto DW, M.H., M.M., CIQaR Kolonel (Purn)		
3	Penguji I Dr. Sri Sundari, S.E., M.M., CIQaR, CIQnR Kolonel Chb NRP 1910010560565		
4	Penguji II Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si Letnan Kolonel Inf NRP 34148		
5	Penguji III Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P Letnan Kolonel Arm NRP 11970012150570		

PENYATAAN ORISINILITAS

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan apapun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab atau bab dan karya yang pernah ditulis atau ditertibkan kecuali yang secara tertulis diajukan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undangundang yang berlaku.

Bogor, Februari 2021

Peneliti,




Mashudi Rofik

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mashudi Rofik
NIM : 120190102009
Prodi : Peperangan Asimetris
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya”

Beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta/karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2021



Mashudi Rofik

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-NYA penyusunan tesis dengan judul: “Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis ini mustahil berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD, CIQnR.,CIQaR selaku Rektor UNHAN yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan.
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Deni Dadang A.R, S.Sos.,M.Si (Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
4. Kolonel (Purn) Dr. Drs. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M., CIQaR selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Letnan Kolonel Laut (K) Dr. Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep selaku Sesprodi Program Peperangan Asimetris yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Heru Wijono dan Ibu Sumiin selaku orang tua peneliti yang selalu memberi semangat moril dan materiil dalam penelitian ini.

7. Partini selaku istriku tercinta, dan anak-anakku Munisa Fiktia Ningrum serta Fachrel Naufal Kurniawan yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas belajar ini.
8. Keluarga besar Program Studi Peperangan Asimetris khususnya Cohort 8 yang telah setia menemani peneliti, memberi dorongan dan semangat serta saling menguatkan selama berada di Universitas Pertahanan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikankebaikan yang telah diberikan kepada berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif/membangun demi mendukung penelitian ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan pertahanan negara.

Bogor, Februari 2021



Mashudi Rofik

ABSTRAK

STRATEGI GRUP A PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DALAM MENGATASI TERORISME TERHADAP PRESIDEN DAN KELUARGANYA

MASHUDI ROFIK

Ancaman terorisme saat ini terus berkembang baik dari bentuk aksi, ancaman teror maupun pelaku teror. Begitupula dengan ancaman teror terhadap VVIP (*Very Very Important Person*) seperti Presiden RI dan keluarganya. Dalam pengamanan masih terjadi kelengahan, kurang kewaspadaan, keterbatasan jumlah advance tim ke daerah, celah kerawanan antar ring. Grup A Paspampres perlu menyiapkan strategi khusus guna menghadapi bentuk, ancaman dan pelaku teror baru. Tujuan penelitian menganalisis strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Analisa dilakukan menggunakan konsep Ilmu Pertahanan, Konsep Strategi, Konsep Pengamanan, Konsep terorisme dan Konsep ancaman. Hasil penelitian menunjukkan ancaman terorisme terhadap Presiden RI dan Keluarga secara langsung belum pernah terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi ancaman teror terhadap instalasi kepresidenan, pengoperasionalan dron di area istana kepresidenan, upaya percobaan dengan cara menyusup pada kerumunan ketika Presiden melakukan kunjungan. Grup A Paspampres terus beradaptasi dengan perkembangan ancaman teror terhadap Presiden dan keluarganya dengan meningkatkan kemampuan personel, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan dengan teknologi canggih, dengan melakukan latihan rutin, berkoordinasi dengan aparat pengamanan wilayah setempat guna tugas mengoptimalkan pengamanan terhadap VVIP. Namun demikian, Grup A Paspampres masih perlu penambahan personel, perlengkapan, peralatan serta sinergitas antar instansi terkait guna terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan Presiden RI beserta keluarganya.

Kata kunci: Grup A Paspampres, Terorisme, Presiden RI, Strategi

ABSTRACT

GROUP A STRATEGY OF THE PRESIDENT'S SECURITY FORCES IN OVERCOMING TERRORISM AGAINST THE PRESIDENT AND ITS FAMILY

MASHUDI ROFIK

Terrorism threat is currently growing either in the form of actions, terror threats, and terrorists. Likewise with the terror threat against VVIP (Very Very Important Person) such as the President of the Republic of Indonesia and the family. In the effort of security there are still negligence, lack of vigilance, limited number of advance teams to regions, gaps in vulnerability between rings. Presidential Security Force of Indonesia group A needs to prepare a special strategy to deal with new forms, threats and perpetrators of terror. The purpose of this research is to analyze the strategy Presidential Security Forces' Group A in overcoming terrorism threats against the President and his Family. This research uses qualitative research methods with phenomenology approach. The analysis is carried out using the concept of Defense Science, Concept of Strategy, Concept of Security, Concept of Terrorism and Concept of Threat. This research' results showed that the direct threat of terrorism against the President of the Republic of Indonesia and his family has never occurred, but there have been several terror threats against the presidential installation, operation of the drones in the area of the presidential palace, attempts to infiltrate the crowd when the President visits. Presidential Security Forces' Group acontinues to adapt to the development of terror threats against the President and his family by increasing the capacity of personnel, preparing facilities and infrastructure, tools with sophisticated technology, conducting routine exercises, coordinating with local regional security officers in order to optimize security against VVIP. However, Presidential Security Forces' Group A still requires additional personnel, equipment, and synergy between related agencies in order to guarantee the security, safety and comfort of the President of the Republic of Indonesia and his family.

Keywords: Presidential Security Forces' Group A, Terrorism, President of the Republic of Indonesia, Strategy

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PENYATAAAN ORISINILITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teroritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Konsep Ilmu Pertahanan	13
2.1.2 Konsep Strategi	16
2.1.3 Konsep Terorisme	20
2.1.4 Konsep Pengamanan (<i>Security</i>)	23

2.1.5	Konsep Ancaman	26
2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan	27
2.3	Kerangka Berpikir	35
BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	Metode dan Desain Penelitian	37
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2.1	Tempat Penelitian.....	38
3.2.2	Waktu Penelitian.....	38
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	39
3.3.1	Subjek Penelitian	39
3.3.2	Objek Penelitian.....	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data	42
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	46
3.6	Teknik Analisa Data	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1	Profil Pasukan Pengamanan Presiden.....	52
4.1.2	Profil Grup A Pasukan Pengamanan Presiden	59
4.1.3	Data Ancaman Terhadap Presiden	60
4.1.4	Pengamanan Kantor Presiden dan keluarganya	65
4.1.5	Landasan Hukum	70
4.2	Hasil Penelitian	71
4.2.1	Grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.	71
4.2.2	Strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.....	84
4.3	Pembahasan	89

4.3.1 Grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme	89
4.3.2 Strategi Grup A Paspampres mengatasi ancaman terorisme.	100
4.3.2.1 Tujuan (<i>Ends</i>)	101
4.3.2.2 Cara/Taktik/Strategi (<i>Ways</i>)	102
4.3.2.3 Sarana dan Prasarana (<i>Means</i>)	108
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Rekomendasi	116
5.2.1 Rekomendasi Akademik	116
5.2.2 Rekomendasi Praktis.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN 1	126
LAMPIRAN 2	127
LAMPIRAN 3	130
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kemunculan Tantangan <i>Irreguler</i>	21
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir	37
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data.....	50
Gambar 4.1. Pataka Paspampres Setia Waspada.....	54
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Paspampres.....	57
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Grup A Paspampres.....	61
Gambar 4.4. Sketsa Istana Merdeka Jakarta.....	68
Gambar 4.5. Sketsa Istana Bogor.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Konsep Strategi.....	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	32
Tabel 3.1. Jadwal Waktu Penelitian.....	40
Tabel 3.2. Data Informan.....	42
Tabel 4.1. Data Ancaman.....	62

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	NAMA/KETERANGAN
PASPAMPRES	Pasukan Pengamanan Presiden
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OMP	Operasi Militer Perang
OMSP	Operasi Militer Selain Perang
VVIP	<i>Very Very Important Person</i>
UU	Undang - Undang
WTC	<i>World Trade Center</i>
GTI	<i>Global Terrorism Index</i>
ISIS	<i>Islamic State In Iraq And Syria</i>
ASINTEL	Asisten Intelijen
ASOPS	Asisten Operasi
ASPERS	Asisten Personel
ASLOG	Asisten Logistik
KASI INTEL	Kepala Seksi Intelijen
KASI OPS	Kepala Seksi Operasi
SOP	<i>Standar Operasional Prosedure</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
KEMHAN	Kementerian Pertahanan
MAKO	Markas Komando
KOOPSSUS	Komando Operasi Khusus
BAIS	Badan Strategis Intelijen
SETMIL	Sekretaris Militer
SATGULTOR	Satuan Penanggulangan Teror
KOPASSUS	Komando Pasukan Khusus
DENJAKA	Detasemen Jala Mangkara
KOSTRAD	Komando Strategis Angkatan Darat
PASKHAS	Pasukan Khas

POM	Polisi Militer
PAMPRI	Pengamanan Pribadi
PAMINS	Pengamanan Instalasi
PAM MATAN	Pengamanan Penyelamatan
PANGKOTAMA	Panglima Komando Utama
PANGKOGASGABPAD	Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu
YONWALPROTNEG	Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan
DENPAL	Detasemen Peralatan
DENKES	Detasemen Kesehatan
DENKOMLEK	Detasemen Komunikasi Elektronika
DENSI	Detasemen Deteksi
DRONKAVSER	Eskadron Kavaleri Panser
PAMWIL	Pengamanan Wilayah
DANPLEK	Komandan Komplek
BKO	Bantuan Kendali Operasi
CBRNE	<i>Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, And Explosive</i>
ATC	<i>Air Traffic Control</i>
IPAC	<i>Institute For Policy Analysis And Conflict</i>
SSR	<i>Security Sector Reform</i>
USASF	<i>Us Army Special Forces</i>
SMG	<i>Sub Machine Gun</i>
DA	<i>Double Action</i>
PIN	<i>Personel Identification Number</i>
HT	<i>Handy Talky</i>
UHF	<i>Ultra High Frequency</i>
IPP	<i>Integreted Personal Protect</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keberadaan sistem pertahanan Negara sudah dirumuskan dan diatur pelaksanaannya agar mampu mengakomodir hal-hal yang ingin dicapai dalam kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan kepentingan bersama dari setiap orang atau warga negara dalam suatu negara yang selanjutnya menjadi tujuan negara tersebut serta dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan interaksi dengan negara lain guna mencapai tujuan negara. Suatu negara memiliki kepentingan nasional, mempunyai tujuan atau arah dalam pergaulan dengan berbagai negara dalam kancah dunia internasional. Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Sesuai dengan Visi, Misi dan program prioritas pemerintah dalam tatanan Pembangunan Nasional, pembangunan postur pertahanan negara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bersinergi dengan pembangunan bidang lainnya dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer dan nirmiliter. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas. Peningkatan kesiapan personel, alutsista, dan terlaksananya latihan matra dan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan rencana secara berkelanjutan merupakan indikator kemajuan pembangunan bidang pertahanan. Pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Permenhan RI Nomor 25 Tahun, 2014).

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas pokok, baik dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Disamping tugas tersebut TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni melaksanakan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan representasi negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus sebagai *Very Very Important Person* (VVIP). Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI dan melaksanakan tugas operasi pengamanan terhadap VVIP. Tugas - tugas tersebut merupakan amanat tujuan nasional, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD, 1945).

Namun, dalam konteks strategis yang dinamis dan perkembangan lingkungan senantiasa spektrum ancaman mengalami perubahan sehingga akan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto (2019) terdapat dua ancaman yang ada di Indonesia yakni ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual terdiri dari ancaman sparatisme, terorisme,

pemberontakan bersenjata, radikalisme, termasuk bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, perompakan dan pencurian sumber daya alam, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, perang siber dan intellijen. Ancaman siber menjadi salah satu ancaman yang membahayakan bila terus dibiarkan, karena menjadi sarana terorisme secara digital untuk menarik minat simpati dari kalangan generasi muda Indonesia menjadi terorisme. Sedangkan ancaman Potensial adalah ancaman waktunya bisa diprediksi dan yang akan terjadi. Ancaman adalah setiap kegiatan yang dinilai membahayakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, yang datang baik dari dalam dan luar negeri atau sesuatu yang bersifat menghalang serta menghambat kepentingan nasional (Yusgiantoro, 2019).

Ancaman tersebut dapat menjadi penghalang dalam mencapai tujuan negara dan tujuan pertahanan negara. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002, tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Gelombang globalisasi strategis dapat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto, adanya tatanan dunia yang baru bersifat uni-multipolar berupa ancaman siber, perbatasan dan terorisme akan berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan strategis di masyarakat baik nasional maupun international.

Pasca terjadinya serangan menara *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan serangan 9/11, maraknya ancaman terorisme yang terjadi pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2000 mengadakan kongresnya di Wina Austria mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan harus menaruh perhatian yang sangat serius terhadap serangan terorisme yang melakukan perbuatan dengan kekerasan. Pada saat ini, di bagi bangsa Indonesia

bahwa ancaman terorisme masih menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian dari semua warga negara yang dapat memporak-porandakan tatanan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana data yang dirilis *Global Terrorism Index* (GTI, 2019), menyebutkan bahwa dari 138 negara, Indonesia terdampak terorisme menempati urutan ke 35 negara. Dimana perkembangan paham radikal dan jaringan terorisme harus menaruh perhatian yang besar, sebab kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan lintas transnasional dengan ciri kekhasan yang bersifat klandestin.

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme dengan melakukan aksi-aksi teror yang menelan korban jiwa yang besar tanpa pandang bulu, baik dinegara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Beberapa contoh kejahatan terorisme yang terjadi beberapa negara dengan melakukan serangan terhadap presiden, diantaranya:

- a. John F. Kennedy presiden Amerika ke-35 yang dibunuh oleh seorang *sniper* yang bernama Lee Harvey Oswald saat berada di atas mobil limuosine kepresidenan pada tahun 1963.
- b. Anwar Sadat presiden ketiga Mesir yang dibunuh oleh empat orang anggota jihad Islam dengan memberondongkan tembakan senjata pada saat menonton parade militer memperingati Perang Yom Kippur pada tahun 1981.,
- c. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin gerakan nasionalis India melawan pemerintahan Inggris, ditembak seorang *ekstremis* bernama Nathuram Godse saat berangkat ke Birla House New Delhi pada tahun 1948.
- d. Indira Gandhi, perdana menteri India selama tiga periode, dibunuh dalam aksi teror oleh dua pengawal yang memeluk ajaran *Sikhisme* pada tahun 1984.
- e. Muammar Muhammad Abu Minyar Khadafi, menguasai Libya sejak tahun 1969 hingga 2011. Gaddafi di bunuh oleh Tentara Pembabasan Libya (pasukan anti-gaddafi) yang dibentuk oleh

Dewan Transisi Libya pada perang sipil Libya yang dibantu oleh pasukan NATO.

Dari beberapa contoh diatas, membuktikan bahwa kejahatan terorisme sangat luar biasa yang mengancam keamanan, ketentraman dan perdamaian dunia dan bentuk kejahatan lintas batas negara. Kejadian serangan ingin memberantas pelaku terorisme dan dapat menimbulkan tekanan dunia internasional dan rasa keprihatinan.

Terorisme melakukan serangan yang memakan ratusan korban jiwa orang tidak berdosa yang terjadi di Indonesia, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Akibat serangan pengeboman dari serangan terorisme yang terjadi di Indonesia mengakibatkan runtuhnya bangunan dan sarananya, serta menimbulkan rasa ketakutan bagi warga asing dan orang Indonesia sendiri, sehingga rasa khawatir dan turunya kepercayaan dunia internasional terhadap sektor keamanan di Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan terorisme untuk melakukan serangan, yakni dengan cara menjadi pengantin bom bunuh diri, bom mobil bahkan dengan dilakukan secara individu dikenal dengan sebutan *lone wolf terrorisme*. Pergeseran aksi terorisme dari organisasi menjadi aksi secara individu, menunjukkan mulai menyusutnya terorisme di Indonesia. Namun, dengan munculnya pendukung (ISIS) *Islamic State in Iraq and Syria* dan menyebarnya paham *takfiri*, sehingga dari kalangan kelompok pergerakan Islam yang ada di Indonesia tidak mendukung. Dalam melakukan serangan terhadap warga sipil dalam mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan taktik teroris tradisional dengan cara melalui kekerasan. *Lone wolf* merupakan seseorang dalam kelompok kecil yang beraksi sendiri atau seorang pejuang yang beraksi sendirian dengan menargetkan pemerintahan (Alex Curtis dan Tom Metger, 1990).

Kelompok terorisme yang terpapar paham radikal ISIS telah melakukan berbagai teror terhadap orang lain dalam bentuk ketakutan dan kekerasan yang merugikan masyarakat Indonesia. Dewasa ini terorisme melakukan serangan bukan lagi tempat ibadah, fasilitas umum, tempat keramaian namun sudah berubah sasaran kepada pejabat negara. Serangan yang dilakukan oleh Syahril Alamsyah alias Abu Rara yang

melakukan penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Menes Pandegelang Banten (Kompas.com, 2019). Ini menunjukkan bahwa terorisme masih ada di Indonesia, namun pada masa ini serangan teror yang dilakukan dalam bentuk kelompok mulai berkurang. Terorisme beranggapan bahwa pejabat publik, anggota Polri, khususnya pejabat pemerintah, sebagai *thoghut* atau musuh yang menghalangi niat mereka untuk melakukan jihad, karena Polri sebagai penegak hukum terhadap kelompoknya. Aksi perlawanan dan penyerangan yang menggunakan senjata terhadap aparat keamanan dan markas merupakan perubahan aksi terorisme, bahkan terdapat dugaan yang kuat adanya ancaman aksi terorisme terhadap objek vital strategis nasional dan pejabat negara (Buku Strategi Pertahanan, 2015).

Namun, dalam melaksanakan pengamanan terhadap pejabat negara masih terdapat kelengahan, kurang kepedulian dan kewaspadaan terhadap ancaman yang berkembang dan mengakibatkan terjadinya aksi serangan yang dilakukan oleh terorisme. Paspampres merupakan satuan yang melaksanakan operasi pengamanan terhadap VVIP. Sesuai dengan (Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1287/XII/2018) tugas pokok Paspampres melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya setiap saat dimanapun berada dari ancaman dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung, serta tugas protokoler khusus upacara - upacara kenegaraan yang dilaksanakan baik dalam Istana Kepresidenan maupun di luar Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres. Struktur organisasi Paspampres dengan komposisi empat eselon yaitu eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. Eselon pimpinan merupakan seorang yang memimpin dalam organisasi sebagai penentu kebijakan dan

pengambil keputusan yaitu Komandan/Wadan Paspampres. Sedangkan eselon pembantu pimpinan merupakan orang yang membantu pimpinan dalam melaksanakan pengawasan dan menentukan kebijakan serta mengambil keputusan, yaitu Inspektorat, Asrena, Asintel, Asops, Aspers dan Aslog Danpaspampres. Eselon pelayanan merupakan bagian yang membantu pelayanan dalam satuan yakni Seksi Keuangan, Sekretariat dan Detasemen markas. Eselon unsur pelaksana merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas pengamanan fisik jarak dekat secara langsung terhadap VVIP yaitu grup A, B, C dan grup D. Grup A bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya, grup B bertugas melakukan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden dan keluarganya. Sedangkan grup C melakukan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia dan grup D melakukan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.

Sesuai dengan struktur organisasi grup A Paspampres berada dibawah langsung Komandan Paspampres. Grup A Paspampres memiliki 4 Detasemen yaitu Detasemen 1, 2, 3 dan Detasemen 4 serta 1 Kompi Markas. Antara Detasemen satu dengan yang lainnya berbeda tugas dan fungsinya, namun sangat berkaitan erat dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Grup A Paspampres memiliki Dhuaja Berani Setia Waspada, yang mempunyai arti bahwa disamping sebagai prajurit Paspampres yang setia kepada tugas, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga, setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu menjaga kewaspadaan. Prajurit grup A Paspampres juga senantiasa berani dalam menghadapi berbagai situasi penugasan dalam pengawalan. Tugas grup A Paspampres adalah melakukan pengamanan fisik setiap saat secara langsung jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya dimanapun berada dari ancaman dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung.

Perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam mengamankan presiden masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan

teknologi yang berkembang pesat dapat berpengaruh tingkat ancaman terhadap presiden dan keluarganya. Saat mengamankan presiden dan keluarganya, prajurit grup A Paspampres selalu memegang prinsip dasar yang senantiasa menjadi prioritas pelaksanaan tugas, yaitu keamanan, keselamatan dan kenyamanan objek. Ketiga hal tersebut sangat erat hubungan antara satu sama lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi kesalahan sedikitpun yang berakibat fatal. Namun, pada pelaksanaan tugas terkadang dalam prinsip keselamatan dan keamanan tidak sejalan dengan prinsip kenyamanan. Kenyamanan merupakan terpenuhinya suatu keadaan yang bersifat holistic dan individual kebutuhan dasar manusia (Katharine Kolcaba, 2003).

Hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan yang dikeluarkan objek tidak sesuai dengan protokoler kepresidenan sehingga tidak sejalan dengan prinsip keselamatan dan pengamanan. Dalam mengakomodasi kenyamanan presiden mengeluarkan keinginan-keinginan berupa perintah lisan, instruksi, petunjuk langsung bahkan secara tertulis. Keinginan presiden pada intinya mengurangi formalitas dan protokoler yang berorientasi agar kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Namun bagi anggota Paspampres dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden diuntut lebih waspada dan bekerja secara ekstra. Dalam melaksanakan pengamanan presiden dengan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan mempertimbangkan keamanan serta ketentuan protokoler, namun kebutuhan yang bersifat pribadi harus dapat diakomodasikan dengan baik (prinsip tidak mengganggu kebebasan bergerak VVIP).

Ancaman terhadap keselamatan presiden dan keluarganya bukan merupakan kriminalitas biasa, tetapi lebih bersifat rongrongan terhadap kehormatan bangsa dan negara, oleh karenanya pengamanan presiden dilaksanakan oleh TNI. Menurut Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman (Alm) bahwa hakikat ancaman merupakan segala sesuatu yang membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa Indonesia.

Ancaman terhadap presiden dan keluarganya bukan hanya berupa ancaman fisik semata namun juga ancaman berupa non fisik. Ancaman fisik ancaman secara langsung dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Presiden dan keluarganya sedangkan potensi ancaman non fisik adalah ancaman yang secara tidak langsung, seperti perkataan/perbuatan yang tidak menyenangkan, mengganggu, melecehkan, menjatuhkan kehormatan serta semua hal teknis maupun non teknis yang dapat menyebabkan terhambatnya rangkaian acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh presiden. Pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam acara kunjungan kerja ke daerah terjadi beberapa kali ancaman teror yang membahayakan keselamatan jiwa presiden. Pengiriman tim advance anggota Paspampres ke daerah yang dikunjungi presiden masih terkendala dengan jumlah personel, dimana terjadi perubahan rundown acara dan penambahan titik kunjungan. Hal tersebut membuktikan bahwa pengamanan terhadap presiden masih kurang waspada, teliti dan terjadi kelengahan pada perkembangan situasi dalam melaksanakan tugas. Pengamanan yang menggunakan pola ring belum tergelar dengan baik, sehingga menimbulkan celah kerawanan yang berpotensi ancaman.

Dalam pengamanan instalasi kepresidenan baik istana Merdeka dan istana Bogor masih terjadi beberapa kali ancaman, baik ancaman berupa teror maupun ancaman orang yang masuk ke dalam area istana dengan cara melompat pagar pada malam hari. Selain itu juga ada ancaman secara fisik dengan rencana melakukan ancaman bom bunuh diri di depan istana Merdeka saat pergantian serah terima jaga yang dilakukan oleh anggota Yowalprotneg. Objek Vital Nasional adalah sumber pendapatan negara yang bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara seperti bangunan/instalasi dan/atau usaha, kawasan/lokasi (Kepres Nomor 63, 2004).

Prajurit grup A Paspampres merupakan prajurit pilihan dari berbagai matra dan kesatuan diantaranya Kopassus, Kostrad, Marinir, Yontaifib, Denjaka, Polisi Militer, Kopaska dan Paskhas. Dengan latar belakang yang berbeda antara prajurit satu dengan sama yang lain dalam melaksanakan

tugas pengamanan dituntut mempunyai satu pemikiran dan satu tindakan dengan kemampuan yang dimiliki, seiring dengan tuntutan tugas yang semakin berat. Dalam pelaksanaan tugas selalu mentaati petunjuk atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dimana yang berfungsi sebagai standarisasi dalam menjalankan tugas, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk menghindari kesalahan dan keraguan dalam bertindak. Menurut Budihardjo (2014) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur kerja atau perangkat lunak pengatur yang dapat mengatur tahapan suatu proses kerja tertentu.

Namun, dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden dan keluarganya, prajurit grup A Paspampres masih terjadi kelengahan, kurang kewaspadaan dan kurang ketelitian terhadap perkembangan situasi dan kondisi sehingga pelaksanaan tugas yang kurang optimal, mengakibatkan terjadi ancaman yang menimbulkan dapat kerawanan. Kesiapan fisik yang prima, kemampuan menembak, beladiri merupakan kualitas secara individual sebagai penunjang tugas. Kebiasaan presiden yang sering blusukan ke tempat tempat keramaian dan membagikan hadiah secara langsung terhadap masyarakat, dapat mengancam keselamatan jiwa presiden. Untuk mengantisipasi kerawanan terhadap ancaman tersebut dibutuhkan suatu strategi dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya. Suatu hasil kerja berdasarkan atas pengalaman, ketrampilan, kecakapan dan kemauan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya (Hasibuan, 2005, p94).

Dalam penjelasan yang tersebut diatas, maka peneliti lebih spesifik membahas mengenai strategi grup A Paspampres, dimana dalam melaksanakan tugas pengamanan masih terdapat kelengahan, kurang ketelitian dan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi yang dapat menimbulkan kerawanan. Dengan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan membahas mengenai **“Strategi Grup A Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah yakni bagaimana Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini dengan dua pertanyaan penelitian antara lain:

- a. Bagaimana grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya?
- b. Bagaimana strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Menganalisis grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.
- b. Menganalisis strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

1.4 Manfaat Penelitian

Melihat permasalahan yang diuraikan diatas, dengan harapan penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah kajian mengenai pelaksanaan pengamanan terhadap presiden dan keluarganya dari ancaman terorisme dengan instansi terkait serta upaya upaya yang telah dilakukan grup A Paspampres sebagai strategi untuk memerangi hal

tersebut yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti lainnya.

Bagi Universitas Pertahanan sebagai salah satu institusi pendidikan dalam bidang pertahanan, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai topik yang dapat dijadikan rujukan bagi kurikulum pendidikan Universitas Pertahanan di tahun-tahun mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ancaman terorisme merupakan ancaman nyata dan tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, sebagai masukan yang dapat digunakan satuan komando atas dalam memberikan petunjuk dan pelaksanaan tugas pengamanan yang efektif dan efisien dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap VVIP oleh Paspampres khususnya dan TNI pada umumnya.
- b. Bagi Pasukan Pengamanan Presiden, sebagai masukan kepada Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dalam pengamanan presiden dan keluarganya mendatang agar lebih optimal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Tinjauan pustaka pada penelitian ini akan mengulas tentang literatur-literatur yang membahas Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Landasan teori yang digunakan yaitu Konsep Ilmu Pertahanan, Konsep Strategi, Konsep Terorisme, Konsep Pengamanan dan Konsep Ancaman. Dalam pertanyaan penelitian akan terjawab, tujuan penelitian akan tercapai dan manfaat penelitian dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai masukan lembaga - lembaga pemerintah yang terkait dengan penelitian ini.

2.1.1 Konsep Ilmu Pertahanan

Pertahanan adalah reaksi dari suatu badan terhadap sebuah serangan, dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran resiko atau bahaya, dengan perlindungan dan/atau tanggapan. Pertahanan adalah wajah untuk mengenal (*recognizable face*) suatu negara. Pertahanan merupakan sebuah realitas suatu bangsa dan negara dalam menentukan keselamatan, keamanan dan kedaulatan. Ilmu pertahanan bukan semata domain militer pada pada masa modern sekarang. Dari ilmu pertahanan sudah menjadi bagian banyak keterlibatan ilmu pengetahuan lainnya. Pada saat ini konsep ilmu pertahanan sudah banyak terikat dan terkait dengan ilmu pengetahuan yang ada namun kelompok masyarakat di luar militer masih kesulitan dalam memahami bagaimana relasinya. Menurut Miriam Budiarjo (2008) menjelaskan kerangka sistem politik merupakan berkembangnya sistem politik dan pertahanan negara yang tumbuh dengan sistem politik terkait dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.

Ilmu Pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara mewujudkan keamanan nasional dengan kekuatan nasional dan mengelola sumber daya di masa damai, perang, dan sesudah perang, untuk

menghadapi ancaman baik militer maupun nonmiliter terhadap keselamatan, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Pertahanan bukanlah ilmu yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu lainnya seperti ilmu negara, ilmu pasti, filsafat, politik, antropologi, demografi, ekonomi, sejarah, hukum, ilmu kebumihan, bahasa dan juga psikologi. Ilmu pertahanan merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang tujuan penyelenggaraan negara dengan seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional (Gumilar N, 2015).

Menurut (Makmur Supriyatno, 2014) pertahanan dalam pembahasan ini mengenai hal yang berhubungan dengan manajemen sumber daya nasional dalam masa damai, mempersiapkan sumber daya manusia secara dini, cara mempersiapkan warga negara dalam mobilisasi, mempersiapkan perang dalam negeri pada ruang atau posisi geografi dan bagaimana mengelola warga negara agar tetap memiliki sikap patriotisme dan nasionalisme. Selain itu, menggunakan dimensi waktu yaitu pada masa damai, masa perang dan masa setelah perang untuk potensi pertahanan. Adapun potensi pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan territorial menggunakan kerangka *deterrence strategy, si vis pacem, para bellum*, membangun keamanan nasional, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan dan dunia (Supriyatno, 2014). Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman.

Menurut (Syarifuddin Tippe, 2016) dalam mengkaitkan posisi pertahanan dalam sistem international, ada empat hal yakni: pertama sejak berakhirnya perang dunia II keamanan regional menjadi subsistem dari sistem internasional yang telah menjadi fokus perhatian sendiri. Kedua, sejak pasca perang dingin kecenderungan penggunaan *soft power* oleh bangsa - bangsa daripada *hard power*. Ketiga, peningkatan perhatian ekonomi politik international menjadi sorotan pemikiran para pakar ilmu hubungan internasional. Terkait dengan pembentukan blok-blok regional, terdapat kemungkinan menimbulkan implikasi tersendiri terhadap studi Ilmu

Pertahanan. Keempat, “7 in 1” yakni terorisme, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, energi, pemanasan global, dan siber menjadi perhatian pada isu global.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman militer ditempatkan sebagai komponen utama yang didukung komponen utama dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sebagai unsur utama adalah lembaga pemerintahan yang berada di luar pertahanan sedangkan TNI ditempatkan sebagai unsur pendukung. Untuk menghadapi ancaman hibrida, sesuai dengan eskalasi yang berkembang menerapkan komponen pendukung dengan pola pertahanan militer.

Dalam mencapai tujuan nasional maka disusun pertahanan negara yang dimana Indonesia menerapkan suatu sistem pertahanan semesta merupakan peran dan fungsi dari seluruh warga negara yang terlibat dalam suatu pertahanan. Sistem pertahanan rakyat semesta akan melibatkan seluruh sumber daya nasional, warga negara, dan wilayah Indonesia lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara terpadu, total, terarah serta berlanjut demi keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, menjaga keutuhan negara Indonesia, serta menegakkan kedaulatan negara (Buku Pertahanan, 2015)

Sedangkan menurut Gubernur Lemhannas (Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, 2016) hak sebuah negara merupakan titik berat keamanan diletakkan pada negara dan sasarannya kedaulatan. Secara sederhana keamanan nasional adalah keamanan dan pertahanan dalam negeri sendiri. Pertahanan adalah usaha sebuah negara untuk menjaga kelanggengan hubungan serta kedaulatan dari ancaman militer dari luar negeri. Sedangkan keamanan dalam negeri merupakan upaya sebuah negara untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri yang mengancam kelanggengan hidupnya. Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara dalam menghadapi dan mengatasi gangguan, tantangan, ancaman dan hambatan yang datang dari dalam dan luar negeri baik secara

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan tangguhan, kemampuan dan ketangguhan serta mengembangkan kekuatan nasional yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, integrasi dan identitas dalam menjaga tujuan nasional (Kaelan, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti mensintesakan bahwa konsep pertahanan negara merupakan suatu rencana pertahanan negara yang di persiapkan sumber daya manusia secara dini dalam mencapai kepentingan nasional. Dalam mewujudkan keamanan nasional untuk menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter dengan mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada masa damai, masa perang dan sesudah perang diperlukan pertahanan negara demi keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, kedaulatan negara. Adapun kaitannya pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pertahanan negara untuk mengulas tentang ancaman terorisme yang semakin berkembang khususnya ancaman terhadap presiden dan keluarganya dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di Indonesia.

2.1.2 Konsep Strategi

Strategi adalah alat dalam mencapai tujuan, setiap orang mempunyai definisi atau pendapat yang berbeda dalam mengembangkan konsep strategi harus memiliki. Strategi adalah sebuah teori yang digunakan berbagai peristiwa perang dan kajian bidang militer. Namun dalam masa modern strategi tidak digunakan untuk memahami kajian bidang militer. Dalam pencapaian visi dan misi dalam organisasi, strategi sangat penting dalam mencapai sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Strategi pada semua tingkatan adalah perhitungan dalam membuat hasil yang lebih menguntungkan bukan secara kebetulan atau ditangan orang lain dengan konsep, dan sumber daya dalam batasbatas resiko yang dapat diterima orang lain. Strategi sebagai seni dan ilmu dalam mencapai tujuan nasional atau tujuan multinasional dengan mengembangkan dan menerapkan instrumen kekuatan nasional secara sinkron dan terintegrasi.

Penjelasan secara sederhana dari strategi pada tingkat negara tidak sepenuhnya menyampaikan peran dan kompleksitas pemikiran strategis. Strategi pada tataran negara merupakan seni dan ilmu mengembangkan dan memajukan kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatan ekonomi, politik, sosial-psikologis, dan militer negara terhadap aktor atau negara lainnya dan melindungi kepentingannya. Strategi merupakan kesatuan antara sumber daya, tujuan, dan cara dari suatu keberhasilan dari suatu kebijakan dengan konsekuensinya yang menguntungkan sebagai bagian kesuksesan dalam sebuah kebijakan.

Strategi dapat menjadi jembatan antara realitas dan kesenjangan yang diinginkan pada saat ini dan masa depan. Hal ini merupakan perhitungan antara tujuan, konsep, dan sumber daya yang menyeluruh dalam batas risiko yang dapat diterima dalam menciptakan hasil di masa depan yang lebih baik daripada yang mungkin ada. Diperlukan pertimbangan dalam lingkungan strategis dengan waktu tertentu untuk menerapkan sumber daya dalam mencapai hasil di masa yang diinginkan.

Dalam konteks negara, strategi untuk mencapai tujuan politik negara dalam persaingan atau kerjasama dengan actor-aktor lain walaupun bertentangan dengan melakukan pekerjaan spesifik dan instrumen kekuasaan (politik atau diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) (David Jablonsky, 2002). Dengan kata lain, strategi merupakan suatu kebijakan negara strategis yang kompetitif dengan kekuasaan yang melekat pada sumber daya alam dan sosial.

Menurut (Aliminsyah & Pandji, 2004:18) bahwa strategi adalah dalam mewujudkan hasil yang maksimal di butuhkan wujud rencana yang terarah. Dalam hal ini strategi dalam mencapai tujuan setiap organisasi dibutuhkan suatu rencana keseluruhan. Jadi organisasi dalam mengkoordinir berbagai macam elemen dalam melakukan kegiatan secara efektif dan efisien tidak hanya memilih kombinasi yang terbaik saja. Dalam wilayah kerja suatu organisasi untuk mendapatkan kedudukan atau posisi yang kuat diperlukan strategi yang tepat. Hal ini disebabkan karena organisasi dalam melaksanakan pendekatan untuk memenuhi keinginan

dan kebutuhan dan kemauan pelanggan pada suatu wilayah kerja yang dilayani diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Menurut (Daoed Joesoef, 2014) strategi merupakan keseluruhan operasi yang akan dilaksanakan baik secara fisik maupun intelektual yang dalam menanggapi, menyiapkan, dan mengawasi kegiatan secara kolektif dalam mencapai tujuan. Daoed Joesoef memberikan beberapa persamaan kata untuk strategi, yaitu *planning, programming, management, rational decisions, methode*, cara penggunaan, maupun berbagai kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dengan mengidentifikasi sasaran, dan tujuan dalam ruang dan waktu.

Dalam penelitian ini akan menyatukan berbagai pandangan dari pendapat mereka dan instansi terkait strategi, untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan. Menurut (Arthur F. Lykke Jr., 2001) dalam *U.S. Army War College Guide to Strategy*, merumuskan segala macam strategi baik dunia militer, politik, ekonomi tergantung dari kekuatan elemen yang digunakan yakni, *Ends, Ways, dan Means*. Penjabaran dari elemen-elemen tersebut adalah:

- a. *Ends*, merupakan tujuan yang dicapai dan membutuhkan analisa dan kejelasan yang tepat dalam menentukan penggunaan *ways* dan *means* yang efektif dan efisien.
- b. *Ways*, merupakan cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan, sehingga memungkinkan dan mampu untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
- c. *Means*, merupakan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan cara yang digunakan.

Tabel 2.1. Konsep Strategi

<i>STRATEGY = ENDS + WAYS + MEANS</i>	
<i>COMPONENT</i>	<i>DEFINITION</i>
<i>Ends</i>	<i>Objectives towards which one strives</i>
<i>Ways</i>	<i>Course of action</i>
<i>Means</i>	<i>Instruments by which some end can be achieved</i>

Sumber: *Army War College, Guide to Strategy* (2001)

Strategi pada medan tertentu merupakan seni dan ilmu dalam koalisi keamanan dan strategi yang menggunakan kekuatan nasional atau pada operasi dengan tidak menggunakan kekuatan dengan mengembangkan konsep strategis secara terintegrasi dan program tindakan yang terarah.

Berkaitan dengan penanggulangan ancaman terorisme, bila kelompok terorisme menggunakan perubahan strategi maka harus segera dapat beradaptasi terhadap kemungkinan yang terjadi. Dalam mempertimbangkan faktor kegagalan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang diperlukan strategi tepat. (James. J.F Forrest, 2007).

Sedangkan menurut Nainggolan (sebagaimana dikutip dalam Freddy Rangkuty, 1998, p.3-4), bahwa strategi adalah sebagai formulasi misi dan tujuan atau sasaran organisasi, yang didalamnya terdiri dari rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai sasaran tersebut secara eksplisit dengan mempertimbangkan situasi persaingan dan pengaruh dari kekuatan di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti mensintesis bahwa strategi merupakan perencanaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan ini melibatkan tidak hanya tujuan tetapi juga konsep dan sumber daya yang dimiliki. Peneliti akan rumusan "*Strategy = Ends + Ways + Means*", yang diartikan *ends* adalah sebuah tujuan, *ways* adalah cara yang dilaksanakan, dan *means* adalah sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama. Konsep strategi akan membantu

Universitas Pertahanan

peneliti dalam menganalisis strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

2.1.3 Konsep Terorisme

Terorisme merupakan suatu tindakan kejahatan dengan menciptakan teror atau menakut-nakuti kepada orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas secara langsung atau tidak langsung. Terorisme yaitu semua bentuk perbuatan atau tindakan kejahatan dengan cara kekerasan dan tidak mau menghargai kaidah-kaidah norma kehidupan manusia dengan motif kejahatan murni dan tingkah laku pihak lain dengan maksud orang pihak lain mau memenuhi keinginnya dengan cara mempengaruhi emosi, perasaan, dan kemauan.

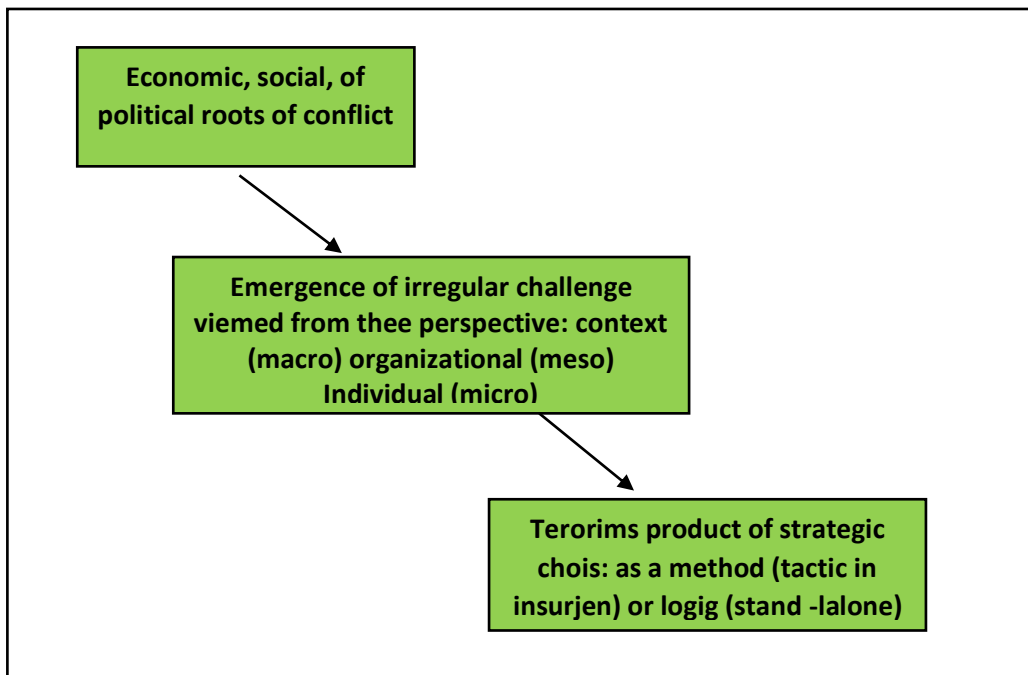
Istilah terorisme, teroris, dan teror itu sendiri berasal dari bahasa Latin *terror*, yang diturunkan dari kata kerja *terrere*, yang artinya menakutinakuti (*to frighten*). Secara etimologis "*terror*" berarti suatu keadaan pada ketakutan yang mendalam. Berdasarkan pengertian etimologis istilah terorisme dapat dimengerti sebagai sebuah alat atau sarana paksaan dan kekerasan dalam menciptakan atmosfer rasa ketakutan yang tinggi dan kekerasan seperti sebuah *reign of terror* (Fatlolon, 2016).

Harvey W. Kushner (2003) dalam bukunya yang berjudul *Encyclopedia of Terrorism* mengatakan bahwa adalah suatu hal yang mustahil untuk mengelompokan dan mengartikan bahwa terorisme semua pihak dapat dipuaskan. Kushner menyebutkan alasan sulitnya membuat satu definisi tentang terorisme adalah karena perbedaan ideologi politik dan kepentingan. Untuk mendefinisikan terorisme ada tiga factor yang di setuju antara lain:

- a. Metode yang digunakan adalah kekerasan;
- b. Sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah; dan
- c. Tujuan untuk menciptakan ketakutan dan memaksakan perubahan politik dan sosial.

Menurut (Departemen Luar Negeri AS, 1988) bahwa “terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, berkeinginan politik, mempunyai tujuan kepada sasaran-sasaran yang tidak mempunyai senjata dari kelompok kecil atau agen-agen bawah tanah/klandestin, dan bertujuan untuk mempengaruhi warga masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Terrorism Interdisciplinary Perspectives*, “*Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilitation itself. Complex technological society is extremely vulnarable to unsuspected and ruthless attacks of terrorism*” (Yonah Alexander & Seymour Maxwel, 1977) Bahwa terorisme merupakan sebuah peradaban yang modern dan muncul secara alami sebuah bentuk fenomena kontemporer.

Menurut (Michel , 2004) terorisme dapat di bedakan menjadi dua yakni terorisme sebagai logika tindakan dan terorisme Sebagai metode tindakan (yang selalu ditemukan pada insurjensi). Pada gambar 1, target yang dihadapi terorisme atau insurjensi, sangat penting untuk memahami dengan tepat, karena pada titik yang berbeda terdapat dua ancaman dalam proses evolusi ancaman dan penekanan yang berbeda pada unsur respon spesifik.



Gambar 2.1. Kemunculan Tantangan *Irregular*

Sumber : Wieviroka (2004)

Pada gambar tersebut diatas diterangkan bahwa terorisme adalah sebuah taktik dari gerakan insurjensi terkenal yang berdiri sendiri dalam mengimplementasikan sebuah taktis yang strategis. Permasalahan dari adanya kejahatan terorisme disampaikan oleh Spencer Metta dalam mencapai tujuan diperlukan adanya politik, sosial dan konflik ekonomi sebagai sebuah tantangan asimetrsi atau *irregular* dengan munculnya pemberontakan sampai pada kejahatan yang luar.

Sementara menurut (Muladi, 2004) dalam menangani kejahatan terorisme diperlukan penanganan dan cara-cara yang luar biasa (*Extraordinary Measures*) karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena berbagai hal:

- a. Terorisme merupakan kejahatan yang paling berbahaya dengan menakuti-nakuti atau teror terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak untuk hidup bebas dari rasa ketakutan.
- b. Sasaran terorisme cenderung terhadap orang-orang yang tidak bersalah sebagai korban atau bersifat random atau *indiscriminate*.
- c. Dengan memanfaatkan teknologi yang modern, kemungkinan dalam melakukan kejahatan menggunakan senjata-senjata pemusnah masal.
- d. Terorisme kemungkinan melakukan kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional dalam hubungan antara organisasi teroris.
- e. Bisa membahayakan keamanan dan perdamaian dunia secara global.

Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas, peneliti mensintesisakan bahwa kejahatan terorisme pada dasarnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan serta kerugian pada penitik beratannya. Ada beberapa faktor yang dapat mendasari aksi terorisme diantaranya, (1) ketidakpuasan terhadap pemerintah atau kondisi politik yang terjadi, (2) kemiskinan dan kesejahteraan. Penulis menilai bahwa kesenjangan yang terjadi seperti jumlah lapangan kerja yang

terbatas membuat jumlah kriminalitas bertambah. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir kelompok masyarakat dapat menjadi indikator bagi individu atau kelompok dalam melakukan aksi teror.

2.1.4 Konsep Pengamanan (*Security*)

Menurut Juwono Soedarsono, 2014 dalam menghadapi bermacam-macam tipologi ancaman militer (*non-traditional security threats*) maupun ancaman konvensional dibutuhkan desain sistem keamanan nasional. Peta keamanan dan kebijakan tiap-tiap negara dimana masing-masing negara tersebut mempunyai interdependensi yang berbeda dengan globalisasi dan demokratisasi yang melanda dunia.

Sebagai sebuah konsep, keamanan telah mengalami perubahan arti yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman. Secara etimologis, keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus*" (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Kata ini juga bisa berarti dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti "*uneasiness*"). Apabila dijadikan menjadi satu kata ini bermakna "*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*", bahwa pembebasan dari ketidaknyamanan, atau situasi damai tanpa risiko atau ancaman.

Menurut (Barry Buzan, 1991) pengertian keamanan mencakup lima sektor utama diantaranya: (1) *the military security* terdapat dua tingkatan dalam pengeloaan kapabilitas persenjataan baik secara offensive maupun defensive dengan persepsi negara dengan intensitas yang berbeda antar satu dengan lainnya; (2) *the political security* kepercayaan pemerintah pada sistem ideologi dan menaruh perhatian yang besar pada stabilitas organisasi negara; (3) *the economic security*, kekuatan negara dalam menopang tingkat kesejahteraan yang akseptabel yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar; (4) *societal security* kondisi evolusi yang mampu diterima dalam kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat; dan (5) *environmental security* dalam sistem kehidupan manusia bergantung dibutuhkan sebuah perhatian dan pemeliharaan dukungan baik secara lokal maupun global,

dengan tiap-tiap bagian mempunyai ikatan yang kuat antara satu sama lainnya.

Sedangkan menurut Flupi dan Born (yang dikutip Prof. Banyu Perwita) mempunyai tiga konsepsi *Security Sector Reform* (SSR) dalam sistem Negara demokrasi. Pertama, dalam menjamin keamanan stabilitas nasional maupun internasional di butuhkan Reformasi Sektor Keamanan. SSR sangat relevan digunakan pada negara-negara yang sedang berkembang yang sedang mengalami transisi demokrasi yang sering munculnya instabilitas keamanan dan politik. Kedua, iklim ekonomi dan politik juga terdorong oleh Reformasi Sektor Keamanan. Pada negara berkembang sering masuk pihak asing dan menyebabkan terjadinya konflik dan ancaman keamanan domestik. Ketiga, hubungan militer sipil menjadi harmonis dan supremasi sipil dengan meningkatkan demokratisasi. Menurut konsep SSR, efektifitas proses reformasinya ditentukan oleh apakah suatu negara sudah mengalami demokratisasi dalam sistem keamanannya atau tidak. SSR menuntut peranserta dari berbagai kekuatan reformis (parlemen, militer dan sipil) dalam mendorong demokratisasi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif masyarakat, budaya, politik dan lainnya negara tersebut.

Semakin bermacam-macam ancaman diperlukan salah satu faktor dengan perluasan konsep keamanan. Buzan dan Hansen (1991) mengatakan dengan terciptanya evolusi studi keamanan yang dapat mempengaruhi di perlukan lima factor, yakni dengan menggunakan istilah *International Security Studies*. Kelima faktor tersebut diantaranya *great power politics, technology, event, academic debate, Institutionalisation*.

Menurut Buzan dan Hansen pada bidang keamanan akan menjadikan rujukan setelah terciptanya evolusi. *Great Powers Politics*, telah mbingkai relasi antar negara. Selama empat puluh tahun rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendominasi studi keamanan sudah tampak jelas dan sangat mempengaruhi stabilitas dunia pada era perang dingin. *Technology*, semakin tidak terbantah dengan meningkatnya perkembangan teknologi pada sector militer dengan pesat. Dengan semakin canggihnya seperti alat angkut yang dikembangkan untuk

memfasilitasi peluncuran senjata nuklir. *Events*, negara yang mempunyai *powers* dapat mempengaruhi penggunaan sebuah fenomena paradigma untuk mengamati fenomena tersebut. *Academic Debate*, nuansa analitis dan normative dalam ilmu sosial dapat menginterpretasikan suatu permasalahan. Dalam studi keamanan yang merupakan salah satu penunjang terjadinya evolusi adalah *Institutionalisation*. Buzan dan Hansen mengambil contoh di beberapa universitas-universitas yang bermunculan dalam jurnal mempunyai spesifikasi tertentu untuk menjawab fenomena dengan munculnya isu-isu baru dan berkembang pada ranah keamanan seperti *think tank*, lembaga-lembaga riset seperti COPRI, program-program studi baru.

Sedangkan menurut buku petunjuk Mabes AD (2004), kegiatan operasi pengamanan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan operasi Intelijen yang dititik beratkan pada upaya mencegah timbulnya kerugian dipihak sendiri sebagai akibat bencana dan kerawanan pihak sendiri, akibat dari tindakan musuh serta mencegah upaya penyelidikan dan penggalangan yang dilakukan oleh musuh. Untuk keberhasilan kegiatan operasi pengamanan terlebih dahulu dipahami tentang tujuan, sasaran dan obyek, sifat, bentuk dan macam, peranan dan prinsip, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, taktik dan teknik, alat peralatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

- a. Meniadakan peluang bagi pihak lawan untuk melakukan penyelidikan dan penggalangan terhadap tubuh Angkatan Darat beserta segala usaha dan kegiatannya.
- b. Mencegah peluang bagi lawan untuk menyusup ke dalam tubuh Angkatan Darat melalui *werving* baik militer maupun PNS.
- c. Mencegah pengaruh lingkungan yang negatif terhadap personel Angkatan Darat termasuk keluarganya.
- d. Meniadakan dari hal-hal disebabkan karena kerawanan sendiri seperti kealpaan, kecerobohan, kesengajaan, bocornya informasi sehingga dapat merugikan usaha-usaha pengamanan.

- e. Mencegah kerugian atau korban personel, materiil, instalasi, markas, dokumen dan lain-lain milik Angkatan Darat, akibat suatu bencana atau kerawanan pihak sendiri.

Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas, peneliti mensintesakan bahwa untuk menciptakan keadaan atau kondisi yang stabil diperlukan pertahanan tepat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori pengamanan ini akan membantu penulis dalam menganalisis Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

2.1.5 Konsep Ancaman

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seringkali menghadapi berbagai ancaman yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman adalah semua kegiatan atau usaha secara konsepsional yang dilaksanakan dengan cara tindakan kriminal dan secara politis untuk merubah atau merombak kebijakan yang ada.

Menurut UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, yang dinilai membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman Militer adalah ancaman suatu negara yang dilakukan oleh militer kepada negara lain. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. Gerakan Bersenjata adalah gerakan dengan melakukan perlawanan/serangan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh sekelompok warga negara suatu negara.

Menurut Yusgiantoro, ancaman adalah setiap kegiatan yang bersifat menghambat dan menghalang kepentingan nasional yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penangkalan (*deterrence*), bersifat aktual (nyata) dan

potensial (belum nyata). Ancaman bersifat dinamis dan setiap waktu dapat berubah-ubah, misalnya hari ini mungkin menjadi ancaman tetapi besok akan berubah tidak menjadi ancaman lagi dan yang sebelumnya gangguan akan meningkat menjadi hambatan, seterusnya hambatan akan meningkat menjadi tantangan, dan akhirnya menjadi ancaman.

Stephen M. Waltz (1987) menyebutkan bahwa ada empat kriteria ancaman dalam buku yang berjudul *The Origins of Alliances* diantaranya:

- a. Kekuatan mencakup ukuran, populasi dan kemampuan ekonomi.
- b. Kemampuan menyerang.
- c. Niat menyerang.
- d. Kedekatan wilayah, Kemampuan menyerang dan Niat menyerang (Waltz, 1987).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai ancaman di atas, dapat disintesis bahwa ancaman merupakan segala tindakan dan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, instansi, negara dan bangsa yang dapat menghambat tujuan.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu bermanfaat dan membantu menguraikan permasalahan penelitian dan sebagai dasar dalam membuat kerangka dan analisis pada pembahasan dan penentuan langkah - langkah hasil penelitian secara sistematis dari teori/konsep. Ada sepuluh penelitian yang relevan dan korelatif dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk dijabarkan, diantaranya:

Pertama, dalam jurnal dengan judul Sinkronisasi SOP Pengamanan VVIP dengan Kebijakan Objek, karya Muhammad Erfani (2016). Dalam melaksanakan tugasnya pengamanan sebagai kepala Negara, Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya maka tidak terlepas dari potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya baik secara

fisik maupun potensi ancaman non fisik. Ancaman secara fisik adalah ancaman secara langsung mengancam keamanan dan keselamatan jiwa seseorang. Sedangkan ancaman non fisik seperti perbuatan atau perkataan yang tidak menyenangkan, membuat teror, ancaman melalui media sosial, mengganggu dan melecehkan Objek. Hal ini tentu juga dapat mempengaruhi kehormatan dan kedaulatan negara serta martabat dan kewibawaan Republik Indonesia. Operasi pengamanan VVIP yang dilaksanakan secara terpadu, tentu tidak terlepas dari prosedur pengamanan yang ada dengan selalu memperhatikan kebijakan atau keinginan Objek.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul Peran Pasukan Pengamanan Presiden Pada Operasi Pengamanan VVIP di Daerah karya Fortunata Okto Fermula (2018). Dalam penyelenggaraan operasi pengamanan memerlukan keterpaduan antara Paspampres dan Satgas Pengamanan Wilayah untuk bersinergi dan bekerjasama menyelenggarakan gelar operasi pengamanan VVIP, sehingga tidak muncul celah sedikitpun potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan VVIP selama berada di suatu daerah. Paspampres melaksanakan operasi pengamanan VVIP dan melaksanakan gelar mulai dari rapat koordinasi tingkat pusat dilaksanakan oleh Sekretaris Negara di Jakarta dengan mengundang sejumlah pihak terkait seperti kementerian yang membidangi, panitia acara yang punya hajat, pemerintah daerah yang akan dikunjungi, Bais TNI, Sekretaris Militer Presiden dan Paspampres. Dalam rapat koordinasi tingkat pusat tersebut akan membahas tentang rencana garis besar kunjungan VVIP ke daerah tersebut sehingga dapat menjadi bahan acuan dari masing - masing instansi terkait untuk persiapan kunjungan dan merencanakan kegiatan tersebut.

Ketiga, dalam tesis dengan judul Strategi peningkatan kemampuan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karya Ricky Arinuryadi (2018). Secara umum pengamanan VVIP merupakan tolok ukur tingkat kesiapan operasional Paspampres. Kemampuan prajurit Paspampres dalam melaksanakan tugas seperti kemampuan menembak,

beladiri, jasmani yang baik, kepribadian, kesehatan dan psikologi. Dengan kemampuan yang dimiliki setiap prajurit tersebut, mampu bekerja secara individu dan secara tim/kelompok dilapangan. Dalam pelaksanaan pembinaan personel, prajurit Paspampres selalu meningkat kemampuan baik secara individu maupun kelompok secara berkala, bertahap, bertingkat dan berlanjut. Pembinaan kemampuan prajurit Paspampres terus dilaksanakan dalam mendukung tingkat kesiapan operasional. Personel yang *stanby* atau cadangan selalu siap untuk mengantisipasi kegiatan yang secara mendadak dan *incognito*. Prajurit Paspampres merupakan prajurit pilihan yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme dalam bidang militer dan pengamanan VVIP.

Keempat, dalam jurnal dengan judul Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman *Lone Wolf Terrorism* di Jawa Barat karya Tiara Firdaus Jafar (2019). Ancaman *lone wolf terrorism* yang melakukan aksi serangan teror pada pelaku tunggal secara sendiri, sehingga merupakan tantangan baru bagi kepolisian Indonesia dan masyarakat untuk lebih waspada terutama yang menjadi daerah rawan isu terorisme seperti Jawa Barat. Beberapa kerangka teroris menjelaskan fenomena *lone wolf terrorism* menjadi lebih sistematis. Pertama, secara hirarki kebebasan berpolitik secara individu maupun kolektif yang terorganisasi yang dtuangkan dalam konsep radikalisme menganut sebuah doktrin. Kedua, *transnational organized crime*, sebuah ideologi dengan tindakan yang melanggar hukum dengan kondisi pada bentuk kolektif dan saling mendukung tindakan yang melawan amoral yang melawan bangsa dan negara. Ketiga, dalam *War on Terror* kebijakan Amerika Serikat dunia akan mengecam serangan eksistensi terorisme, yang dikenal dengan serangan 9/11. Keempat, *lone wolf terrorism* dalam melakukan aksinya pada suatu tempat tidak lagi membutuhkan koordinasi terhadap jaringan organisasi. Pada level individu pelaku teror mengalami perkembangan yang sangat pesat dari level kelompok organisasi. Kelima, dalam memperkuat komponen ketahanan nasional, diperlukan beberapa aspek yang saling berintegrasi dalam menghadapi segala ancaman.

Di Jawa barat terjadinya perubahan pola seperti di daerah konflik Irak dan Suriah pergeseran terorisme berbasis jaringan atau *transnational organized crime* ke *lone wolf terrorism*. Semakin rentannya status keamanan wilayah Jawa Barat disebabkan gerakan *lone wolf* selalu berkamufase dan sulit untuk mendeteksi sebab sangat tertutup di tengah masyarakat dan mengancam keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kelima, dalam jurnal yang berjudul Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme di Indonesia karya Benyamin Boy (2020). Jenderal TNI Moeldoko membentuk Koopsus TNI pada saat menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015, yang terdiri dari pasukan elite TNI, yakni Sat-81 Gultor Kopassus, Satuan Bravo-90 Paskhas dan Detasemen Jala Mangkara. Tujuan pembentukan Koopsus adalah merespon operasi khusus untuk meningkatkan efektifitas TNI, diantaranya: pertama mengatasi aksi terorisme di Indonesia karena tujuan menyebarkan paham ideologi sehingga mengganggu keamanan negara, kedua, operasi yang tepat untuk menangani aksi terorisme dan ketiga tindakan yang tepat, karena kejahatan terorisme dapat mengganggu keutuhan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam menimbulkan efek gentar (*Deterrence affect*) terhadap musuh diperlukan satuan yang dapat bergerak dengan cepat dan tepat. Pelibatan Koopsus TNI dalam mengatasi aksi terorisme dinilai sudah tepat, ancaman terorisme yang membahayakan kedaulatan negara dapat di tangani sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis bagi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Peneliti lebih lanjut akan membahas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya pada tabel 2.2. penelitian terdahulu.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Teori/Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Erfani (2016)	Sinkronisasi SOP Pengamanan VVIP dengan Kebijakan Objek	Kualitatif	Analisis deskriptif dan analisa SWOT	<ul style="list-style-type: none"> Dampak kebijakan Objek pada pola pelaksanaan operasi pengamanan VVIP. Pengamanan dan pengawalan terhadap konvoi kendaraan bermotor Wakil Presiden dan keluarga. Pengamanan Instalasi Kepresidenan (Kantor dan Kediaman resmi). Pengamanan kegiatan protokoler yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Membahas operasi pengamanan VVIP Operasi pengamanan secara terpadu antara Paspampres dengan satuan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus pada pengamanan presiden dan keluarganya dari ancaman terorisme Penelitian yang akan lakukan pada satuan grup A Paspampres
2	Fortunata Okto Fermula (2018)	Peran Pasukan Pengamanan Presiden Pada Operasi Pengamanan VVIP di Daerah	Kualitatif	Teori Peran, Keamanan, Organisasi, Koordinasi, Opspam VVIP	<ul style="list-style-type: none"> Paspampres bekerja sesuai prosedur demi menjaga keselamatan dan keamanan VVIP. Faktor yang mempengaruhi meliputi personel, material, 	<ul style="list-style-type: none"> Membahas pengamanan VVIP Menggunakan teori pengamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Lokus penelitian sama namun lebih kepada Tim Edvance Penelitian yang akan dilakukan

					<p>hubungan antar satu tugas, jadwal serta kerahasiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola gelar operasi pengamanan VVIP di daerah mengacu pada SOP yang berlaku. 		Grup A Paspampres
4	Ricky Arinuryadi, (2018)	Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Dalam Tugas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.	Kualitatif atau Naturalistik	Teori kesiapan kerja, manajemen kinerja, kompetensi,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan strategi peningkatan kemampuan prajurit Paspampres dinilai masih kurang untuk kesiapan operasional belum terarah, karena personel yang mengikuti latihan sedikit dikarenakan bertugas diluar kesatuan. • Kesiapan acara incognito perlu peningkatan. • Pola peningkatan kemampuan dan ketersediaan bujuk/protap perlu penambahan. • Alat perlatan dan perlengkapan perlu peremajaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pengamanan VVIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan peningkatan kemampuan personel • Penelitian yang akan dilakukan yakni pengamanan Grup A Paspampres

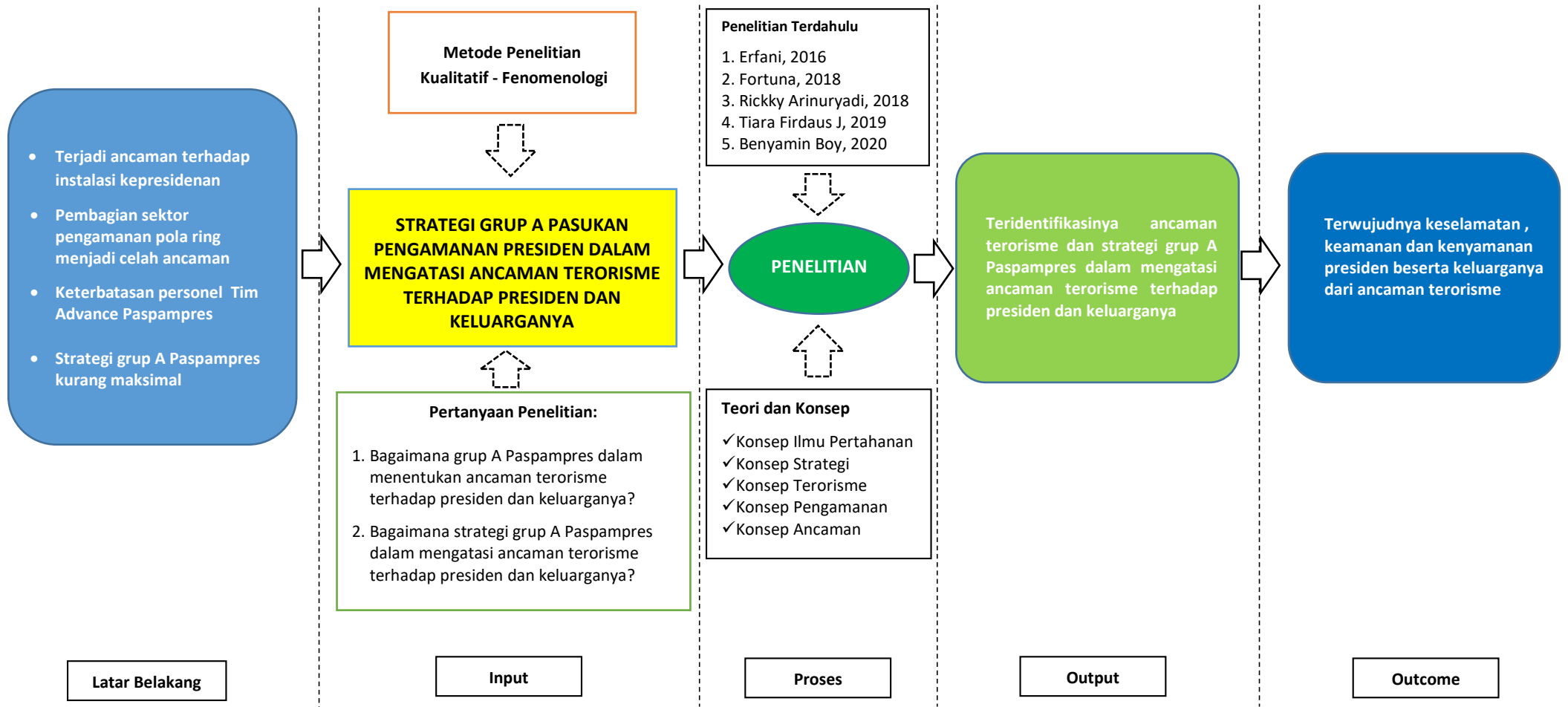
4	Tiara Firdaus Jafar (2019)	Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman <i>Lone Wolf Terrorism</i> di Jawa Barat	Kualitatif	Konsep radikalisme, terorims, teori ancaman	<ul style="list-style-type: none"> • Pola aksi terorisme yang dilakukan di Irak dan Suriah terjadi pergeseran gerakan terorisme berbasis jaringan atau <i>transnational organized crime</i> ke <i>lone wolf terrorism</i> di Jawa Barat. • Di Jawa Barat munculnya <i>lone wolf terrorism</i>, status keamanan semakin rentan karena sulitnya mendeteksi gerakannya yang berbaur pada masyarakat sehingga menjadi faktor penghambat untuk menindak objek baru. • Dalam menghadapi segala ancaman semua aspek saling berintegrasi untuk memperkuat komponen nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas strategi dalam menghadapi terorisme • Menggunakan konsep terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian di Jawa Barat • Penelitian yang akan dilakukan yakni Grup A Paspampres
5	Benyamin Boy (2020)	Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara	Kualitatif	UU No. 34 tahun 2004 ttg TNI, Teori Pertahanan, Strategi,	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyebarkan ideologi aksi terorisme di Indonesia sudah sangat meresahkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan konsep strategi 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian Koopsus TNI

		Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme di Indonesia		Kedaulatan, Power, Terorisme, dan Teori Pengembangan Organisasi.	karena tujuan dan sasarannya mengganggu keramanan negara. <ul style="list-style-type: none"> • Dalam menangani aksi terorisme di Indonesia dibentuk Satuan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. • Di Indonesia aksi terorisme sudah meresahkan masyarakat sehingga pelibatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia sudah menjadi tepat. 	dan konsep terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang akan kita laksanakan yakni satuan grup A Paspampres
--	--	---	--	--	--	----------------------	---

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir peneliti dalam tesis ini berawal dari 2 (dua) hal yang akan diteliti dan diuraikan dalam rumusan masalah yakni tentang (1) bagaimana grup A Paspampres menentukan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya (2) bagaimana strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Kedua rumusan masalah tersebut adalah *input* yang akan di *process* dengan menggunakan konsep yang ada, yakni 5 konsep yang terdiri dari konsep ilmu pertahanan, konsep strategi, konsep terorisme, konsep pengamanan dan konsep ancaman. Dari konsep tersebut menguraikan beberapa indikator yang dianggap sebagai dasar untuk meneliti guna menjawab rumusan masalah yang ada. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memperoleh *output* berupa jawaban dari rumusan masalah yang ada yakni berupa teridentifikasinya ancaman dan terciptanya strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Penelitian juga telah mengalami perubahan pola yang telah mengikuti perkembangan zaman dan penilaian terhadap strategi grup A Paspampres yang ada. Penilaian ini guna menganalisa apakah strategi grup A Paspampres yang dimiliki saat ini mampu mengatasi terjadinya ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. *Output* ini diharapkan akan memberikan *Outcome* berupa terwujudnya strategi grup A Paspampres yang tangguh dan sempurna sehingga presiden dan keluarganya terjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanannya dari ancaman terorisme.

Berdasarkan fenomena dan teori/konsep maka dapat di jabarkan oleh peneliti mewujudkan dalam kerangka berpikir diantaranya:



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Penelitian mengenai strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan guna memahi secara individu atau kelompok tentang masalah sosial yang diteliti (Creswell, 2016). Pada penelitian kualitatif ini, data-data dikumpulkan dalam bentuk gambar, kata-kata sehingga tidak menekankan angka. Menurut Moleong (2011) peneliti mencari keterangan atau informasi tentang gejala-gejala yang ada dan mempelajari hasil kerjasama tentang masalah atau situasi yang sama.

Penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana penelitian ini berawal dari sebuah fenomena yang di teliti dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau informan yang mengalami suatu peristiwa secara lebih mendalam (Sugiono, 2011). Tujuannya adalah secara komprehensif untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan menganalisis tentang aspek kebijakan dan kelembagaan yang mengatasi ancaman terorisme. Peneliti mengumpulkan keterangan secara lengkap di batasi waktu tertentu dengan menggunakan berbagai aturan yang ada berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber dan data skunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini

Dalam penelitian kualitatif ini dapat berguna untuk mengkaji, memahami dan menganalisis serta mengembangkan kerangka konseptual sebagai pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mendukung tugas TNI dalam mengatasi terorisme pada

umumnya dan grup A Paspampres pada khususnya di masa mendatang agar pengamanan terhadap presiden dan keluarganya lebih optimal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Rencana penelitian dibuat agar melaksanakan penelitian lebih terencana dan terarah dengan menetapkan tempat dan waktu penelitian, untuk itu peneliti membuat rencana penelitian sebagai berikut:

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah tempat yang dibutuhkan untuk mengambil data. Peneliti membagi tempat penelitian menjadi tempat penelitian utama dan pendukung. Dalam penelitian ini, tempat penelitian utama adalah Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, selaku badan pelaksana pusat yang melaksanakan pengamanan fisik secara langsung terhadap presiden dan keluarganya. Sementara tempat penelitian pendukung adalah tempat peneliti mencari informasi pendukung yakni Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, Komando Operasi Khusus TNI dan Badan Intelijen Strategis TNI. Pemilihan tempat ini karena mempunyai relevansi yang dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Selain itu, mempertimbangkan waktu, jarak dan ekonomi yang dimiliki oleh peneliti.

3.2.2. Waktu Penelitian

Guna perkembangan dan pencapaian penelitian ini lebih terarah maka peneliti menentukan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan November tahun 2020 sampai dengan Januari 2021. Kemudian pada bulan Februari 2021 peneliti melaksanakan seminar hasil penelitian. Kemudian melakukan ujian tesis dilanjutkan dengan perbaikan tesis serta pengumpulan tesis. Adapun lebih lanjut akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020					2021	
		Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul Proposal							
2	Proses Bimbingan							
3	Seminar Proposal							
4	Perbaikan Proposal							
5	Penelitian dan Pengumpulan Data							
6	Analisa Data Penelitian							
7	Penyusunan Laporan Penelitian							
8	Seminar Hasil Penelitian							
9	Perbaikan							
10	Sidang Tesis							
11	Perbaikan Tesis							
12	Penyerahan Naskah Tesis							

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian tentu mempunyai subjek dan objek penelitian. Untuk itu, penelitian ini ditentukan subjek dan objek penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1 Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikonto, (2016) variable penelitian yang melekat yang dipermasalahkan karena subjek penelitian memberi batasan subjek penelitian sebagai benda. Peran yang sangat strategis pada sebuah penelitian

adalah subjek penelitian karena pada subjek penelitian, data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek penelitian adalah tempat untuk memperoleh data penelitian dengan berupa informan yang kompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, khususnya Komandan Paspampres, Asisten intelijen, Asisten Operasi, Komandan Grup A Danpaspampres, Komandan Detasemen 1 grup A Paspampres, Kasi Intelijen dan Kasi Operasi grup A Paspampres, yang melakukan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden dan keluarganya setiap saat dimanapun berada dari ancaman dan gangguan secara langsung maupun tidak langsung. Instansi ini terletak di Jln. Tanah Abang II No. 26 Jakarta Pusat.
- b. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dirjen Strategi Pertahanan khususnya Direktorat Kebijakan Strategis. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan kementerian di bidang pertahanan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya ancaman yang berpotensi membahayakan eksistensi Indonesia secara umum salah satunya terorisme. Kementerian ini terletak di Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
- c. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia, merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI yang bertugas mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Lembaga ini terletak di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

- d. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. BAIS bertugas untuk menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan. Lembaga ini terletak di Jln. Raya Kalibata No.141 Pancoran Jakarta Selatan.

Tabel 3.2 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto	Komandan Paspampres	Mako Paspampres
2	Kolonel Inf Muhamad Imam Gogor	Asisten Operasi Danpaspampres	Mako Paspampres
3	Letkol Mar Ahmad Effendi	Wakil Asisten Intelijen Danpaspampres	Mako Paspampres
4	Letkol Mar Tri Maryanto, SE, Hanla	Wakil Komandan Grup A Danpaspampres	Mako Paspampres
5	Letkol Inf Franky Susanto	Komandan Detasemen 1 Grup A Danpaspampres	Mako Paspampres
6	Mayor Inf Reno Handoko, S.E	Pabandya Operasi Paspampres	Mako Paspampres
7	Mayor Inf Wicaksono HN	Kasi Intelijen Grup A Paspampres	Mako Paspampres
8	Mayor Kav Said Winagiri	Kasi Operasi Grup A Paspampres	Mako Paspampres

9	Kolonel Inf Joni Abdi	Kasubdit Hanmil Ditjen Strahan Kemhan	Ditstrahan Kemhan
9	Kolonel Pas Dili Setiawan, M.Si (Han)	Asintel Koopssus TNI	Mabes TNI
10	Kolonel Pas Cendy Arief Tjahjono	Paban Utama D1 Dit. D Bais TNI	Markas Bais TNI
11	Al Chaidar Puteh	Pengamat Terorisme	Universitas Almalikussaleh Lhokseumawe Aceh

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti (2020)

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang akan teliti. Objek penelitian adalah peneliti menetapkan sasaran atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk melakukan penelitian, dan selanjutnya menarik kesimpulannya atau suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan sehingga suatu hal subjektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (Sugiyono 2014:20). Objek penelitian merupakan permasalahan, problem atau isu yang diteliti dan menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dari penelitian ini akan menganalisa bagaimana strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan adalah sebuah cara atau strategi peneliti dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan studi

pustaka pada penelitian kualitatif ini dengan natural *setting* (kondisi yang alamiah). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi (Moleong, Lexy J, 2004:135) yaitu:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi atau pengamatan adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada kegiatan yang sedang berlangsung dengan jalan mengadakan cara pengamatan. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penginderaan terhadap suatu objek sedang berlangsung pada di lingkungan yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek (Suharsimi Arikunto). Observasi adalah penyelidikan secara sistematis dengan menggunakan indera mata terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu lingkungan dengan cara menganalisis suatu kejadian. Dalam melaksanakan observasi terdapat teknik yang ditentukan oleh peneliti sendiri dengan cara mendengar, mencium, melihat terhadap objek yang sedang dilakukan penelitian yang merupakan keberhasilan observasi. Keberhasilan dan ketepatan dari hasil penelitian adalah pengamat sendiri (Yusuf, A. M., 2014).

Menurut Sugiyono (2011) dalam membedakan observasi menjadi 2 yakni observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non participant observation*). Observasi partisipan (*participant observation*) adalah suatu observasi dimana secara langsung peneliti mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi non partisipan (*non participant observation*) adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung terhadap kegiatan atau sebagai pengamat independen dan data yang diperoleh kurang mendalam dan kurang lengkap. Pada penelitian ini yang digunakan yakni observasi partisipan, peneliti terlibat pada kegiatan atau bertanya kepada informan secara langsung dan

memperoleh data yang lebih tajam dan lengkap, sehingga dapat menjawab data tentang Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dengan lisan, yang mana terdapat dua orang atau lebih dengan saling bertemu atau berhadapan secara fisik langsung dengan melihat, mendengar dengan menggunakan mata telinga sendiri (Sukandarrumidi , 2006:89). Dalam penelitian teknik wawancara dengan memakai metode semi tersruktur, dimana peneliti mengadakan wawancara dengan menggunakan pedoman/ panduan dengan mengembangkan topik dengan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Dalam menggali data untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan/ subjek terkait dengan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman/panduan wawancara untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Sebelum melakukan wawancara peneliti mengadakan janji atau kesepakatan mengenai tempat dan waktu untuk melakukan wawancara kepada informan. Dengan menggunakan pedoman wawancara peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pedoman/panduan wawancara. Dalam mendalami penelitian tersebut peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan diluar pedoman/panduan wawancara agar hasil yang dicapai lebih mendalam. Dalam melakukan wawancara peneliti mencatat beberapa informasi yang dianggap penting dan peneliti juga melakukan perekaman

dengan menggunakan ponsel atau alat lainnya terhadap informasi yang disampaikan oleh informan kepada peneliti. Bukti rekaman akan menjadi nilai tambah karena suatu bukti yang lebih otentik apabila terjadi salah penafsiran terhadap jawaban dari informan disampaikan kepada peneliti. Setelah melakukan penelitian dengan hasil data rekaman yang ada diponsel atau alat lainnya selanjutnya peneliti membuat ringkasan dengan memberikan penafsiran terhadap data-data yang di peroleh lewat wawancara. Dalam menjawab rumusan masalah peneliti melakukan wawancara lebih daripada satu informan, sehingga tergantung dari kejelasan informasi yang disampaikan informan kepada peneliti.

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang penelitian, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan buku atau referensi. Dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari literature, referensi, dokumen tertulis, foto-foto, majalah, makalah dan yang lainnya yang tertulis melalui telaah bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data yang tersedia seperti foto-foto atau karya tulis akademik akan menjadikan hasil penelitian yang lebih semakin kredibel (Sugiyono, 2005). Dalam mencari data pendukung peneliti menggunakan studi pustaka dari penelitian: (1) Referensi buku, yang dapat memberikan keterangan topik perkataan, tempat pariwisata, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal. (2) *Internet Searching*, dalam mencari dan mengumpulkan data-data peneliti menggunakan internet, yaitu dari *website* maupun blog. Dalam melakukan pemikiran peneliti mencari pendapat dari para pakar/ahli, referensi atau penelitian lainnya sehingga peneliti dapat membandingkan dari hasil yang didapatkan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Data yang dipakai pada penelitian ini berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan primer adalah aturan-aturan hukum yang mengikat yaitu Perundang-undangan. Dalam menginventarisasi bahan hukum primer pada penelitian ini berkenaan dengan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek strategi pertahanan negara.

Di samping melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder, yakni bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer antara lain buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, sumber-sumber hukum negara lain, bahan seminar dan kegiatan lain baik bertaraf nasional maupun internasional dan pendapat para ahli hukum, serta literatur lainnya yang terkait dengan kelembagaan dan kewenangan suatu lembaga. Kamus bahasa, kamus hukum, jurnal nasional dan internasional dan ensiklopedia merupakan pendukung bahan hukum primer dan skunder yang tersier.

Berdasarkan ketiga teknik tersebut, peneliti akan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan subjek penelitian (informan sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.2). Kemudian, menggunakan teknik studi pustaka dan mengumpulkan materi perpustakaan yang dapat digunakan menganalisis rumusan masalah. Peneliti juga menggunakan teknik observasi dengan mempertimbangkan kemampuan waktu, jarak, dan ekonomi yang dimiliki peneliti.

3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut (Sugiyono 2007,270) pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada 4 kriteria yang digunakan, yaitu (1) derajat kepercayaan (*credibility*) yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teknik triangulasi yang disajikan oleh peneliti, (2) keteralihan (*transferability*) digunakan bila hasil

penelitian dianggap memenuhi standar transferabilitas, dalam membuat laporan peneliti memberikan uraian secara jelas, rinci dan sistematis dan dapat dipercaya, (3) kebergantungan (*dependability*) suatu penelitian dapat dikatakan *reliable* apabila penelitian dapat direplikasi atau diulangi proses penelitiannya oleh orang lain. Kemudian (4) kepastian (*confirmability*) untuk membuktikan bahwa hasil penelitian telah disepakati banyak orang yang dilakukan dengan melakukan audit keseluruhan penelitian. Uji *dependability* mempunyai kesamaan dengan uji *confirmability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* adalah pengujian hasil penelitian berhubungan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan maka penelitian telah memenuhi standar *confirmability*. Uji keabsahan data dilakukan apabila data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam peningkatan kualitas penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada dengan menggabungkan menggabungkan dari berbagai teknik (Sugiyono, 2012). Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengumpulkan data dan berbagai sumber data dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik. Dalam melakukan pengecekan terhadap berbagai sumber, waktu dan metode dengani triangulasi dalam menguji kredibilitas. Sugiyono (2008 : 274) triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan observasi yang dilakukan langsung dilapangan dan melalui dokumen-dokumen yang diterima oleh peneliti pada saat melakukan penelitian lapangan. Setelah data dibandingkan dan dibuat kesimpulan dari perbandingan tersebut. Triangulasi teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yang sama dengan sumber yang berbeda. Peneliti melakukan

validasi untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan cara pengecekan data melalui beberapa sumber lain yang kredibel dan linier. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari sumber dokumen.

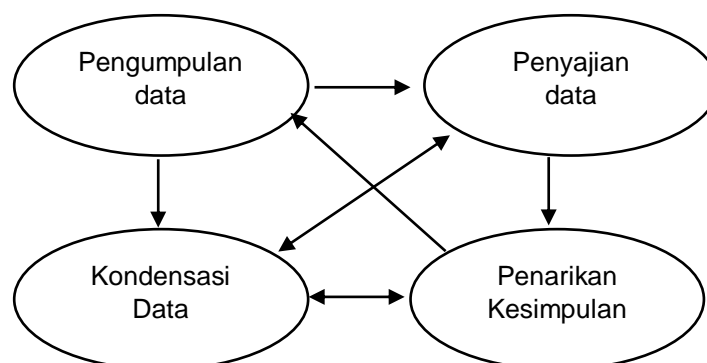
- b. Triangulasi metode, untuk menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan mengenai strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, maka peneliti melakukan validasi dengan cara mengecek data kepada sumber atau informan yang sama namun dengan teknik yang berbeda yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Namun apabila dalam melakukan wawancara dengan hasil yang berbeda maka peneliti melakukan wawancara lagi yang lebih mendalam dengan informan lainnya dan memastikan dari bahwa data yang mana dianggap paling benar (Sugiyono, 2007).
- c. Triangulasi waktu, peneliti melakukan wawancara dengan cara yang formal maupun non formal dengan teknik dan sumber yang berbeda - beda. Penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara pada pagi hari karena diharapkan dengan penelitian di pagi hari maka hasil wawancara dan observasi akan maksimal, valid dan lebih kredibel. Peneliti melakukan pengujian kredibilitas data dengan cara melakukan wawancara dilain waktu dan situasi yang berbeda yaitu dengan melakukan wawancara ulang dalam periode yang berbeda, misalnya rentang waktu 2 bulan atau apabila terdapat perkembangan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari sumber penelitian yang lain. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti memilih hasil wawancara yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi yang lainnya. Pada triangulasi

pengumpulan data, yang dilakukan oleh peneliti mengecek hasil wawancara dengan dokumen pendukung melalui internet maupun dokumen yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini triangulasi waktu tidak digunakan oleh peneliti dengan mempertimbangkan kemampuan waktu yang dimiliki peneliti. Kedua Triangulasi yang peneliti gunakan dapat memberikan keabsahan data pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, dan dibuat sebuah kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu diawali dengan pengumpulan data kemudian melakukan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253). Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber: *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2014)

- a. **Pengumpulan Data (*Data Colection*)**

Merupakan kegiatan awal dari yang paling utama pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka atau gabungan. Dalam melaksanakan penelitian dilapangan peneliti mencatat semua data yang didapat dengan cara mendengar, melihat, merasakan, mengalami dan dicatat ke dalam catatan.
- b. **Kondensasi Data (*Data Condensation*)**

Data diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk dicatat secara teliti dan rinci, namun semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Data yang diperoleh selama penelitian tidak semuanya digunakan oleh peneliti, segera melakukan analisis terhadap data dengan cara kondensasi data, melakukan pengumpulan dan penyisihan data atau informasi yang dianggap kurang relevan dengan cara meringkas, memberi kode, menelusur tema, menulis memo sampai laporan akhir tersusun lengkap.
- c. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Dengan bentuk uraian singkat, skema, *flowchat*, hubungan antar kategori dan seterusnya. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang disusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan konsep-konsep agar mendapat gambaran yang jelas yang dipilih oleh peneliti.
- d. **Penarikan Kesimpulan (*Conclusions*)**

Merupakan kegiatan interpretasi, yakni menemukan makna data yang telah disajikan. Antara penyajian data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada, dalam

pengertian ini analisis kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus menerus. Dalam mereduksi data, verifikasi yang menjadi gambaran dan penarikan kesimpulan secara beruntun sebagai analisis terkait.

Dengan demikian peneliti mensintesakan bahwa analisis merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, obsevasi dan studi pustaka agar mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Data tersebut disederhanakan kemudian disusun dalam kalimat - kalimat yang mudah dimengerti dan dibuatlah sebuah kesimpulan dari penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebelum peneliti menjelaskan analisis dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal yaitu profil Pasukan Pengamanan Presiden, profil Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, data ancaman terhadap presiden dan pengamanan kantor presiden dan keluarganya yang merupakan objek penelitian agar hasil pengamatan dan studi dokumentasi terhadap objek yang diteliti dapat tergambar lebih jelas.

4.1.1 Profil Pasukan Pengamanan Presiden

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) adalah suatu Badan Pelaksana Pusat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang bertugas melaksanakan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Personel Paspampres merupakan prajurit pilihan yang berasal dari Kopassus, Kostrad, Polisi Militer, Denjaka, Marinir dan Kopaskhas. Setiap prajurit Paspampres dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, inteligensi, postur, psikologi, kemampuan menembak, beladiri, renang, mempunyai loyalitas yang tinggi dan kesetiaan terhadap tugas, Pancasila, Sapta Marga serta bangsa dan negara.

Pataka merupakan lambang kesatuan yang sesuai dengan tingkat kesatuan komando yang mengandung arti kehormatan dan pengejawantahan akan keluhuran cita-cita kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang senantiasa harus di junjung tinggi dan dipertahankan. Sebagai alat pengikat batin dan jiwa seia-sekata setiap prajurit Paspampres dalam rangka kebersamaan dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi tantangan tugas. Sesuai dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia Jenderal TNI Feisal Tanjung nomor: SKEP / 157 / III / 1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang pengesahan berlakunya Pataka Paspampres. Pataka Paspampres “Setia Waspada” yang mempunyai arti Prajurit Paspampres adalah Prajurit yang senantiasa setia pada tugasnya, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga serta setia kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dengan kesetiaan yang sangat tinggi, maka setiap prajurit Paspampres pun rela untuk mengorbankan keselamatan jiwanya, demi keberhasilan tugas operasi pengamanan. Seorang prajurit Paspampres dalam menjalankan tugasnya dari segala kemungkinan ancaman dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi.



Gambar 4.1 Pataka Paspampres Setia Waspada

Sumber: Buku Pasukan Pengamanan Presiden (1999)

Sesuai dengan tantangan tugas ke depan semakin berat dan eskalasi ancaman yang semakin kompleks, maka validasi organisasi Paspampres semakin disempurnakan. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden dengan komposisi sebagai berikut:

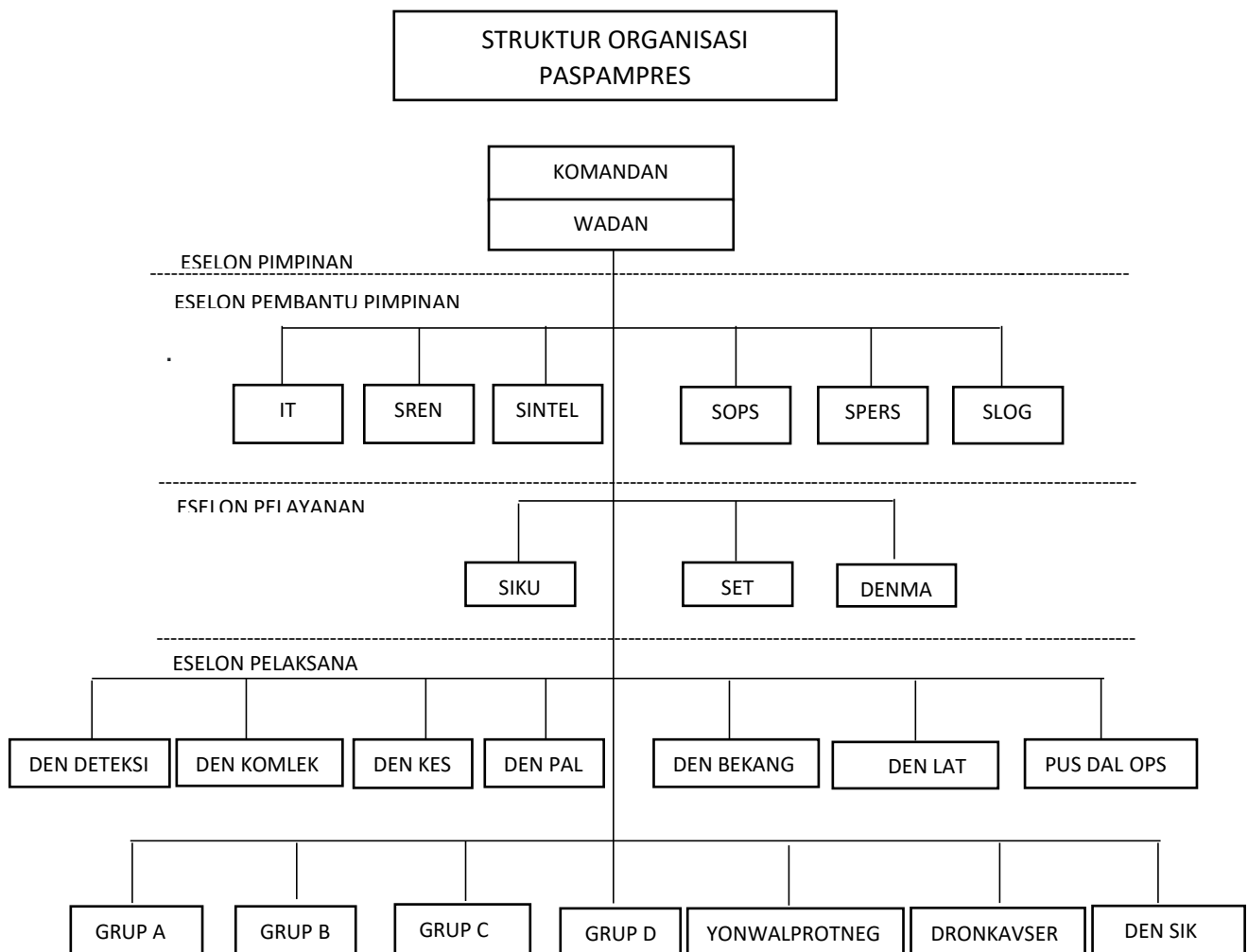
- a. Eselon pimpinan terdiri dari Komandan dan Wakil Komandan
- b. Eselon pembantu pimpinan terdiri dari Inspektorat, Staf Perencanaan, Staf Intelejen, Staf Operasi, Staf Personel dan Staf Logistik.
- c. Eselon pelayanan terdiri dari Pekas, Sekretariat dan Detasemen Markas.
- d. Eselon badan pelaksana terdiri dari Densi, Denkomlek, Denkes, Denpal, Denbekang dan Pusdalops.
- e. Eselon pelaksana terdiri dari:
 - 1) Grup A Paspampres, bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya, dengan kekuatan 4 Detasemen.
 - 2) Grup B Paspampres, bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya, dengan kekuatan 4 Detasemen.
 - 3) Grup C Paspampres, bertugas melaksanakan pengamanan VVIP terhadap Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, dengan kekuatan 3 Detasemen. Detasemen Latihan langsung dibawah Komandan Paspampres bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres.
 - 4) Grup D Paspampres, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, dengan kekuatan 3 Detasemen.
 - 5) Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan, merupakan satuan Polisi Militer yang bertugas melaksanakan tugas pengamanan Instalasi Kepresidenan, melaksanakan penjagaan kehormatan di Istana Negara, melaksanakan pertahanan daerah dalam rangka pengamanan fisik secara

langsung terhadap presiden dan keluarganya serta tamu negara.

- 6) Skadron Kavaleri Panser bertugas melaksanakan pengamanan secara fisik jarak dekat terhadap Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu-tamu resmi negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan dengan menggunakan ranpur sebagai alat utama dan sistem persenjataan.
- 7) Detasemen Musik Militer bertugas menyelenggarakan iringan musik militer dalam upacara Protokoler Kenegaraan.

Mantan Presiden dan Mantan Presiden merupakan human capital bangsa Indonesia yang pernah membuat, mengetahui, serta memegang rahasia negara. Oleh karenanya setelah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir, keberadaan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden perlu juga mendapatkan pengamanan oleh negara. Pengamanan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden yang ada belum terlembaga dalam suatu satuan sehingga eksistensinya tidak dapat terkontrol dan terkoordinasi dengan baik. Mereka bekerja secara perorangan, tanpa memiliki Komando dan pengendalian yang jelas serta tidak dibiayai oleh negara. Hal tersebut secara taktis dan administrasi menyalahi prosedur. Sesuai dengan PP 59 Tahun 2013, menyebutkan bahwa pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Ide pembentukan grup D Paspampres sebenarnya sudah lama, namun baru disah oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada tahun 2014, sehingga organisasinya jelas dan lebih mudah pengendalian oleh Komandan Paspampres. Pembentukan grup D Paspampres bertujuan untuk meningkatkan standarisasi pengamanan terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Paspampres

Sumber: Buku Pasukan Pengamanan Presiden (2014)

Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap VVIP mempunyai Visi, Misi dan Fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Visi Prajurit Paspampres adalah prajurit yang setia, tanggung jawab, disiplin, profesional, solid, tangguh dan berwawasan kebangsaan.
- b. Misi prajurit Paspampres adalah sebagai berikut:
 - 1) Terjaminnya keselamatan Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk tamu negara setingkat kepala negara/pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia dengan penuh kesetiaan.
 - 2) Mewujudkan postur prajurit yang berdisiplin, berdedikasi, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasan.
 - 3) Mewujudkan prajurit yang memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan tugas.
 - 4) Mewujudkan prajurit yang memiliki jiwa korsa dan rasa kebersamaan yang tinggi dalam berbagai kondisi penugasan.
 - 5) Mewujudkan prajurit yang profesional di bidangnya dan mengikuti perkembangan iptek.
 - 6) Mewujudkan prajurit yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mengutamakan kepentingan tugas negara di atas kepentingan pribadi.
- c. Paspampres melakukan Fungsi Utama sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengamanan pribadi terhadap VVIP meliputi segala usaha untuk menjamin keselamatan VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung.
 - 2) Melakukan pengamanan instalasi yang meliputi pengamanan personel, materi, dan seluruh fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP.

- 3) Melakukan pengamanan penyelamatan VVIP yang terencana, demi melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman yang kemungkinan terjadi setiap saat.
- 4) Melakukan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan VVIP dari segala bentuk ancaman.
- 5) Melakukan pengamanan terhadap makanan dan medis VVIP, guna melindungi VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan dan benda-benda lainnya.
- 6) Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajar kehormatan, pasukan upacara dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan.

d. Sedangkan Fungsi Organik Militer adalah sebagai berikut:

- 1) Intelijen. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen yang meliputi penyelidikan dan pengamanan untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan operasi maupun pengamanan badan, komando, satuan, materiil, pemberitaan, operasi dan kegiatan.
- 2) Operasi dan latihan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyiapan dan penyusunan satuan tugas dalam menyelenggarakan operasi serta pemeliharaan dan peningkatan mutu ketrampilan profesional, baik perorangan maupun satuan.
- 3) Personel. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang personel yang meliputi pembinaan kekuatan, pembinaan kejiwaan prajurit, perawatan, hukum disiplin pendidikan, penggunaan, tata tertib dan pemisahan serta penyaluran.
- 4) Logistik. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyediaan sarana dan fasilitas Matfasjasa,

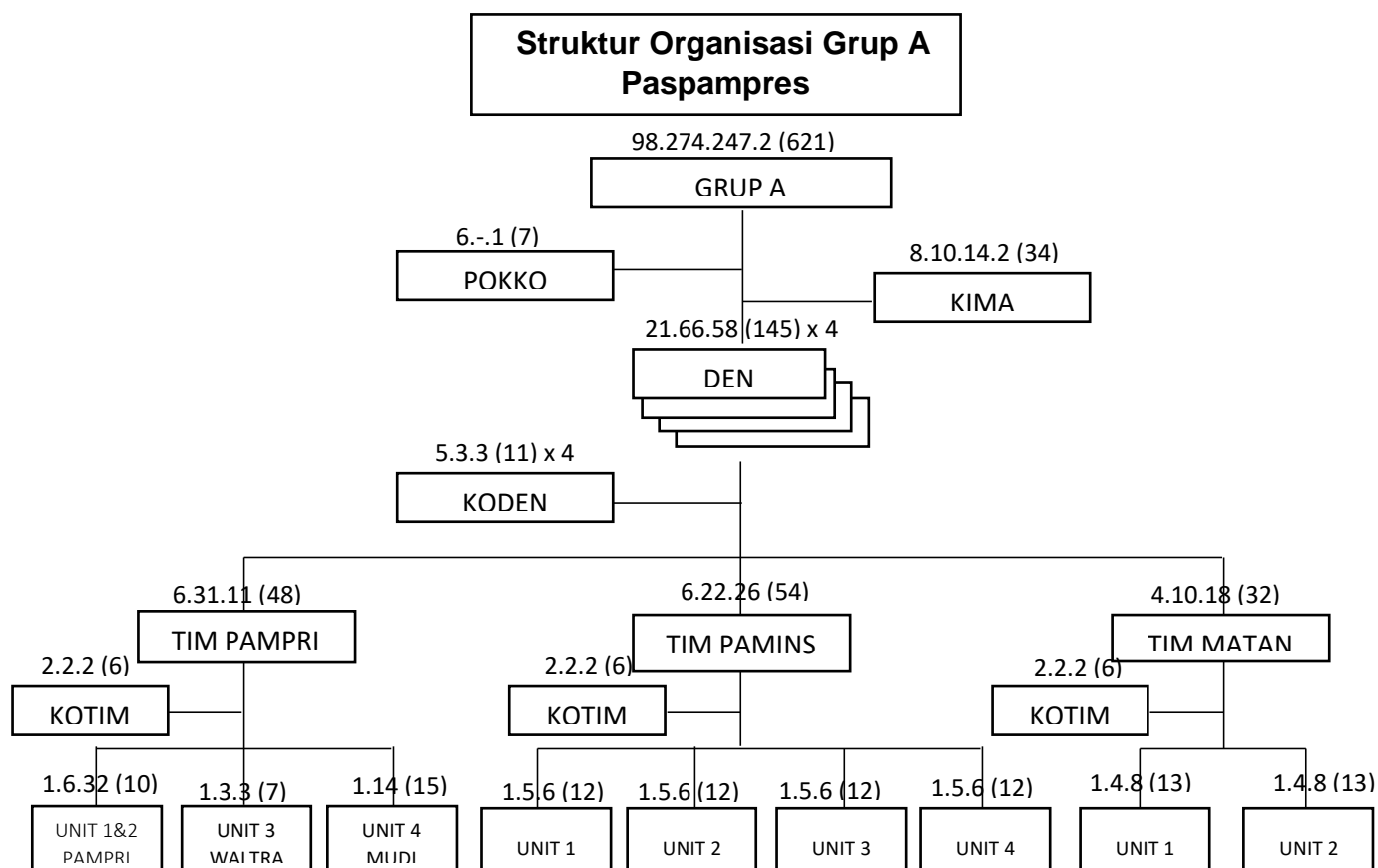
pemeliharaan personel dan peralatan, Bekang, pemberian jasa bagi perorangan, badan, komando dan satuan.

4.1.2 Profil Grup A Pasukan Pengamanan Presiden

Grup A Paspampres merupakan satuan jajaran di bawah Pasukan Pengamanan Presiden. Tugas grup A Paspampres melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya setiap saat berada. Kekuatan grup A terdiri dari 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas. Setiap Detasemen terdiri dari Tim Pengamanan Pribadi (Pampri), Tim Pengamanan Instalasi (Pamins) dan Tim Pengamanan Penyelamatan (Pam Matan). Tugas dan fungsi antara Tim satu dengan Tim yang lain berbeda, diantaranya:

- a. Pengamanan Pribadi adalah pelaksanaan kegiatannya pengamanan fisik langsung secara melekat dan terus menerus dari ancaman yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa atau badan VVIP.
- b. Pengamanan Instalasi (Pamins) adalah terselenggaranya pelaksanaan pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP.
- c. Pengamanan Penyelamatan (Matan) Adalah suatu bentuk operasi yang dilakukan dalam rangka menghadapi kontinjensi darurat untuk menyelamatkan VVIP dari kemungkinan bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang dapat membahayakan keselamatan VVIP.

Sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Grup A Pasukan Pengamanan Presiden adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Grup A Paspampres

Sumber: Buku Pasukan Pengamanan Presiden (2014)

4.1.3 Data Ancaman Terhadap Presiden

Ancaman terhadap presiden merupakan ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Beberapa contoh kejadian atau ancaman terhadap presiden baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya pembunuhan terhadap presiden yang dilakukan oleh para teroris dengan menggunakan senjata tajam, senjata pistol maupun dengan menggunakan sniper. Sedangkan ancaman pembunuhan terhadap presiden yang menggunakan media sosial merupakan tindakan melawan hukum, mengancam keamanan negara dan melanggar UU Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), sehingga dapat dipidanakan. Ada beberapa contoh ancaman dan kejadian pembunuhan terhadap presiden, diantaranya:

Tabel 4.2 Data Ancaman

Bentuk Serangan	Jenis Ancaman	Presiden Luar Negeri	Presiden RI
Senjata Api	Presiden Amerika Serikat ke 35 John F Kennedy dibunuh ketika sedang melakukan iring-iringan di mobil kepresidenan di Dallas, Texas pada 22 November 1963. JFK menderita luka tembak pada bagian kepala dan leher, kemudian meninggal setelah dibawa ke Rumah Sakit Parkland. (Kompas.com – 01 Februari 2019)	John F Kennedy	
	Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin gerakan nasionalis India melawan pemerintahan Inggris yang memprotes secara masal pajak garam, namun pada tanggal 30 Januari 1948 Mahatma Gandhi ditembak oleh Nathuram Godse (seorang ekstremis) yang kesal terhadap kebijakan Gandhi, secara berlutut di hadapannya dan mengeluarkan pistol semi otomatis (Kompas.com – 01 Februari 2019)	Mahatma Gandhi	
	Martin Luther King Jr tewas tertembak oleh sniper di balkon kamarnya di lantai dua Motel Lorraine di Memphis, Tennessee AS pada 4 April 1968, dia terkenal saat pemimpin Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan yang menyuarakan perlawanan tanpa kekerasan oleh masyarakat kulit hitam Amerika untuk mendapatkan hak-hak sipil mereka (Kompas.com – 01 Februari 2019)	Martin Luther King Jr	
	Archduke Franz Ferdinand merupakan pangeran dari Dinasti Habsburg sekaligus pewaris takhta Kekaisaran Austria-Hongaria. Dia memulai karier militernya saat berusia 12 tahun dan secara cepat dipromosikan hingga ke pangkat Mayor Jenderal pada umur 31 tahun. Dalam perjalanannya, Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh Gavrilo Princip menggunakan pistol jenis FN Model 1910 pada 28 Juni 1914 berkunjung ke Sarajevo, ibu kota Provinsi Bosnia-Herzegovina. (Kompas.com – 01 Februari 2019)	Archduke Franz Ferdinand	
	Peristiwa penembakan Idul Adha 1962, pada saat presiden Soekarno sedang melakukan sholat Id di lapangan dekat Istana negara ditembak jarak dekat oleh kelompok DI/TII Kartosoewirjo diantaranya Sanusi, Harun,		Soekarno

	Djaja Permana bin Embut, Tapbi, Abidin, Cholil, Dachja bin Candra, dan Nurdin bin Satebi (<i>Kesaksian tentang Bung Karno, 1945-1967</i>)		
Senjat Tajam	Presiden Brasil Bolsonaro sempat diserang saat dalam suasana pemilihan presiden. Ia ditikam seorang pria yang berlari ke arahnya saat ia tengah diarak oleh kerumunan pendukungnya saat berkampanye, dan sempat kritis. Insiden itu terjadi hanya satu bulan sebelum pemilihan.	Bolsonaro	
Granat	Granat Cikini 1957, pada perayaan Perguruan Cikini ke 15, presiden Soekarno menuju kendaraan kepresidenan, diseberang jalan terjadi ledakan sembilan granat, yang dilakukan oleh Jusuf Ismail, Saadon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, dan Moh. Tasin bin Abubakar. (<i>30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 2</i>)		Soekarno
	Peristiwa granat Makasar 1962, Presiden Soekarno rencana akan melakukan pidato kenegaraan di hadapan masyarakat <i>Kota Daeng</i> di GOR Mattoanging Makasar, namun lapangan Karebosi, waktu iring-iringan dilempari granat oleh Serma Marcus Latuperissa dan Ida Bagus Surya Tenaya (<i>Sewindu Dekat Bung Karno, 1988</i>)		Soekarno
	Granat meledak di Cimanggis Depok pada 1962, pada saat rombongan presiden Soekarno sedang melaksanakan perjalanan sebuah granat meledak di dekat iring-iringan kepresidenan yang melewati daerah Cimanggis, Depok (<i>Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (2007)</i> karya Cindy Adams)		Soekarno
Mortir	Mortir Kahar Muzakar 1960, pada saat rombongan Presiden Soekarno berkunjung ke Sulawesi, dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai sebuah peluru mortir ditembakkan ke arah rombongan, namun meleset. Ditengarai dilakukan oleh kelompok Kahar Muzakar.		Soekarno
Bom	Peristiwa Maukar 1960, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar dengan jet tempur MiG-17 buatan Uni Soviet melakukan pengeboman ke Kompleks BPM Tanjung Periok, Istana Merdeka kemudian Istana Bogor, namun presiden Soekarno sedang menghadiri sidang Dewan Nasional, hanya 20 meter dari Istana Negara (<i>Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua, 1988</i> karya Ahmad Haris Nasution)		Soekarno
	Dian Yuli Novita merupakan perempuan pertama yang berencana meledakan bom panci Istana Kepresidenan Merdeka Utara,		Joko Widodo

	pada 15 Desember 2016. Mereka terpapar paham ISIS dan telah di baiat oleh suaminya Nur Salihin dan perakit bom panci tersebut (Wartawan BBC Indonesia, 23 Agustus 2017)		
Serangan Instalasi Kepresidenan	Aksi Muhamad Khalifah alias Ivon Rekso masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 18 Desember 2017 dapat digagalkan oleh anggota Paspampres. Menurut keterangan polisi, Khalifah membawa gawai yang di dalamnya berisi berbagai bentuk ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (merdeka.com 19 Desember 2017)		Joko Widodo
Penghadangan	Pencegatan Jembatan Rajamandala 1957, pada saat rombongan presiden Soekarno sedang mendampingi lawatan kenegaraan Ketua Dewan Presidium Tertinggi Uni Soviet, Kliment Voroshilov bertolak menuju Jakarta dari Bandung rencana penghadangan oleh kelompok DI/TII pimpinan S.M. Kartosoewirjo di jembatan Rajamandala, namun berhasil digagalkan oleh Angkatan Udara republik setelah mendapat laporan dari seorang letnan CPM yang melintasi jembatan itu satu hari sebelumnya. (<i>Suka Duka Fatmawati Soekarno</i> , 2008 karya Kadjat Adra'i)		Soekarno
Demonstrasi	Teror sekelompok pemuda yang mengatasnamakan anggota Republik Maluku Selatan menduduki kedutaan besar Indonesia di Den Haag Belanda sehari sebelum kedatangan presiden Soeharto pada tanggal 31 Agustus 1970. Mereka anak muda yang sepaham dengan gerakan yang dianggap separatis, termasuk orang-orang keturunan Maluku yang tinggal di Belanda selain sisa-sisa pendukung Dr. Soumokil yang berhasil kabur.(tirto.id 3 September 1970)		Soeharto
Teror	Presiden SBY mendapat ancaman dari kelompok terorisme dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Calon Tamtama Rindam III Siliwangi di Ciwidey, Jawa Barat, pada 7 Agustus 2010. "Saya mendapat laporan tadi malam dari jajaran pengamanan, ada diantara anak bangsa yang punya niat tidak baik yang sekarang ada di sekitar Ciwidey," namun berhasil diatasi oleh aparat keamanan dan jajaran pengamanan presiden (merdeka.com Rabu, 29 Mei 2019)		Susilo Bambang Yudhoyono

Tarian Cakalele	Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-14 di Lapangan Merdeka Ambon, yang dihadiri oleh presiden SBY, terjadi insiden tari cakalele (tarian perang) yang dilakukan oleh 40 pendukung Republik Maluku Selatan dengan menari bertelanjang dada, membawa parang dan tameng serta membenteng bendera RMS (detikNews, 29 Jun 2007)		Susilo Bambang Yudhoyono
Ancaman fisik	Pada saat presiden SBY selesai membuka ASEAN Fair di kompleks Nusa Dua, Bali, 25 Oktober 2011, ada satu orang (I Nyoman Minta) petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bali <i>Tourism Development Corporation</i> dengan santai melenggang melintas di depan podium SBY yang jaraknya sekitar 5 meter. (Bisnis.com 26 Oktober 2011)		Susilo Bambang Yudhoyono
Media Sosial	Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada September 2018, pelaku menulis sebuah surat: "Saya Gary Gravelle... sebagai seorang prajurit yang setia dari AKA datang untuk membunuh Donald Trump," Gravelle diduga mengirim email ancaman dan membuat panggilan mengatakan dia akan meledakkan bom di beberapa lokasi dan membuat ancaman kepada presiden dan menyampaikan informasi palsu tentang bahan peledak (<i>New York Post</i> , 13 Mei 2019)	Donald Trump	
	Prabowo siapkan 100 sniper, Sampaikan pada Gus Dur, kalau tetap berkoar-koar seperti itu, saya punya 100 sniper (penembak jitu) yang siap membuang Gus Dur. Kalimat tersebut disampaikan Prabowo saat menjabat Komandan Jenderal Kopassus. Namun Gus Dur menanggapi dengan santai, kalau benar Prabowo bilang begitu, tolong tanyakan padanya, Pak Prabowo agamanya apa? Kalau dia menjawab Islam, tolong tanyakan nyawa itu milik siapa? (<i>Gusdur Presiden Republik Akhirat</i> , karya Muhammad Zakki, 2010)		KH Abdurrahman Wahid
	Ancaman lewat e-mail menggunakan Yahoo bunyinya antara lain, "Katakan pada seluruh rakyat Indonesia, KAMI akan membunuh Gus Dur dalam waktu dekat, ingat, KAMI AKAN MEMBUNUH GUSDUR DALAM WAKTU DEKAT" teror tersebut ditengarai terkait dengan sikap Gus Dur yang senantiasa konsisten berpihak pada pluralitas (detikNews Kamis, 05 Jun 2008 10:34 WIB)		KH Abdurrahman Wahid
	Ancaman di buru pasukan liar sampai mau diracun, BJ Habibie menjadi presiden setelah jatuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru, Habibie langsung hadir dengan pendekatan revolusioner demi demokrasi. Ia membuka keran kebebasan pers, masih terjadi		BJ Habibie

	pergantian pimpinan TNI, ada pasukan liar yang memburu presiden ke 3 sampai mau dibunuh diam-diam dengan cara diracun, cerita dari Mayjen Purn TNI Tubagus Hasanuddin (GridHot.ID-None 13 September 2019)		
	HS dalam video melontarkan ancaman untuk memenggal kepala Jokowi saat melakukan demonstrasi di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, pada 10 Mei 2019. HS mengaku melontarkan ancaman tersebut karena emosi dan tak ada niat untuk melakukan pembunuhan (Kompas.com – 14 Juni 2019)		Joko Widodo

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

Dari beberapa data ancaman dan pembunuhan terhadap presiden tersebut diatas dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap presiden, tidak boleh terdapat celah sedikitpun ancaman sehingga dapat menimbulkan kerawanan terhadap presiden.

4.1.4 Pengamanan Kantor Presiden dan Keluarganya

Sejak pengakuan kedaulatan Pemerintahan Republik Indonesia berpusat di Jakarta, Istana Negara digunakan untuk pemerintahan dan upacara serta acara resmi kenegaraan. Pemerintah Republik Indonesia memiliki enam Istana Kepresidenan yang letaknya terpisah di lima wilayah yang berbeda, yaitu dua di Jakarta dan empat lainnya berada di Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring. Keempat Istana ini sering dikenal dengan sebutan Istana Kepresidenan Daerah. Istana Kepresidenan Jakarta berfungsi sebagai kediaman resmi dan pusat kegiatan pemerintahan negara, sedangkan keempat istana lainnya digunakan sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden.

Istana Negara merupakan istana yang paling diingat khalayak diantara enam Istana Kepresidenan. Istana Negara adalah tempat kediaman resmi Presiden, khususnya Presiden pertama Insinyur Soekarno beserta keluarga, dan tempat berlangsungnya peristiwa-peristiwa kenegaraan. Istana Negara digunakan untuk acara penting seperti kunjungan Tamu Negara, pada tangga

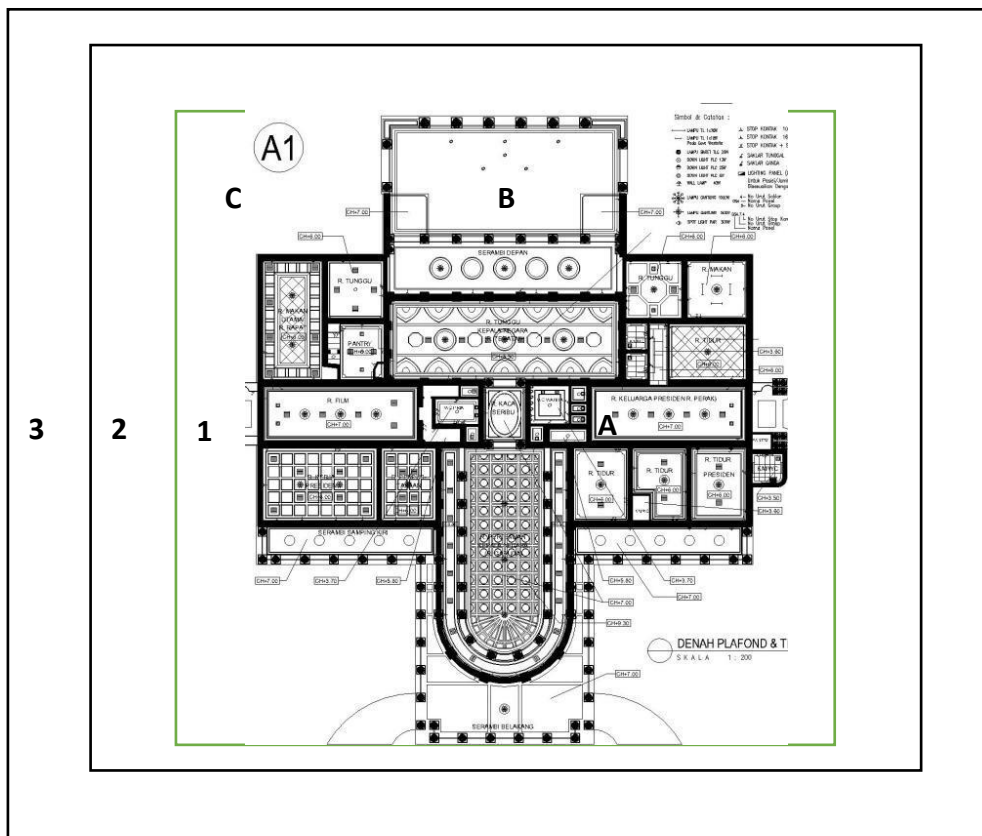
depan Istana Negara digunakan menerima tamu negara dan acara-acara penting lainnya serta untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa penting. Di serambi depan ini Presiden Republik Indonesia menyambut para Tamu Negara yang merupakan kepala pemerintahan dari berbagai negara berkunjung ke Indonesia, yang sebelumnya diterima dengan Upacara Kenegaraan di halaman Istana Merdeka. Disamping itu, pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di serambi depan ini Presiden Republik Indonesia menyerahkan Bendera Pusaka dan duplikatnya kepada Paskibraka untuk dikibarkan di tiang bendera di halaman Istana Negara.

Grup A Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya dibagi dalam tiga tempat yakni, Istana Negara Jakarta, Istana Bogor dan Kediaman di Solo. Dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan menggunakan ketentuan pola ring, dimana Paspampres bertanggungjawab kepada Panglima TNI yang diberi pendelegasian tugas dan tanggungjawab serta wewenang komando pengendalian di lapangan. Penerapan pola ring pada pembagian sector gelar operasi pengamanan VVIP bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan didalamnya. Pengamanan dilakukan dengan membagi menjadi 3 (tiga) sektor (ring) sebagai berikut:

- a. 1 merupakan Ring I adalah suatu tempat atau daerah pengamanan yang penentuan batas-batas wilayah pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Paspampres, dimana unsur-unsur pengamanan Ring I dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan VVIP.
- b. 2 merupakan Ring II adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring I merupakan jarak keamanan dalam pola pengamanan VVIP, dihadapkan kepada ancaman tembakan efektif senjata lintas datar. Ring II dan III. Unsur TNI dan unsur terkait lainnya.
- c. 3 merupakan Ring III adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring II merupakan jarak aman dalam pola

pengaman VVIP, di luar jarak capai senjata penembak runduk. Kewenangan penentuan Ring II dan Ring III berada pada Pangkogabpad/Pangkogasgabpad TNI.

Adapun gambar sketsa Istana Negara yang berada di jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.



Gambar 4.3 Sketsa Istana Negara Jakarta

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

Untuk mempermudah di dalam pengendalian dan pengamanan pada Ring-I pada operasi pengamanan presiden dan keluarganya, Paspampres membagi dengan menggunakan pola zona A, zona B dan zona C. Adapun pembagian zona adalah sebagai berikut:

- a. Zona A merupakan Unsur pengamanan pribadi Paspampres yang melekat langsung setiap saat dengan VVIP. Termasuk

- anggota Detasemen Kesehatan yang bergabung dalam mein grup.
- b. Zona B merupakan Unsur pengamanan instalasi Paspampres dan personel perkuatan lain, yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing diantaranya Tim Pamins, Unit Pamins, Unit Detasemen Komunikasi Elektronika dan Unit Detasemen Peralatan.
 - c. Zona C merupakan Unsur Detasemen Deteksi, Pengawal Istana (khusus Istana Kepresidenan), Lalin dan perkuatan unsur Pengamanan Instalasi lain, yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda -beda diantaranya Unit Deteksi, Unit,Lalin, Unit Walis dan Unit Kavser.

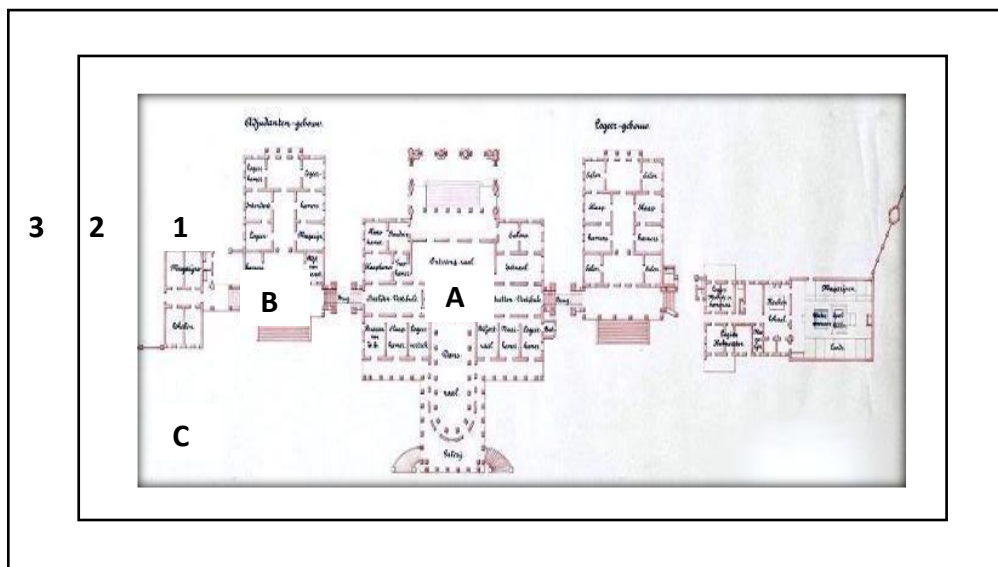
Paspampres dalam melaksanakan pengamanan terhadap kantor dan kediaman presiden di Istana Negara Jakarta yang dilaksanakan oleh Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg). Prajurit Yonwalprotneg adalah prajurit yang mempunyai kemampuan khusus yang spesifik karena berkaitan dengan tugas-tugas protokoler kenegaraan dan merupakan Prajurit Polisi Militer sehingga pada perekrutannya langsung dari satuan-satuan Polisi Militer Angkatan Darat ataupun dari Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat. Serah terima penjagaan Istana Negara yang dikenal dengan parade senja, merupakan tradisi Paspampres dilakukan satu bulan sekali di depan Istana Kepresidenan. Sebelum acara parade senja dimulai menampilkan beberapa atraksi seperti marching band dan kesenian daerah, antara lain dari lenong Betawi, rapak kendang dan Reog Ponorogo.

Selain melaksanakan penjagaan di Istana Kepresidenan Jakarta, Yonwalprotneg juga melaksanakan penjagaan di Istana Bogor. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Istana Bogor digunakan untuk menerima tamu dari negara sahabat dan juga digunakan sebagai tempat kediaman presiden dan keluarganya. Istana Bogor memiliki karisma tersendiri dibanding dengan enam istana presiden RI lainnya, dikarenakan mempunyai aspek

historis, kebudayaan dan hewan-hewan rusanya. Mulai dari dahulu hingga sekarang rusa-rusa yang di datangkan dari negara Nepal dapat berkembang biak sehingga jumlah terus bertambah dan masih terjaga serta terpelihara dengan baik.

Anggota grup A Paspampres juga melaksanakan penjagaan di Istana Bogor yang digunakan sebagai kediaman presiden dan keluarganya. Anggota pampri yang bergabung dalam mein grup selalu melekat dan mengikuti pergerakan presiden. Bila presiden berkantor di Istana kepresidenan Jakarta maka mein grup dan pengawal lainnya ikut bergeser, kecuali pampri dan pamins yang statis.

Adapun sketsa gambar Istana Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Sketsa Istana Bogor

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

Grup A Paspampres juga melaksanakan penjagaan di kediaman presiden Joko Widodo di Solo yang terletak di Jalan Kutai Utara, Sumber Solo, Jawa Tengah. Dalam melaksanakan pergantian penjagaan kediaman di Solo dilaksanakan serah terima tugas setiap satu bulan sekali. Setiap perkembangan situasi dan kondisi kediaman di Solo dilaporkan kepada

Komandan Detasemen (Danden) yang sedang naik dinas di Istana Negara. Danden bertanggungjawab kepada Komandan grup A Paspampres atas pelaksanaan tugas kediaman di Solo. Kediaman presiden di Solo merupakan instalasi kepresidenan yang harus mendapat penjagaan dari gangguan keamanan. Namun tidak seperti penjagaan di Istana, hanya beberapa anggota dari unsur pampri, pamins dan mudi serta pengamanan dari aparat territorial setempat.

4.1.5 Landasan Hukum

Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dilandasi beberapa hukum diantaranya:

- a. Undang- Undang Dasar 1945, pasal 5 – 15.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta

keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

- g. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden.
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

4.2 Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara terhadap para informan penelitian yang telah dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball*, baik di lingkungan Paspampres, Koopsus TNI, Bais TNI maupun Kemhan diperoleh data-data yang dianalisis seperti diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

4.2.1 Grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

Ancaman merupakan segala usaha perbuatan atau tindakan yang dinilai dapat membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Instalasi kepresidean merupakan obyek vital penting yang harus mendapat penjagaa dari aparat pengamanan. Ancaman terhadap instalasi kepresidenan sudah beberapa kali terjadi baik di istana Negara Jakarta maupun di istana Bogor. Pada pemerintahan presiden Joko Widodo, ancaman di istana Negara Jakarta sudah terjadi beberapa kali, hal senada disampaikan oleh Wakil Asintel Danpaspampres Letnan Kolonel Mar Ahmad Effendi (komunikasi personal, tanggal 20 Desember 2020), mengatakan:

“... Di era pemerintahan presiden Joko Widodo terjadi beberapa kali ancaman terhadap Istana Merdeka Jakarta, ada orang tanpa busana masuk ke dalam area istana Merdeka pada malam hari. Ada juga seorang perempuan bernama Dian Yulia Novita dari Bekasi membawa sebuah bom panci rakitan, yang ingin diledakan bersama dirinya (bunuh diri) di istana kepresidenan Jakarta...”

Penyataan *Institute for Policy Analysis and Conflict* (IPAC) menyebut bahwa Munfiatu (istri Noordin Muhammad Top) merupakan perempuan pertama Indonesia yang terlibat kasus aksi terorisme dan sebagai otak sejumlah teror bom di Jakarta pada tahun 2003 di antaranya Kedutaa Australia dan Hotel Marriot. Sedangkan Dian Yulia Novita merupakan wanita pertama yang ingin meledakan dirinya (bunuh diri) dengan bom panci di istana Merdeka Jakarta. Dian akan melaksanakan pemufakatan jahat terkait terorisme dan secara sengaja menakuti-nakuti warga masyarakat dengan membuat suasana teror, yang akan merusak objek vital (istana Negara) dengan menimbulkan korban jiwa secara banyak (BBC Indonesia, 2017). Corneles dalam jurnalnya menyatakan timbulnya terorisme diakibatkan dengan rasa ketidakadilan yang selama ini dilihat di tengah masyarakat secara langsung sehingga timbul kemarahan dan rasa benci terhadap pemerintahan. Dengan kata lain, seseorang yang tertuntun menjadi terorisme di sebabkan keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil bila dilihat dari analisis sosial-politik (Corneles, 2018).

Ancaman terhadap instalasi kepresidenan tersebut berupa teror atau orang yang sengaja masuk ke dalam area istana. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi intel grup A Paspampres Mayor Kav Wicksana HN (komunikasi personal, tanggal 5 Desember 2020), mengatakan bahwa:

“...Sudah terjadi beberapa kali ancaman terhadap instalasi kepresidenan di Istana Negara Jakarta. Ada orang yang dengan sengaja masuk ke dalam area Istana dengan cara melompat pagar di malam hari, orang tersebut ditangkap oleh anggota yang sedang jaga di istana, namun setelah di interograsi orang tersebut stress dan diserahkan aparat kepolisian setempat....”

Dalam mengantisipasi ancaman teror, harus meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antar instansi di jajaran intelijen, hal senada disampaikan Kepala Bidang Pertahanan Militer Direktorat Kebijakan Strategis, Strahan Kemhan Kolonel Inf Djoni Abdi, mengatakan bahwa memprediksi target ancaman teror terhadap keluarga Presiden adalah dengan meningkatkan kerja sama intelijen, baik unit intelijen Paspampres dengan intelijen aparat pengamanan wilayah. Koordinasi dan kerjasama antar intelijen yang sangat dibutuhkan dalam pengamanan presiden dimana dibutuhkan pencegahan dini, untuk mengantisipasi ancaman yang muncul.

Fortunata dalam jurnalnya menyatakan kendala dalam menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan operasi pengamanan adalah sulitnya membatasi informasi tersebut untuk hanya dan bagi kepentingan kalangan terbatas saja karena operasi pengamanan VVIP melibatkan banyak unsur dari beberapa satuan dan instansi (Fortunata 2018).

Armaidly dalam jurnalnya menyatakan pada kegiatan Kominda membutuhkan suatu koordinasi secara kontinyu terhadap sekelompok orang-orang yang bertanggungjawab untuk kesempurnaan suatu proses. Kominda melakukan kegiatan dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) direncanakan dalam agenda suatu rapat koordinasi bulanan dengan membahas isu-isu strategis, termasuk pembahasan ancaman terorisme. Komunikasi Kominda kepada unsur intelijen daerah dengan mengundang rapat rutin setiap bulan, dan anggota Kominda menyampaikan informasi yang penting kepada Kodim, Polres, Den Intel Kodam dan Binda (Armaidly, 2013).

Penerapan pola gelar operasi pengamanan VVIP dengan menggunakan pola ring dimana pada dasarnya untuk pembagian sektor pengamanan sedemikian rupa sehingga mudah untuk bergerak dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan didalamnya. Pembagian sektor dengan pola dibagi menjadi 3 sektor yang dinamakan Ring. Untuk pengamanan instalasi kepresidenan di Istana Negara Jakarta dan Istana Bogor dilaksanakan secara berlapis. Ring I merupakan tugas dan tanggungjawab Paspampres berada di dalam pagar

istana, sedangkan untuk Ring II dan III berada diluar pagar Istana adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Pangdam Jaya selaku Pangkogasopspad TNI di wilayahnya.

Prajurit Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan di Istana harus bersikap sopan, santun namun tegas terhadap tamu yang berkunjung ke istana. Semua orang dan barang yang akan masuk dalam lingkungan istana harus melalui pintu secdoor dan pemeriksaan dahulu oleh anggota Detasemen Deteksi dengan menggunakan metal detector. Termasuk kendaraan pejabat istana maupun tamu yang berkunjung ke istana, juga diperiksa. Selain anggota deteksi dalam periksaan juga dibantu oleh anggota Detasemen Peralatan yang bertugas memeriksa tamu apabila membawa senjata, untuk dititipkan di posko. Ada juga anggota Yonwalprotneg yang bertugas mengatur lalu lintas dan parkir (Hanri Wira, 2018).

Grup A Paspampres merupakan unsur pelaksana dalam Operasi Pengamanan VVIP yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya. Grup A Paspampres terdiri 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas. Antara Detasemen satu dengan Detasemen yang lain mempunyai kekuatan yang sama yakni 1 Tim Pengamanan Pribadi (Pampri), 1 Tim Pengamanan Instalasi (Pamins) dan 1 Tim Pengamanan Penyelamatan (Matan). Dalam melaksanakan tugas, untuk mempermudah tugas dan tanggungjawab dalam Ring I dibagi dalam 3 zona, yakni zona A, B dan C. Zona A merupakan daerah pengamanan yang paling dekat dengan VVIP. Zona B merupakan daerah yang mengelilingi zona A.

Perimeter atau garis batas paling luar yang melingkar pada zona B adalah zona C. Pada Ring I pembagian zona atau perimeter tergantung pada keberadaan VVIP, bentuk bangunan/instalasi sehingga dapat diprediksi berapa anggota yang digelar untuk pengamanan dan tingkat ancaman yang diperkirakan terjadi. Sebagai contoh bila VVIP berada di dalam suatu bangunan, maka ruangan/bangunan terdalam yang digunakan VVIP ditetapkan sebagai zona A, sedangkan ruangan atau bangunan sebagai perimeter adalah

zona B. Kemudian daerah Ring-I di luar bangunan adalah zona C (misalnya dari batas terluar bangunan sampai dengan pagar).

Dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya grup A Paspampres tidak berdiri sendiri, namun mendapat perkuatan dari detasemen lain. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Wadan grup A Paspampres Letnan Kolonel Mar Tri Maryanto (komunikasi personal, 10 Desember 2020) mengatakan grup A Paspampres merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya. Dalam melaksanakan tugas pengamanan dibantu dari beberapa detasemen terkait yang ada di Paspampres.

Hal senada diperkuat oleh Komandan Detasemen 1 grup A Paspampres Letnan Kolonel Inf Frangky Susanto, (komunikasi personal, 10 Desember 2020) mengatakan bahwa:

“.....Dalam melaksanakan tugas pengamanan grup A Paspampres dibantu beberapa unsur dari detasemen terkait, diantaranya Detasemen Kesehatan, Detasemen Deteksi, Detasemen Komunikasi dan Elektronika, Detasemen Peralatan, Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan dan Skadron Kavaleri Panser, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan bertanggungjawab kepada Komandan Komplek Istana...”

Detasemen yang mendukung pengamanan di grup A Paspampres mempunyai tugas dan fungsi masing - masing. Detasemen Kesehatan bertugas melaksanakan pemeriksaan makanan dan minuman yang akan disajikan kepada presiden, wakil presiden dan tamu negara. Baik makanan yang siap untuk disajikan mau bahan makanan yang akan dimasak untuk diuji secara kimiawi maupun sampai uji organoleptik. Apabila dalam suatu perjalanan tiba - tiba presiden melihat makanan kas daerah dan ingin menikmati, maka anggota detasemen kesehatan yang tergabung dalam grup, segera mengambil sampel untuk diuji organoleptik dengan minta makanan yang akan disajikan untuk disantap ditempat guna mengetahui ada kandungan bahan yang berbahaya atau racun. Detasemen Deteksi bertugas melaksanakan sterilisasi dan pengecekan yang ingin masuk ke tempat acara atau wilayah ring

I yang di hadiri oleh VVIP terhadap orang-orang, barang, dan kendaraan. Anggota Deteksi juga melakukan pengecekan lebih difokuskan terhadap ancaman berbentuk zat kimia, biologi, radioaktif, nuklir, bahan peledak atau dikenal dengan istilah *chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive* (CBRNE). Dalam melaksanakan stirilisasi juga menggunakan alat robot dengan penggerak rantai seperti tank yang berguna untuk penjinakan bahan peledak dalam rangka upaya evakuasi bahan peledak yang ada di lokasi acara ke tempat yang aman (Okto, 2018).

Detasemen Komunikasi dan Elektronika bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi, elektronika dan perang elektronika (pernika) terbatas dan drone untuk kegiatan *surveillance* di area ring 1 serta melaksanakan pengamanan terhadap drone yang dapat mengancam keselamatan jiwa VVIP. Detasemen Peralatan bertugas memberikan dukungan pembekalan, pemeliharaan dan asistensi teknik terhadap peralatan yang digunakan Paspampres. Pemeliharaan peralatan meliputi senjata, amunisi, dan kendaraan. Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan bertugas melaksanakan penjagaan kehormatan di istana kepresidenan, melaksanakan upacara kenegaraan dan mengamankan instalsi kepresidenan serta melaksanakan pengamanan terhadap presiden waktu kunjungan ke daerah. Skadron Kavaleri Panser bertugas saat melakukan pengawalan dalam acara kepresidenan, menyiapkan skenario evakuasi terhadap presiden atau obyek VVIP lainnya apabila terjadi kontingensi darurat dengan menggunakan P2 dan Panser Anoa.

Ancaman di instalasi kepresidenan Jakarta sudah beberapa kali terjadi ancaman teror yang dilakukan oleh orang dengan sengaja masuk ke dalam pagar istana dengan melompat pagar pada malam hari. Hal senada disampaikan oleh Al Chaidar Puteh (komunikasi personal, 10 Januari 2021), mengatakan bahwa Paspampres dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden harus selalu update teknologi dan mempunyai naluri intelijen yang tinggi, sehingga cepat tanggap terhadap perkembangan ancaman yang menjadi kerawanan terhadap keselamatan VVIP.

Seperti yang dilakukan oleh Basufi asal Banyumas Jawa Tengah, mendatangi pos penjagaan istana minta bertemu dengan presiden Joko Widodo. Dengan membawa obeng memaksa masuk pintu dan berteriak teriak, setelah dilumpuh oleh petugas jaga istana dan di intrograsi ternyata orang tersebut stress. Berbeda dengan Brokington Sianturi, pria asal Medan yang melawan petugas ingin masuk ke dalam istana tanpa menggunakan pakaian dan celana. Brokington seorang pedagang stress berat karena dagangan tidak laku dan banyak tanggungan yang harus diselesaikan serta menggunakan narkoba jenis sabu setelah tes urine. Dian Yulia Novi wanita asal Cirebon Jawa Barat merupakan wanita pertama yang ingin menjadi bom bunuh diri (pengantin) di Indonesia. Dengan membawa satu buah bom panci berdaya ledak tinggi berangkat dari Bekasi untuk menyerang Istana Negara Jakarta, namun ketahuan oleh petugas dan ditangkap. Kenekatan Dian menjadi pengantin wanita bisa menjadi amunisi baru untuk mengagitasi dan memprovokasi kaum lelaki. Solihin (suaminya) ditangkap Densus 88 Anti Teror di Bekasi Jawa Barat (BBC Indonesia, 2017).

Sedangkan di Istana Kepresidenan Bogor juga pernah beberapa mendapat ancaman teror yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pernyataan Wakil Asintel Danpaspampres Letkol Mar Ahmad Effendi, (komunikasi personal, tanggal 10 Desember 2020) sebagai berikut:

“.....Sudah beberapa kali terjadi ancaman terhadap instalasi kepresidenan istana Bogor, ada orang dari Bojong Gede masuk ke dalam area istana dengan cara melompat pagar pada malam hari, ada juga penerbangan pesawat remote control tanpa awak atau dron yang masuk ke dalam area istana tanpa ada ijin kepada kepala rumah tangga kepresidenan...”

Pada saat ini Presiden Joko Widodo dan keluarga bertempat tinggal di Istana Kepresidenan Bogor yang merupakan wilayah Denpom III/Slw sehingga beban tugas satuan akan bertambah dan diperlukan suatu kemampuan dari personel Polisi militer yang handal dan professional. Beberapa kali terjadi ancaman di instalasi istana kepresidenan Bogor, dimana ada orang bernama

Dendy masuk istana dengan melompat pagar pada malam hari, setelah masuk didalam istana ditangkap oleh petugas jaga. Setelah ditangkap seperti orang gila, namun setelah di interograsi ternyata orang tersebut ada maksud lain masuk ke istana dan diserahkan ke aparat kepolisian setempat untuk proses lebih lanjut. Selain Dendy, ada seorang polisi yang berinisial SN anggota Polda Metro Jaya berpakaian dinas datang ke pos penjagaan 3 istana Bogor pukul 01.00 WIB ingin menghadap presiden. Menurutnya ada bisikan goib yang harus segera disampaikan kepada presiden Joko Widodo. SN setelah di periksa ternyata mempunyai gangguan jiwa/stress dan diserahkan ke Polsek Bogor Tengah untuk di kembalikan ke Polda Metro Jaya (Solopos, 2019).

Penerbangan pesawat remote control tanpa awak atau dron yang masuk ke lingkungan istana, sedang memfoto area dalam istana Bogor, sesuai dengan pernyataan Kasi Intel grup A Paspampres Mayor Kav Wicaksana HN (komunikasi personal, tanggal 5 Desember 2020), bahwa di istana Bogor telah diturunkan pesawat remote control tanpa awak atau dron yang sedang terbang masuk ke dalam area istana tanpa ijin kepada kepala rumah tangga kepresidenan, oleh anggota Denkomlek dengan menggunakan senjata stardorn.

Dalam suatu daerah yang tidak terdeteksi oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar aktif bersifat *line of sight*, sehingga menyebabkan kurang optimalnya deteksi radar terutama daerah yang tertutup oleh suatu obstalase seperti gunung, perbukitan, pepohonan yang tinggi dan sebagainya. *Blank spot area* merupakan daerah yang tidak dapat terdeteksi oleh radar aktif, sehingga untuk mengatasi permasalahan *blank spot area* diperlukan suatu desain integrasi sistem drone dan sensor radar pasif, termasuk terhadap pesawat yang terbang terlalu rendah untuk menghindari detekti radar hanud aktif, dimana pada titik *blank spot area* mampu mendeteksi secara situasional dan mandiri (Ferri, 2020).

Ancaman pesawat remote control tanpa awak atau dron, ada larangan untuk di terbangkan di kawasan Kebun Raya Bogor, karena dalam area kebun raya tersebut sudah termasuk Istana kepresidenan Bogor yang masuk daerah

obyek vital, sehingga harus ada izin khusus jika mengoperasikan drone. Sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 mengenai batasan dan syarat yang mengatur perizinan bagi pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone terbang di ruang udara yang diatur oleh *Air Traffic Control* (ATC). Pembatasan dan pengawasan pengoperasian menerbangkan pesawat drone di wilayah Bogor bahkan Depok, Sukabumi, Cianjur, karena kawasan tersebut merupakan zona udara untuk penerbangan dan masuk kawasan training helikopter Lanud Atang Senjaja.

Penerbangan dron masuk kedalam area istana Bogor dan memfoto - foto area dalam istana sudah melanggar batas atau zona larangan penerbangan. Dron yang masuk ke area istana tersebut tidak ijin terlebih dahulu ke kepala rumah tangga kepresidenan Bogor. Dengan menggunakan senjata stardom, dron tersebut ditembak dengan menggunakan sinyal yang lebih besar dan turunkan oleh anggota Detasemen Komunikasi dan Elektronika yang sedang melaksanakan dinas. Dron tersebut terdapat kamera dan rekaman foto istana Bogor diamankan oleh Komandan Komplek dan serahkan kepada Asintel Danpaspampres.

Pada saat presiden berkunjung ke daerah ada beberapa kendala dan hambatan diantaranya dari faktor pengerahan tim *advance* Paspampres yang diberangkatkan. Sesuai dengan SOP Paspampres dalam melaksanakan pengamanan jumlah personel yang diberangkatkan sudah cukup, namun sering terjadi perubahan dan penambahan titik - titik kunjungan sehingga jumlah personel *advance* terlalu minim dan kurang maksimal dalam pengamanan. Kekurangan jumlah personel tim *advance* saat berkunjung ke daerah menjadikan kerawanan terhadap ancaman untuk pengamanan VVIP. Hal tersebut diperkuat oleh Asops Danpaspampres, (komunikasi personal, 19 Desember 2020) yang mengatakan:

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan ketika tim *edvance* Paspampres sudah di berangkatkan ke daerah dalam rangka pengamanan presiden. Diantaranya yang menonjol adalah sering terjadinya perubahan dan penambahan titik kunjungan yang di hadiri oleh presiden. Hal tersebut tidak sesuai dengan saat rapat koordinasi awal yang dilaksanakan di Istana dengan pemerintah daerah yang

dikunjungi, sehingga kegiatan harus di cover dengan tim advance yang ada dengan kekuatan yang minim.

Presiden Joko Widodo mempunyai kebiasaan yang sangat berbeda dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Kebiasaan tersebut dimulai semenjak menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dimana ingin selalu berinteraksi terhadap masyarakat secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Bahkan Jokowi pernah mengatakan biarpun sudah dilantik menjadi presiden kebiasaan blusukan tetap akan dilakukan. Menurut presiden Joko Widodo semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat dapat di carikan jalan keluarnya/solusi dengan berinteraksi secara langsung. Anggota Paspampres agak kerepotan dalam mengamankan kebiasaan presiden Joko Widodo blusukan ke tempat - tempat keramaian (Merdeka.com, 2017).

Tim Pendahulu (advance) Paspampres umumnya dipimpin oleh seorang yang berpangkat Pamen Paspampres sebagai Komandan Tim (Dantim) advance. Bila daerah yang di kunjungi termasuk daerah rawan terhadap ancaman (Aceh, Ambon, Papua), dan daerah bencana maka Dantim advance yang dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Letkol minimal jabatan Wadan Grup/Waas. Apabila daerah yang akan di kunjungi presiden mengundang lebih dari 2.000 orang, dan kemungkinan terjadinya ancaman maka Dantim advance dijabat oleh seorang pamen Paspampres yang berpangkat Letkol dengan jabatan Pabanya/Danden, atas pertimbangan khusus Komandan Paspampres.

Dalam perjalanan menuju tempat acara presiden Joko Widodo melihat kerumunan masa di pinggir jalan yang menyambut kedatangan presiden, secara otomatis presiden merespon sambutan dari masyarakat tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Paban Utama Direktorat D Bais TNI Kolonel Pas Cendy Arief Tjahjono, (komunikasi personal, tanggal 7 Januari 2021) sebagai berikut:

“..... Pada saat perjalanan menuju ke tempat acara bapak presiden Joko Widodo dan rombongan disambut oleh warga masyarakat di sepanjang jalan dengan berbaris sambil memberikan ucapan selamat

datang dengan melambai - lambaikan tangan dan bendera merah putih, secara otomatis beliau langsung merespon membalas dengan melambaikan tangan sambil menurunkan kaca mobil kendaraan...”

Hal senada juga diperkuat oleh Komandan Detasemen 1 Letnan Kolonel Inf Frangky Susanto, (komunikasi personal, tanggal 10 Desember 2020) menyatakan Presiden Joko Widodo ingin selalu dekat dengan rakyat, saat kunjungan ke daerah dalam perjalanan menuju ke tempat acara, melihat masyarakat yang berkerumun di pinggir jalan, beliau minta berhenti dan turun untuk membagikan sembako.

Dalam saat perjalanan menuju daerah yang dikunjungi presiden Joko Widodo merespon sambutan masyarakat sepanjang jalan sampai menurunkan kaca kendaraan lapis baja kepresidenan sambil melambai lambaikan tangan. Bahkan presiden Joko Widodo yang sangat dekat dengan rakyat, minta berhenti dan turun dari kendaraan untuk membagikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Pada saat pembagian sembako di kerumunan masa yang banyak, kadang - kadang masyarakat kita kurang tertib, berdesak desakan ingin mendapat duluan, menjadikan titik kerawanan ancaman terhadap keselamatan presiden.

Saat terjadi kerumunan masyarakat yang banyak, anggota Paspampres lebih waspada terhadap orang - orang yang ingin memaksakan diri mendekati dengan presiden. Dengan melihat tingkah laku yang mencurigakan atau gerakan yang berbeda dengan yang orang-orang lainnya, terkadang membawa barang berupa flasdisk yang ingin diserahkan langsung kepada presiden. Mereka beranggapan bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan oleh orang nomor satu di Indonesia ini. Apabila orang tersebut memaksakan diri mendekati dengan presiden, anggota Paspampres segera merapat dan menghalau/menghalangi terlebih dahulu, jangan sampai ketahuan sama bapak presiden. Orang tersebut segera di amankan dan di serahkan pengamanan wilayah untuk di interograsi lebih lanjut.

Rangkaian kendaraan kepresidenan yang bergerak dari Jakarta menuju ke istana Bogor dengan menggunakan pengawalan kendaraan bermotor.

Dalam rangkaian kendaraan tersebut terdiri dari beberapa kendaraan, mulai dari kawal depan/swiper, kendaraan security 1, 2, kawal samping, kendaraan VVIP, kendaraan Pampri, kendaraan komando perjalanan, kendaraan Matan, kendaraan Jamer dan ambulance. Dalam perjalanan anggota Paspampres tidak boleh lengah, selalu waspada terhadap kemungkinan yang terjadi, monitor perkembangan situasi dan melaporkan situasi perjalanan kepada komando perjalanan/Komandan grup A Paspampres. Pada saat keluar pintu tol Bogor penjagaan aparat wilayah sudah terlihat melaksanakan pengamanan sepanjang jalan hingga istana Bogor. Arus kendaraan sementara di hentikan, namun saat melintas tugu Kujang tiba-tiba ada sepeda motor melintas dari jalan Padjajaran masuk rangkaian dan dekat dengan kendaraan presiden. Sepeda motor tersebut diberi isyarat oleh anggota Paspampres untuk menepi dan berhenti. (Oke News, 2017).

Penerapan pengamanan pola ring yang digelar masih terdapat celah ancaman yang disebabkan oleh kurang koordinasinya dengan baik antara unsur pengamanan ring II dengan unsur pengamanan pada ring III, dimana masih terjadi rasa egoisme satuan tersebut sehingga terjadi kerawanan penyusupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap kegiatan yang dihadiri oleh VVIP. Kerawanan terhadap penyusupan pihak-pihak yang tidak berkepentingan akibat kurangnya koordinasi tersebut, sehingga menjadikan potensi ancaman serius terhadap keselamatan dan keamanan VVIP. Pernyataan serupa disampaikan Wadan grup A Paspampres Lekol Mar Tri Maryanto (komunikasi personal, tanggal 10 Desember 2020) mengatakan:

“....Terjadi titik kerawanan yang kritis dimana dari pihak pengamanan masih melakukan tahap persiapan belum menggelar pasukan secara penuh, namun terdapat titik celah dari pihak - pihak yang tidak berkepentingan masuk sektor atau perimeter pengamanan yang digelar. Oleh karena itu harus melaksanakan koordinasi yang baik dalam pembagian sektor atau perimeter pengamanan sehingga tidak ada celah sedikit dari pihak yang tidak berkepentingan masuk ke sektor pengamanan yang digelar...”

Di era pemerintah presiden Joko Widodo, Istana Bogor sebagai kantor presiden dan kediaman presiden dan keluarganya. Namun presiden sering berkantor di Istana Negara Jakarta, sehingga harus melaksanakan perjalanan darat Jakarta - Bogor atau sebaliknya. Dalam perjalanan yang menggunakan pengawalan kepresidenan tersebut terjadi kerawanan ancaman teror saat rombongan konvoi melintas dibawah jembatan penyeberangan orang (JPO), dimana pengamanan wilayah belum tergelar, namun konvoi kendaraan sudah melewati jembatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas operasi pengamanan VVIP, Paspampres tidak berdiri sendiri namun memerlukan bantuan dari aparat wilayah setempat. Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor adalah bagian bawah Komando dari Polisi Militer Kodam III/Siliwangi yang merupakan satuan bantuan administrasi TNI AD yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan fungsi Kepolisian Militer di wilayah hukum Bogor dan sekitarnya. Demi terlaksananya tugas pokok satuan yang siap operasional dan handal serta didukung oleh kemampuan prajurit yang profesional dalam rangka mewujudkan tercapainya tugas pokok TNI AD. Bila Presiden dan keluarga serta tamu negara dari negara sahabat yang diterima oleh presiden di Istana Kepresidenan Bogor, beban tugas satuan akan bertambah sehingga diperlukan suatu kemampuan dari personel Polisi militer yang handal dan professional. (Wira, 2018).

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta dan istana Bogor masih terjadi beberapa kali ancaman baik secara langsung terhadap presiden. Setiap anggota Paspampres yang melaksanakan tugas di istana kepresidenan diperlukan kepekaan naluri intelijen yang tinggi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman. Di perlukan koordinasi yang erat antar jajaran intelijen Paspampres dengan jajaran intelijen wilayah dalam melaksanakan cegah terjadinya ancaman secara dini.

Dalam melaksanakan tugas advance tim ke daerah masih terkendala keterbatasan personel yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah titik kunjungan yang dihadiri presiden. Dantim advance harus membagi anggota tim menjadi

sub tim yang dipimpin oleh Komandan Komplek. Setiap kegiatan yang dikunjungi presiden harus tercover oleh anggota Paspampres dengan mengoptimalkan pasukan BKO dari aparat wilayah yang masuk kedalam ring I sebagaimana perlakuan yang dilaksanakan oleh anggota Paspampres.

Pembagian perimeter atau sektor ring II dan ring III yang menjadi tanggungjawab Pangkotama sebagai Pangkogaspad masih terdapat celah ancaman, dikarenakan kurangnya koordinasi antar satuan yang menjadi tugas dan tanggungjawab batas sector tidak jelas, sehingga menimbulkan kesempatan bagi orang yang ingin melakukan tindakan yang teror. Celah ancaman tersebut menjadi titik kerawanan yang dapat menjadikan ancaman terhadap keselamatan jiwa presiden.

4.2.2 Strategi grup A Paspampres dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya.

Grup A Paspampres merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak langsung jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya setiap saat dimanapun berada. Dalam melaksanakan tugas advance ke daerah yang di hadiri presiden, grup A Paspampres dibantu beberapa detasemen. Pengiriman anggota advance Paspampres ke daerah pada H-5, sebelum kedatangan presiden. Pengiriman jumlah personel advance di sesuaikan dengan jumlah sasaran yang rencana dikunjungi dan dipimpin oleh seorang berpangkat Letnan Kolonel. Berdasarkan rencana kunjungan presiden ke daerah, staf Intelijen Paspampres membuat perkiraan pengamanan dengan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen Negara dan intelijen Kotamaops TNI daerah yang akan di kunjungi terkait ipolesosbudhankam dan hal-hal yang menonjol yang berhubungan dengan perkiraan ancaman. Staf Operasi menyiapkan personel yang diberangkatkan dan berkoordinasi dengan instansi yang akan dikunjungi untuk menggelar rencana pengamanan. Staf personel menyiapkan surat

perintah dan staf Logistik mendukung bekal logistik untuk kebutuhan di daerah yang dituju.

Personel grup A yang tergabung dalam tim advance dan mein grup selalu berkoordinasi dengan staf operasi secara terus menerus memonitor perkembangan rencana kunjungan ke daerah. Informasi dari aparat intelijen wilayah yang akan dikunjungi presiden disampaikan kepada staf intelijen Pasapampres terkait hal –hal yang menonjol yang dapat menimbulkan ancaman. Tim advance yang akan berangkat ke daerah melakukan latihan - latihan seperti escape, pelolosan, evakuasi dan sebagainya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tim advance juga menyiapkan perlengkapan dan peralatan baik perorangan maupun beregu yang akan dibawa ke daerah. Tim advance berangkat ke daerah tujuan yang dikunjungi presiden H-5 dari kedatangan presiden, Pemerintah daerah setempat mengadakan rapat koordinasi pengamanan yang dipimpin oleh Panglima Kodam atau Komandan Korem setempat tentang rencana pengamanan, rencana kegiatan, tempat acara, perkuatan BKO dari aparat wilayah setempat. Staf intelijen wilayah setempat memaparkan situasi ipoleksosbud, daerah rawan, hal-hal yang menonjol dan kemungkinan ancaman yang ada.

Dantim advance menerima perkuatan wilayah BKO yang dibutuhkan meliputi satuan Polisi Militer daerah sebagai pengawalan protokoler (bersenjata), Kepolisian Daerah setempat (bersenjata) dan satuan Polisi Militer daerah setempat sebagai walakir. Unsur penyelamatan dan kontra sniper dari satuan tempur khusus wilayah yang terlatih (bersenjata), unsur rantis Kavaleri wilayah/Polda sebagai unsur pelaksana escape (bersenjata), unsur pamtup wilayah (tidak bersenjata), unsur pam tirai (tidak bersenjata). Dalam membantu pelayanan kesehatan, pengecekan makanan dan minuman dibantu unsur kesehatan wilayah (Sipil, TNI dan Polri), unsur zeni wilayah/ Gegana Polda wilayah untuk pelaksanaan sterilisasi personel dan barang serta tim Jihandak/Nubika (tidak bersenjata), unsur Paska TNI AL untuk melaksanakan sterilisasi bawah air dan unsur perkuatan lainnya yang dibutuhkan untuk

mendukung operasi pengamanan VVIP atas dasar pertimbangan dari Dantim pendahulu.

Tim advance Paspampres yang dikirim ke daerah tergantung dari jumlah titik yang rencana dikunjungi oleh presiden. Pengiriman tim advance ke daerah H-5 sebelum kedatangan presiden, sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Operasi grup A Paspampres Mayor Kav Said Winagiri (komunikasi personal, tanggal 5 Desember 2020) mengatakan bahwa staf Operasi Paspampres minta personel kepada grup A Paspampres untuk melaksanakan tugas advance ke daerah dalam rangka melaksanakan pengamanan rencana kunjungan presiden.

Bila sasaran yang dikunjungi oleh presiden tidak sesuai dengan rencana yang dirapatkan di Sekretaris Militer Jakarta, maka organisasi advance dibagi menjadi beberapa subtim yang dipimpin oleh seorang Komandan Komplek (Danplek). Hal tersebut disampaikan Komandan Detasemen 1 Letnan Kolone Inf Frangky Susanto, (komunikasi personal, tanggal 10 Desember 2020) mengatakan bahwa:

“...Jumlah personel tim advance Paspampres sangat terbatas dan minimalis yang di kirim ke daerah yang akan dihadiri presiden. Jumlah personel tim advance yang dikirimkan adalah jumlah minimal pengamanan yang dibutuhkan di daerah yang sebenarnya jauh dari ideal. Misalnya sebagai contoh personel yang dikirim 23 orang, dan jumlah titik kunjungan 4, berarti masing masing titik yang dikunjungi berjumlah 3 - 4 personel dari Paspampres. Untuk melakukan pengamanan dalam satu titik kunjungan hanya dengan 4 personel Paspampres saja tidak maksimal...”

Dalam setiap subtim yang ideal terdiri dari unsur Pampri, Pamins, Matan, Deteksi, Kesehatan dan Komlek. Tim advance yang dikirim ke daerah yang akan dikunjungi presiden sudah sesuai jumlah titik yang akan dikunjungi dan minimal standart pengamanan daerah. Namun pada waktu yang last minutes pada kenyataannya terjadi perubahan atau penambahan jumlah titik yang dikunjungi tidak sesuai dengan hasil rapat di Sekretariat Militer Jakarta sehingga personel Paspampres harus mengcover jumlah titik kunjungan. Dengan jumlah personel yang minim dan jumlah titik kunjungan yang banyak

tersebut, tim advance harus mengcover semua kegiatan. Langkah - langkah yang dilakukan Dantim advance adalah meminta bantuan personel kepada instansi wilayah dan mengoptimalkan aparat pengaman wilayah (tidak bersenjata) yang BKO untuk membantu pengamanan di ring I sebagaimana tugas yang dilakukan oleh anggota Paspampres. Lebih lanjut disampaikan oleh Kolonel Inf Muhamad Imam Gogor, (komunikasi personal, tanggal 19 Desember 2020) mengatakan bahwa :

“....Penambahan personel tim advance Paspampres bila waktu masih cukup akan di kirim personel tambahan, namun apabila tidak cukup waktu maka Dantim advance Paspampres supaya minta bantuan aparat wilayah setempat untuk BKO dan mengoptimalkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas yang dilakukan oleh personel Paspampres terutama di ring 1 (satu) yang menjadi domain dan tanggungjawab Paspampres...”

Dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden dan keluarganya prajurit grup A Paspampres harus selalu dalam kondisi prima, sehingga diperlukan pembinaan fisik atau latihan baik secara perorangan maupun secara berkelompok atau tim. Latihan perorangan dapat dilakukan pada pagi hari seperti lari, jogging, renang, menembak pistol dan sebagainya. Namun untuk latihan tim dilakukan pada siang hari seperti beladiri, menembak reaksi, latihan escape dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Detasemen 1 grup A Paspampres Letnan Kolonel Inf Fangky Susanto, ”(komunikasi personal, tanggal 10 Desember 2020) bahwa:

“...Prajurit grup A Paspampres harus selalu dalam kondisi prima dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap presiden Joko Widodo dan keluarganya, sehingga setiap prajurit wajib melaksanakan pembinaan fisik dan latihan. Pembinaan fisik perorangan dilaksanakan pada pagi hari dan latihan secara tim atau kelompok dilaksanakan pada siang hari...”

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Operasi grup A Paspampres Mayor Kav Said Winagiri,(komunikasi personal, tanggal 5 Desember 2020) menyampikan bahwa masih kurangnya pembinaan fisik anggota grup A secara

perorangan karena keterbatasan waktu di disebabkan banyaknya penugasan di lapangan dan naik turun dinas di luar satuan dalam menjalankan tugas.

Begitu juga disampaikan oleh Pabandya Operasi Paspampres Mayor Inf Reno Handoko, (komunikasi personal, tanggal 19 Desember 2020) bahwa

“...setiap hari anggota Paspampres selalu melakukan pembinaan fisik mulai dari lari, renang, beladiri, menembak, melakukan latihan driil kering sampai dengan latihan tim atau kelompok seperti escape, pelolosan dengan menggunakan panser Anoa, yang dilakukan oleh anggota Eskadron Kavaleri Panser dan latihan konvoi oleh anggota Yonwalprotneg...”

Pembinaan prajurit Paspampres sangat di perlukan dalam mendukung kesiapan operasional pengamanan VVIP. Setiap prajurit Paspampres harus mempunyai kemampuan yang handal dan berkualitas secara individu dan kerjasam tim. Setiap hari secara rutin melaksanakan latihan baik secara perorangan maupun secara kelompok/tim. Latihan secara individu seperti lari, menembak, beladiri, latihan fisik dan renang, sedangkan latihan secara kelompok/tim dilaksnakan pada siang hari seperti latihan menembak beregu, bola volley, latihan penyelamatan dan sebagainya. Latihan sangat diperlukan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan perorangan dan kelompok guna mendukung tugas operasi pengamanan VVIP. Keberhasilan Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan menjadi tolok ukur kemampuan dan keberhasilan prajurit Paspampres (Ricky, 2018).

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Paspampres dalam melaksanakan operasi pengamanan VVIP melakukan koordinasi yang erat antar instansi terkait. Tim advance yang diberangkatkan ke daerah H-5 sebelum kedatangan VVIP dengan personel yang sudah sesuai dengan jumlah titik kunjungan presiden. Apabila ada perubahan *roundown* acara atau penambahan titik kunjungan maka dantim advance bila waktu masih memungkinkan minta penambahan personel ke staf operasi Paspampres,

namun bila waktu tidak memungkinkan untuk mengirim tambahan personel maka Dantim advance minta bantuan dari aparat wilayah setempat untuk BKO dari aparat wilayah untuk memperdayakan ke ring I sebagaimana yang dilakukan anggota Paspampres.

Pembinaan prajurit Paspampres sangat diperlukan dalam mendukung tugas pokok yakni melaksanakan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Setiap hari prajurit Paspampres melaksanakan latihan baik secara individu atau latihan secara kelompok/tim. Latihan secara individu seperti lari, fisik, renang, menembak dan beladiri dilaksanakan pada pagi hari. Latihan individu harus selalu diasah guna mengetahui kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki perorangan. Sedangkan latihan secara kelompok/tim dilaksanakan pada siang seperti latihan escape, pelolosan, evakuasi dengan kendaraan panser, rangkaian kawal bermotor dan sebagainya. Latihan-latihan tersebut sangat dibutuhkan setiap prajurit Paspampres untuk menunjang kesiapan operasi pengamanan VVIP kedepan yang intensitasnya sangat tinggi dan meningkatnya eskalasi ancaman yang kompleks.

4.3 Pembahasan

Pada sub bab pembahasan ini peneliti akan menjelaskan pembahasan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara baik secara langsung maupun melalui media elektronik, studi dokumen dan studi pustaka menggunakan teori yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

4.3.1 Grup A Paspampres dalam menentukan ancaman terorisme

Konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Waltz (1987) bahwa kriteria ancaman salah satunya adalah niat menyerang. Instalasi kepresidenan sudah beberapa kali terjadi ancaman teror baik istana Merdeka

Jakarta dan Istana Bogor. Dalam pernyataan *Institute for Policy Analysis and Conflict* (IPAC) menyebut bahwa istri dari Noordin Muhamad Top yang bernama Munfiatu adalah wanita pertama terlibat kasus terorisme di Indonesia, sebagai otak sejumlah teror bom di Jakarta tahun 2003 di antaranya di Kedutaan Besar Australia dan hotel Marriot. Sedangkan Dian Yulia Novita merupakan wanita sebagai pengantin pertama yang ingin meledakan dirinya (bunuh diri) di istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bom panci rakitan. Dian dengan sengaja membuat suasana teror terhadap masyarakat, yang dapat menimbulkan korban jiwa secara massal atau kerusakan objek vital dan melakukan permufakatan jahat terkait terorisme (BBC Indonesia, 2017). Namun berbeda yang dilakukan oleh Basufi asal Banyumas Jawa Tengah, pada malam hari datang ke pos penjagaan istana Merdeka Jakarta untuk bertemu dengan presiden Joko Widodo. Dengan membawa obeng memaksa ingin masuk pintu area istana sambil berteriak-teriak, petugas jaga ingin menangkap namun Basufi melawan. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki petugas jaga tersebut tidak mengalami kesulitan untuk meringkus Basufi. Setelah diinterogasi oleh petugas jaga istana ternyata Basufi mengalami kelainan jiwa yakni stress.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Brokington Sianturi pria asal Medan, yang melawan petugas ingin masuk ke dalam istana tanpa menggunakan pakaian dan celana. Brokington seorang adalah pedagang stress berat karena dagangan tidak laku dan banyak tanggungan yang harus diselesaikan namun setelah di tes urine, terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Berbeda dengan seorang ibu paruh baya yang bernama Ida, ingin masuk ke dalam area istana Merdeka ingin bertemu presiden Joko Widodo yang sedang melaksanakan vaksin covid-19 pertama di Indonesia dengan para pejabat. Dengan membawa famlet dan poster seraya marah-marah ingin masuk istana dan mengaku anaknya diculik oleh seorang pria. Namun, setelah menemui dirinya, sang anak tak mengakui sosok sang ibu. Tuntutannya agar ia mau diakui anaknya sebagai seorang ibu. Ida pernah melakukan aksi serupa dan dibawa ke dinas sosial Cipayung (Oke News, 2021).

Tugas pokok grup A Paspampres adalah melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya pada setiap saat dimanapun berada. Instalasi kepresidenan baik istana Merdeka Jakarta dan istana Bogor sudah terjadi beberapa kali ancaman di era pemerintahan presiden Joko Widodo. Istana Merdeka Jakarta sebagai kantor presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Istana Bogor juga sebagai kantor presiden dan sebagai kediaman presiden dan keluarganya. Ancaman terhadap presiden merupakan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Istana Merdeka Jakarta merupakan kantor resmi presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 pasal 1, Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Grup A Paspampres yang berada langsung dibawah Komandan Paspampres, terdiri dari 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas. Setiap Detasemen terdiri dari Tim Pengamanan Pribadi (Pampri), Tim Pengamanan Instalasi (Pamins) dan Tim Pengamanan Penyelamatan (Matan). Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), antara Tim satu dengan Tim yang lain mempunyai tujuan dan sasaran masing - masing, diantaranya:

- a. Pengamanan Pribadi (Pampri). Merupakan pelaksanaan kegiatannya pengamanan fisik langsung secara melekat dan terus menerus dari ancaman yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa atau badan VVIP. Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pengamanan pribadi VVIP setiap saat dimanapun berada dengan baik sehingga keselamatan VVIP terus terjaga. Adapun sasaran Pampri sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta

- Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun.
- 2) Terlaksananya Pengamanan Pribadi terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang terpadu dengan melibatkan unsur Pengamanan Instalasi (Pamins), unsur Penyelamatan (Matan), unsur komlek, unsur deteksi, unsur kesehatan, unsur Walprotneg dan satuan jajaran TNI lainnya; dan
 - 3) Terwujudnya penggunaan teknik dan taktik Pengamanan Pribadi terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, dengan mendeteksi, menangkal dan mengatasi setiap bentuk ancaman dan gangguan terhadap pribadi VVIP pada setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun.
- b. Pengamanan Instalasi (Pamins). Merupakan terselenggaranya pelaksanaan pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengamanan di instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan Instansi terkait lainnya sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Adapun sasaran Pengamanan Instalasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya keamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP dengan menggunakan taktik dan teknik pengamanan instalasi yang baik dan benar sehingga tempat tersebut aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat mencelakakan keselamatan VVIP.
 - 2) Terwujudnya operasi pengamanan VVIP secara terpadu di Ring I dengan personel satuan Paspampres, satuan TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.
- c. Pengamanan Penyelamatan (Matan). Adalah suatu bentuk operasi yang dilakukan dalam rangka menghadapi kontinjensi darurat untuk menyelamatkan VVIP dari kemungkinan bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Tujuannya adalah menjamin keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP. Adapun sasaran Pengamanan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya suatu mekanisme operasi penyelamatan oleh tim Pam Matan Paspampres secara tepat, efektif dan efisien; dan
 - 2) Tercapainya keselamatan VVIP pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP.

Sedangkan konsep pengamanan menurut buku petunjuk Mabes AD (2004), diantara salah satu kriterianya adalah meniadakan peluang bagi pihak

lawan. Kegiatan operasi pengamanan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan operasi Intelijen yang dititik beratkan pada upaya mencegah timbulnya kerugian dipihak sendiri. Pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi lain maupun tempat acara yang digunakan presiden harus aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan presiden, dilakukan oleh anggota Tim Pengamanan Instalasi grup A Paspampres yang di bantu oleh beberapa detasemen terkait sesuai dengan SOP Paspampres. Penerapan pola gelar operasi pengamanan VVIP dengan menggunakan pola ring, dimana agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dalam pengamanan. Pengamanan dilakukan dengan membagi daerah pengamanan menjadi 3 (tiga) sektor (ring) sebagai berikut:

- a. Ring I adalah suatu tempat atau daerah pengamanan yang penentuan batas-batas wilayah pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Paspampres, dimana unsur-unsur pengamanan Ring I dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan VVIP.
- b. Ring II adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring I merupakan jarak keamanan dalam pola pengamanan VVIP, dihadapkan kepada ancaman tembakan efektif senjata lintas datar. Ring II dan III. Unsur TNI dan unsur terkait lainnya.
- c. Ring III adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring II merupakan jarak aman dalam pola pengaman VVIP, di luar jarak capai senjata penembak runduk. Kewenangan dalam penentuan Ring II dan Ring III berada pada Pangkogabpad/ Pangkogasgabpad TNI.

Di dalam mempermudah sistim pengamanan dan pengendalian Ring-I pada operasi pengamanan VVIP oleh Paspampres di bagi dengan menggunakan pola zona A, zona B dan zona C.

- a. Zona A merupakan Unsur pengamanan pribadi Paspampres yang melekat langsung setiap saat dengan VVIP. Termasuk anggota Detasemen Kesehatan bergabung dalam mein grup bertugas

memeriksa makanan dan minuman yang disajikan untuk Presiden dan keluarganya. Pemeriksaan dilakukan secara ketat, mulai dari bahan-bahan makanan yang akan dimasak hingga makanan tersebut siap disajikan. Anggota Denkes wajib memeriksa semua makanan basah dan minuman ringan serta peralatan yang digunakan untuk memasaknya. Tidak hanya uji kimiawi, namun wajib melakukan uji organoleptic. Daerah kontak pampri merupakan metode pembagian daerah pengamanan yang digunakan unsur pampri bertujuan untuk mempermudah sistem pengamanan VVIP di ring I (zona A), adapun daerah kontak adalah:

- 1) Daerah kontak fisik, dimana dimana personel Pampri dapat menjangkau VVIP secara fisik.
- 2) Daerah kontak verbal, dimana VVIP tidak dapat terjangkau secara fisik, tetapi personel pengaman pribadi dapat berkomunikasi langsung dengan VVIP.
- 3) Daerah kontak visual, dimana personel pengaman pribadi tidak dapat menjangkau VVIP baik secara fisik maupun secara verbal, tetapi dapat melaksanakan kontak pandang dengan VVIP.

b. Zona B merupakan Unsur pengamanan instalasi Paspampres dan personel perkuatan lain, diantaranya:

- 1) Tim Pamins. Tim Pamins bertugas melaksanakan pengamanan secara langsung terhadap instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP sebagai tempat acara/tempat tinggal, fasilitas dan sarana prasarana di Ring 1 serta melaksanakan pemeriksaan terhadap personel dan materiel yang akan memasuki tempat acara/kegiatan yang dilaksanakan secara teliti, proaktif, preventif dan terus-menerus. Dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh

seorang Dantim Pamins yang tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.

- 2) Unit Pamins. Unit Pamins bertugas melaksanakan pengamanan di zona B dan C meliputi pengawasan dan pengamanan terhadap personel, materiil dan instalasi di ring I. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
 - 3) Unit Komunikasi dan Elektronik (Komlek). Unit Komlek menyelenggarakan dukungan komunikasi, elektronika dan perang elektronika (pernika) terbatas dan drone untuk kegiatan *surveillance* di area ring 1 serta melaksanakan pengamanan terhadap drone yang dapat mengancam keselamatan jiwa VVIP. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
 - 4) Unit Peralatan (Pal). Unit peralatan menyimpan senjata api/tajam dan munisi milik tamu undangan yang menghadiri acara VVIP, melaksanakan pemeriksaan senjata pasukan upacara Kenegaraan. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
- c. Zona C merupakan Unsur Detasemen Deteksi, Pengawal Istana (khusus Istana Kepresidenan), Lalin dan perkuatan unsur Pengamanan Instalasi lain, diantaranya:
- 1) Unit Deteksi. Unit Deteksi melaksanakan tugas sterilisasi, deteksi, identifikasi, monitoring dan penanganan terhadap ancaman benda berbahaya, bahaya *Chemical Biology Radioactive Nuclear Explosive* (CBRNe). Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
 - 2) Unit Lalin. Unit Lalin bertugas melaksanakan pengendalian lalu lintas kendaraan VVIP di instalasi kepresidenan dan

instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan oleh VVIP. Unit Lalin terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penugasan yaitu Unit Lalin Istana, Unit Lalin Kediaman dan Unit Lalin Tempat Acara. Unit Lalin Istana bertugas bersama dengan unit walis di istana kepresidenan. Unit Lalin Kediaman bertugas di kediaman Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Unit Lalin Tempat Acara bertugas di instalasi lain atau tempat acara yang digunakan VVIP. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.

- 3) Unit Walis. Unit Walis bertugas melaksanakan pengamanan istana kepresidenan di zona C meliputi tugas pengibaran dan penurunan bendera, plankton, jajar kehormatan, pengamanan, pemantauan dan pengawasan area ring 1. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Pamins.
- 4) Skadron Kavaleri Panser, bertugas melakukan pengawalan dalam acara kepresidenan dan menyiapkan skenario evakuasi terhadap presiden atau obyek VVIP lainnya apabila terjadi kontingensi darurat dengan kendaraan Panser Anoa.

Pada kondisi tertentu maka personel pengamanan yang bertugas di zona B dan C dapat membantu personel pengamanan pribadi yang berada di zona A atas dasar pertimbangan taktis dan teknis. Sedangkan untuk pelibatan unsur BKO dari satuan wilayah yang ditugaskan di zona B dan C, harus mendapatkan izin dari Komandan/Wadan Paspampres yang direkomendasikan oleh Dantim Pamins. Khusus zona C unsur Deteksi bertindak sebagai pelaksana sterilisasi terhadap seluruh tamu undangan, karyawan dan barang yang akan masuk ke Ring I di pintu masuk yang telah ditentukan.

Kriteria dari salah satu konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Waltz (1987) adalah kedekatan wilayah. Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan yang dihadiri presiden terdapat kerawanan pada saat waktu - waktu kritis dimana unsur pengamanan pada tahap persiapan belum menggelar kekuatan dengan penuh, karena wilayahnya berdekatan sehingga terdapat celah - celah yang digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan masuki kedalam area ring yang akan digelar. Dalam pembagian sektor atau perimeter harus jelas batasannya yang menjadi tugas dan tanggungjawab pengamanan sehingga tidak menimbulkan titik kerawanan atau titik celah bagi pihak yang tidak berkepentingan terhadap acara tersebut yang dihadiri oleh presiden. Diperlukan koordinasi yang erat dan kerjasam yang ketat antar petugas pengamanan antar sector dalam bentuk suatu mekanisme sistem kerja yang terpadu antara satgas Paspampres dengan satgas Pengamanan Wilayah yang mengawaki sektor-sektor tersebut.

Pada pengamanan yang di bentuk dalam sektor atau perimeter dalam membatasi gerak dan tanggungjawab batas kewenangan yang telah ditentukan oleh petugas dinamakan pengamanan ring. Ring I merupakan daerah atau tempat pengamanan dengan batas wilayahnya yang telah di setujui sepenuhnya oleh Paspampres sesuai hasil koordinasi instansi terkait, dimana unsur-unsur pengamanan ring I dapat beraksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Ring II merupakan daerah atau tempat dimana terletak diluar ring I dan menjadi kesepakatan sepenuhnya hasil koordinasi dan menjadi wewenang satgas pamwil, dimana unsur-unsur pengamanan Ring II dapat beraksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Ring III merupakan daerah atau tempat yang berada diluar ring II, dimana hasil kesepakatan dan koordinasi sepenuhnya instansi terkait yang menjadi wewenang satgas pamwil, dimana unsur-unsur pengamanan Ring III dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan presiden. Dalam pelaksanaan pembagian sector atau ring terkadang terdapat celah atau titik kerawanan yang tidak tercover dengan batas yang jelas, sehingga siapa yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab sektor tersebut.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang batas-batas yang menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan operasi pengamanan, sehingga menjadi salah satu penyebab titik kelemahan.

Konsep terorisme yang disampaikan oleh Harvey W. Kushner (2003) diantara salah satu kriterianya adalah sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah. Ada pesawat remote kontrol tanpa awak atau dron di sekitar Kawasan Kebun Raya Bogor karena di dalam kompleks itu terdapat Istana Kepresidenan Bogor tanpa ijin khusus terlebih dahulu. Penerbangan dron tersebut masuk sasaran yang dituju yakni istana kepresidenan Bogor yang merupakan dalam pengamanan VVIP. Ada sejumlah kawasan udara yang dilarang untuk mengoperasikan dan menerbangkan drone lainnya, yakni kawasan udara terbatas (*restricted area*) baik penerbangan udara negara atau pun penerbangan komersil termasuk kawasan kebun Raya Bogor. Dron yang di terbangkan diatas kawasan kebun raya dan masuk area Istana Bogor di turun secara paksa oleh petugas jaga dari anggota Detasemen Komunikasi Elektronika Paspampres. Dron yang dilengkapi dengan kamera dan memfoto area dalam istana Bogor tersebut di tembak menggunakan senjata stardom dengan sinyal yang kuat. Penerbangan dron tanpa ijin khusus tersebut sudah melanggar kawasan udara terbatas.

Mengenai dari beberapa ancaman yang terjadi di istana dapat dikatakan bahwa terjadinya ancaman di instalasi kepresidenan baik istana Merdeka Jakarta dan Istana kepresidenan Bogor, harus mendapatkan perhatian yang serius bagi anggota Paspampres dan aparat wilayah setempat yang sedang melaksanakan tugas jaga dan pengamanan di sekitar di istana. Pengamanan di dalam area istana lebih di perketat mulai dari pengecekan semua kendaraan yang masuk kedalam area istana, personel yang masuk harus melewati secdoor dan pengecekan keluar masuk barang- barang harus lebih teliti. Komandan Komplek istana selalu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap anggota yang sedang jaga. Mengatur pergantian dinas jaga dengan baik, sehingga anggota tidak jenuh dalam rumah pos jaga. Melakukan patroli terhadap anggota yang jaga dengan waktu yang tidak menentu sehingga

mengetahui kesiapsiagaannya. Sebenarnya dalam pengoperasionalan pesawat remote control tanpa awak atau dron sudah ada aturannya dari Menteri Perhubungan, dimana area yang tidak boleh untuk menerbangkan sehingga di butuhkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak menerbangkan dron di atas daerah objek vital diantaranya instalasi kepresidenan. Meningkatkan koordinasi erat dan ketat terhadap aparat wilayah terkait dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan.

Berkaitan dengan operasi Pengamanan VVIP, dapat disimpulkan bahwa pola ring yang berbentuk perimeter atau sektor dalam gelar operasi pengamanan VVIP berguna untuk membatasi tanggungjawab dan kewenangan sektor petugas pengamanan yang telah ditunjuk sesuai dengan batas yang telah disepakati. Ring I merupakan wewenang dan tanggungjawab Paspampres untuk beraksi secara fisik mengamankan dan menyelamatkan VVIP. Ring II adalah daerah atau tempat di luar ring I, sedangkan ring III merupakan daerah yang berada diluar ring II. Ring II dan III merupakan tempat atau daerah pengamanan secara fisik pengamanan wilayah yang menjadi tanggungjawab wilayah Kodam sebagai Pangopsgabpad. Pola pengamanan tersebut sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan koordinasi yang erat dan ketat antara Paspampres dengan Instansi wilayah, dimana batas-batas atau perimeter pengamanan harus jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan saling mengklaim bila terjadi pelanggaran. Penempatan anggota pada medan-medan kritis, titik rawan terjadinya potensi ancaman dan mengadakan pengawasan secara intensif.

4.3.2 Strategi Grup A Paspampres mengatasi ancaman terorisme

Dari teori yang peneliti masukkan dalam Bab 2 bahwa Strategi yang digunakan menggunakan teori yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Arthur F. Lykke, ada tiga indikator yaitu ends, ways, dan means. Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan

keluarganya, peneliti akan menguraikan menggunakan ketiga indikator ini dan menghubungkan konsep pengamanan, konsep strategi dan konsep ancaman.

4.3.2.1 Tujuan (*Ends*)

Grup A Paspampres merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden dan keluarganya setiap saat dimanapun berada. Grup A terdiri dari 4 Detasemen dan 1 Kompi Markas yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Paspampres. Grup A Paspampres mempunyai Dhuaja yakni Berani Setia Waspada, yang mempunyai makna bahwa disamping sebagai Prajurit yang setia terhadap tugas, setia kepada Pancasila dan Sapta Marga, setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan senantiasa menjaga kewaspadaan, prajurit Grup A Paspampres juga senantiasa Berani dalam menghadapi berbagai situasi penugasan dalam Pengawalan. Setiap detasemen terdiri dari Tim Pengamanan Pribadi (Pampri), Pengamanan Instalasi (Pamins) dan Pengamanan Penyelematan (Matan). Antara tim dengan tim yang lain mempunyai sasaran yang berbeda beda.

Tujuan tim Pengamanan Pribadi (Pampri) adalah menjamin terselenggaranya pengamanan pribadi VVIP terus terjaga terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun. Sedangkan tujuan tim Pengamanan Instalasi (Pamins) adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengamanan di instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan Instansi terkait lainnya sehingga aman dari tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lain yang dapat membahayakan keselamatan VVIP. Dan tujuan dari Pengamanan Penyelematan (Matan) adalah menjamin keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden

beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan pada kondisi darurat akibat adanya ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan VVIP (Perpang/1287/XII/, 2018).

Berdasarkan uraian tujuan (*ends*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya di perlukan kerjasama yang erat dan ketat antara Paspampres dengan instansi terkait, agar tercipta situasi keamanan yang kondusif sehingga sistem penyelenggaraan pengamanan kegiatan Presiden dan keluarga berjalan dengan tertib dan lancar.

4.3.2.2 Cara/Taktik/Strategi (*Ways*)

Dalam melaksanakan pengamanan instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat-tempat acara yang digunakan VVIP dilakukan oleh satuan Paspampres, satuan TNI dan instansi terkait lainnya sehingga tidak terjadi tindakan sabotase, infiltrasi dan gangguan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan VVIP. Detasemen deteksi Paspampres dalam melaksanakan sterilisasi instalasi kepresidenan dan instalasi-instalasi lain maupun tempat acara yang digunakan oleh VVIP. Dengan menggunakan peralatan elektronik yang di miliki satuan dan dibantu dengan anjing K-9 ras Malinois yang mempunyai penciuman sangat peka untuk mendeteksi bahan peledak di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Dalam melaksanakan sterilisasi istana Merdeka dan istana Bogor, Dendeteksi Paspampres dibantu dari Kompi Zeni Nubika Pusziad. Namun dalam melaksanakan advance ke daerah, Tim Deteksi Paspampres untuk strerilisasi di bantu oleh Dendeteksi dan anjing K-9 dari Gegana wilayah setempat.

Presiden Joko Widodo berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya mempunyai kebiasaan yang unik yakni terkenal blusukan. Kebiasaan tersebut sudah di miliki semenjak menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan

Presiden Republik Indonesia. Dengan terjun secara langsung presiden Joko Widodo mengetahui hal sebenarnya yang sedang berdar di masyarakat. Misalnya mendengar informasi harga bahan pangan tidak stabil, beliau langsung mengecek harga di pasar dengan menanyakan secara langsung kepada para pedagang yang berjualan. Kebiasaan blusukan memang baik untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di masyarakat, namun dilihat dari petensi ancaman sangat tinggi karena terjadinya kerumunan dari masyarakat jaraknya sangat dekat dengan presiden. Bahkan ada yang ingin bersalaman, berfoto dengan nekat menerobos balikade yang di lakukan oleh anggota Paspampres.

Untuk mengantisipasi kebiasaan blusukan presiden Joko Widodo, Paspampres harus melakukan koordinasi dengan terus menerus kepada staf/ajudan untuk rundown acara setiap hari. Intensitas kegiatan yang sangat tinggi, apabila terjadi perubahan rundown harus segera menginformasikan kepada tim yang sedang naik dinas. Bila presiden akan melaksanakan blusukan ke suatu tempat, anggota Sintel Paspampres segera menginformasikan ke jajaran intelijen setempat untuk mengecek tempat yang akan dikunjungi. Staf Operasi Paspampres melaksanakan koordinasi dengan jajaran Kodim, Polres dan instansi setempat untuk menggelar pengamanan.

Pada saat terjadi kerumunan warga masyarakat yang banyak, anggota Paspampres lebih waspada terhadap orang - orang yang ingin memaksakan diri mendekat dengan presiden. Dengan melihat gerak gerik yang mencurigakan atau tingkah laku yang berbeda dengan yang lainnya, terkadang ingin bersalaman, berfoto/selfi, bahkan dengan berbagai cara lainnya. Ada juga yang membawa flasdisk yang berisikan tentang permasalahan yang ada di daerahnya yang sudah lama tidak di selesaikan dengan tuntas, menggunakan kesempatan kehadiran presiden untuk menyampaikan secara langsung. Mereka beranggapan bahwa semua permasalahan yang ada dapat di selesaikan presiden. Apabila ada orang yang memaksakan diri untuk mendekat dengan presiden, anggota Paspampres segera merapat dan menghalau/menghalangi terlebih dahulu, jangan sampai ketahuan sama bapak

presiden. Orang tersebut di amankan dan di serahkan pengamanan wilayah untuk di interograsi lebih lanjut.

Setelah di interograsi maka orang tersebut dapat di kategorikan, apakah ancaman tersebut bersifat kriminal biasa atau ancaman yang membahayakan. Namun pada saat kerumunan ada orang dipanggil oleh presiden secara langsung, maka tindakan yang dilakukan anggota Paspampres adalah melakukan pengecekan secara fisik terhadap badan, apakah ada senjata atau barang yang membahayakan. Diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti merangkul, memeluk dan sebagainya. Dalam menghadap presiden selalu didampingi oleh anggota Pampri yang melekat presiden sampai dengan orang tersebut selesai dan kembali ke tempatnya.

Pada prinsipnya pengamanan terhadap presiden merupakan tugas dan tanggungjawab Paspampres, sehingga tidak tebang pilih mana ancaman dari terorisme atau ancaman yang bersifat kriminal biasa. Sehingga anggota Paspampres yang melaksanakan pengamanan di lapangan tidak terjadi keraguan dalam mengambil tindakan. Setiap anggota Paspampres dalam melaksanakan tugas siap untuk menjadi perisai hidup, demi mengamankan keselamatan jiwa presiden dan keluarganya dari segala ancaman yang terjadi. Anggota Paspampres harus meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, selalu koordinasi dan bekerja sama timnya.

Sesuai dengan prinsip tidak mengambil resiko, dimana anggota Paspampres tidak memberikan peluang sekecil apapun yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan jiwa presiden. Ancaman terhadap keselamatan presiden dan keluarganya bukan merupakan kriminalitas biasa, tetapi lebih bersifat rongrongan terhadap kehormatan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan pengamanan terhadap presiden, anggota Paspampres harus mempunyai sumber daya manusia tinggi terhadap kepekaan ancaman yang mungkin terjadi, sehingga dapat dicegah secara dini. Anggota Paspampres harus meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, selalu koordinasi dengan timnya. Pada dasarnya Paspampres melaksanakan tugas

pengamanan terhadap presiden dan keluarganya selalu berprinsip pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk pelaksanaan Operasi Pengamanan VVIP dimana diperlukan keterpaduan antara Paspampres dan Satgas Pengamanan Wilayah harus bersinergi dan bekerjasama melaksanakan gelar Operasi Pengamanan VVIP. Diperlukan koordinasi yang baik antara Paspampres dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan VVIP sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk munculnya potensi ancaman yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan VVIP. Adapun instansi yang terlibat dalam pengamanan VVIP antara lain:

- a. Mabes TNI bertugas menentukan kebijakan operasi pengamanan VVIP, menentukan kebijakan tentang dukungan administrasi dan logistik, memantau penyelenggaraan operasi pengamanan VVIP dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan VVIP.
- b. Kodam selaku Koopspam VVIP bertugas menyelenggarakan operasi pengamanan fisik secara tidak langsung jarak jauh terhadap VVIP di Ring II dan Ring III serta mendukung pengamanan VVIP di Ring I.
- c. Bais TNI bertugas membuat perkiraan intelijen yang terkait dengan keamanan wilayah/lokasi/obyek kunjungan VVIP, menyiapkan tim pendahulu kedaerah/obyek kunjungan WIP dalam rangka pengamanan tertutup dan menyiapkan operator dan menyelenggarakan komunikasi satelit dipesawat yang digunakan VVIP apabila menggunakan pesawat selain pesawat kepresidenan BBJ-2.
- d. Paspampres bertugas merencanakan dan melaksanakan pengamanan fisik secara langsung jarak dekat terhadap WIP setiap saat dan dimanapun berada, Pengamanan sarana/prasarana yang akan digunakan WIP, termasuk pengamanan makanan dan medis, melaksanakan koordinasi

dengan semua unsur yang terkait yang dapat mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan WIP.

- e. Kohanudnas bertugas menyiapkan unsur tempur sergap dan unsur radar untuk memantau ancaman aspek udara dan menyiapkan bahan perkiraan intelijen aspek matra udara dan koordinasi dengan Sintel Kodam.
- f. Koarmada RI bertugas menyelenggarakan operasi pengamanan VVIP di wilayahnya dan mengkoordinasikan seluruh unsur yang dilibatkan dalam pengamanan.
- g. Koopsau bertugas menyiapkan unsur Lanud untuk mendukung kegiatan VVIP dan mengkoordinasikan seluruh unsur yang dilibatkan dalam pengamanan.
- h. Setmilpres bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi tentang pengorganisasian penyelenggaraan operasi pengamanan VVIP, bertanggung jawab kepada Presiden atas dukungan administrasi pelaksanaan operasi pengamanan VVIP.
- i. Satgas Intel bertugas merencanakan dan menyiapkan operasi intelijen di wilayah kegiatan VVIP, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen di wilayah kegiatan VVIP dan memberikan informasi setiap saat kepada Kogabpam/Kodam maupun kepada Satgas tentang kemungkinan ancaman yang harus diwaspadai, yang akan mengganggu dan dapat menggagalkan kegiatan VVIP.
- j. Paspampres mengeluarkan Satgas Paspampres yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik secara langsung jarak dekat terhadap VVIP setiap saat dan dimanapun berada, pengamanan sarana/prasarana yang akan digunakan VVIP, termasuk pengamanan makanan dan medis, melaksanakan koordinasi dengan semua unsur yang terkait yang dapat mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP.

- k. Kodam membentuk Satuan Tugas Pengamanan Wilayah yang bertugas merencanakan dan menyiapkan rute, tempat penginapan dan tempat kunjungan, melaksanakan dan mengendalikan pengamanan rute, tempat penginapan dan tempat kunjungan.
- l. Subsatgas Medis yang berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan makanan dan medis, rumah sakit rujukan untuk VVIP dan menyiapkan evakuasi medis.
- m. Subsatgas Bandara/Pelabuhan/Pangkalan TNI yang berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan serta menyiapkan pengendalian pengamanan di wilayah Bandara/Pelabuhan/Pangkalan TNI.
- n. Subsatgas Pen, yang berada dibawah Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan personel dan perlengkapan penerangan dan menyelenggarakan dukungan informasi media cetak dan elektronik serta koordinasi dengan semua unsur penerangan yang ada di wilayah.
- o. Unsur Polda yang berada dibawah kendali Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan pengamanan lalu lintas, pengendali massa dan unsur intel serta Densus 88.
- p. Unsur Pemda berada dibawah kendali Satgas Pamwil bertugas merencanakan dan menyiapkan protokoler, tempat dan dukungan acara dan dukungan PLN, PMK.

Berdasarkan uraian cara (*ways*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya diperlukan strategi yang tepat dan sesuai, dan dapat dilaksanakan oleh instansi yang terlibat dalam pengamanan Presiden dan keluarganya. Meningkatkan koordinasi, kemampuan, kepekaan, dan kepedulian personel dan satuan yang

terlibat dalam pengamanan Presiden dan keluarga merupakan hal mutlak yang harus dilakukan mulai dari kegiatan *advanced team* sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

4.3.2.3 Sarana dan Prasarana (*Means*)

Prajurit Paspampres dan *US Army Special Forces* (USASF, tentara khusus AS) menggelar latihan bersama yang tergabung dalam Garuda *Shadow*. Selama satu bulan di Markas Komando Paspampres Grup C, Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor menggelar latihan bersama dengan bertukar keterampilan dalam hal pengamanan tamu-tamu penting kenegaraan. Latihan tersebut membuktikan bahwa kerjasama antara Amerika dengan Indonesia semakin kuat. Dalam latihan tersebut pelatih grup C Paspampres memberikan materi tentang pengetahuan dasar pengamanan VVIP dan menembak reaksi cepat. Sebaliknya dari USASF, Paspampres mendapat ketrampilan *medical, tactical combat, casualty care, driving tehniques, advance party reconnaissance, surveillance/counter surveillance* dan *counter sniper* (Republika.Co.id, 2014).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka ancaman terhadap presiden dan keluarganya juga meningkat. Perlengkapan dan peralatan Paspampres selalu diperbaharui guna dalam mendukung tugas operasi pengamanan VVIP. Perlengkapan perorangan yang digunakan dalam pengamanan seperti pistol semi otomatis 9 mm (*Double Action*), rompi anti peluru level III A, *handy talky, ballistic blanket, masker pelindung CBRNe*. Sedangkan perlengkapan beregu/tim seperti senjata SMG (*Sub Macine Gun*) dengan tembakan semi otomatis/otomatis 9 mm/5,56 mm, senjata *sniper* dengan tembakan *manual* 7,62 mm/12,7 mm, teropong siang dengan pengukur. Baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan beregu/tim dalam mendukung pengamanan sudah masuk standart internasional. Detasemen Komunikasi Elektonika mempunyai peralatan anti-dron yang

digunakan untuk menurunkan dron secara paksa dengan sinyal yang kuat yang masuk ke area instalasi kepresidenan.

Sumber daya yang digunakan Paspampres dalam melaksanakan operasi pengamanan presiden dan keluarganya adalah personel TNI organik grup A Paspampres yang dibantu beberapa unsur detasemen terkait, seperti Detasemen Deteksi, Detasemen Komunikasi Elektronika, Detasemen Kesehatan, Detasemen Peralatan, Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan dan Skadron Kavaleri Panser. Personel grup A sendiri terdiri dari 4 detasemen dan tiap detasemen terdiri Tim Pampri, Pamins dan Pam Matan. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP, diantaranya:

- a. Perlengkapan Tim Pampri sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan senjata api pistol semi otomatis, *Double Action (DA)* dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
 - 2) Anggota Pampri dilengkapi dengan *sub machine gun/mitraliur pistol* yang disimpan dalam tas senjata yang dapat dijinjing.
 - 3) Kartu identitas/*Id Card* dan *PIN (Personel Identification Number)* Paspampres
 - 4) Rompi anti peluru/ *body armour* minimal level III A agar peran Pampri sebagai perisai hidup dapat efektif
 - 5) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphoneset* dengan baterai cadangan)
 - 6) Lampu senter sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu
 - 7) Teropong siang dan teropong malam sangat membantu pada saat VVIP tinggal disuatu tempat terbuka, sehingga apabila melihat sesuatu/benda aneh dapat dilihat dari jarak aman
 - 8) *Ballistic blanket* digunakan dalam tindakan untuk melindungi VVIP dari ancaman tembakan

- 9) Masker pelindung *CBRNe* digunakan pada saat terjadi ancaman agensia biologi, racun kimia, radioaktif dan nuklir yang berbentuk gas
 - 10) Payung khusus VVIP, disamping berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan juga berfungsi apabila VVIP mendapat gangguan berupa pelemparan benda (telur busuk, batu dan lain-lain).
- b. Perlengkapan tim Pamins adalah:
- 1) Menggunakan senjata api pistol semi otomatis, *Double Action* (DA) dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
 - 2) Senjata laras pendek standar Tentara Nasional Indonesia
 - 3) Kartu identitas/*Id Card* dan *PIN* (*Personel Identification Number*) Paspampres
 - 4) Alat Deteksi, identifikasi, penanganan dan monitoring senjata api, senjata tajam, benda berbahaya lainnya dan *CBRNe* sesuai dengan kebutuhan dilapangan
 - 5) Alat komunikasi berupa HT UHF dan HT GSM dan alat khusus anti *drone mobile*, *anti drone semi stasioner*, intercept pasif/aktif, alat sterilisasi (signal dan saluran) dan *jammer (portable)*
 - 6) Rompi anti peluru atau *body armour* minimal level III A
 - 7) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphoneset* dengan baterai cadangan)
 - 8) *Blanket bom*/selimut bom, untuk melaksanakan tindakan pengamanan terhadap ancaman bahan peledak
 - 9) Box penitipan sajam dan senpi untuk mengamankan barang-barang berbahaya pada saat kegiatan VVIP.
 - 10) Lampu senter sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu.

- c. Perlengkapan Pam Matan sebagai berikut:
- 1) Menggunakan senjata SMG (*Sub Machine Gun*) dengan tembakan semi otomatis/otomatis 9 mm/5,56 mm, senjata *sniper* dengan tembakan *manual* 7,62 mm/12,7 mm, pistol dengan tembakan (DA) *double action* dengan menggunakan munisi kaliber 9 mm.
 - 2) Menggunakan pakaian *Over All IPP (Integreted Personal Protect)* set dan *combat suite*.
 - 3) Tim Pam Matan menggunakan IPP (*Integreted Personal Protect*) rompi dan pelindung kepala anti peluru minimal level III A.
 - 4) *Handy talky* yang dilengkapi dengan sarana pendukung (*earphone* 1 set dengan baterai cadangan)
 - 5) Lampu senter, sebagai alat bantu penerangan dan penggunaan sandi dalam keadaan tertentu.
 - 6) Teropong siang, teropong pengukur jarak, dan teropong malam, sangat dibutuhkan saat gelap dan terang
 - 7) Alat pengukur kecepatan angin.
 - 8) Alat deteksi panas/*thermal*.
 - 9) Laser *point* pistol.
 - 10) Kacamata hitam, pada saat pelaksanaan tugas di tempat terbuka yang berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar matahari dan untuk pengelabuan pengamatan.
 - 11) Masker pelindung *CBRNe*, pada saat terjadi ancaman agensia biologi, racun kimia, radioaktif dan nuklir yang berbentuk gas.
 - 12) Pisau lempar, untuk melumpuhkan musuh yang mengancam VVIP dari jarak yang sangat dekat.
 - 13) Helm sebagai pelindung kepala untuk menahan serangan benda keras, senjata tajam dan tembakan.

- 14) *Decker* kaki dan tangan, untuk melindungi pergelangan kaki dan tangan dari benturan benda keras.
- 15) *Holdster*, sebagai tempat senjata yang didesain khusus untuk tim Pam Matan.
- 16) Sarung tangan sebagai pelindung benda tajam dan benda panas.
- 17) Sepatu Khusus untuk melindungi kaki dari benturan benda-benda keras.
- 18) Perlengkapan *mountainering*, merupakan kelengkapan tim Pam Matan yang harus dimiliki sebagai alat utama untuk penyelamatan VVIP dari gedung bertingkat.
- 19) *Medical kit*, merupakan kelengkapan perorangan sebagai tindakan awal dalam rangka mencegah/mengobati bila terjadi gangguan kesehatan, sakit atau luka.

Berdasarkan uraian sarana (*means*) dari strategi mengatasi ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan presiden dan keluarganya diperlukan perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pengamanan, baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan secara beregu. Perlengkapan yang digunakan tersebut harus terpenuhi secara kualitas maupun kuantitasnya. Setiap orang yang menggunakan peralatan tersebut harus menguasai karakteristiknya dan mahir dalam penggunaannya, sehingga perlengkapan dan peralatan tersebut dapat mendukung tugas dalam mengamankan presiden dan keluarganya.

Dalam melaksanakan tugas operasi pengamanan VVIP Paspampres menggunakan SOP yang ada yakni Peraturan Panglima TNI Nomor: KEP/1287/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Standart Operasi Prosedure tersebut sudah

terdistribusi ke tiap - tiap kotama wilayah sehingga dalam operasi pengamanan terhadap VVIP dapat dilakukan Paspampres dengan jajaran wilayah kotama saat presiden berkunjung ke daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan standart operasi pengamanan VVIP.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Strategi grup A Pasukan Pengamanan Presiden dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Grup A Paspampres menentukan ancaman terorisme terhadap Presiden dan keluarganya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
 - 1) Ancaman terhadap instalasi kepresidenan sudah terjadi beberapa kali baik di istana Merdeka maupun di istana Bogor, hal ini merupakan bentuk ancaman teroris yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Paspampres dan jajaran instansi terkait.
 - 2) Koordinasi staf intelijen Paspampres dengan jajaran intelijen wilayah masih belum maksimal dalam monitor perkembangan ancaman yang mungkin terjadi terhadap instalasi kepresidenan, memberikan peluang bagi kelompok teroris dalam menjalankan aksinya terhadap instalasi kepresidenan.
 - 3) Kebiasaan blusukan presiden Joko Widodo ke tempat-tempat keramaian dan kerumunan masyarakat banyak merupakan celah kerawanan yang berpotensi ancaman.
 - 4) Pengamanan terhadap Presiden dan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di daerah belum maksimal karena terkendala dengan jumlah keterbatasan jumlah personel tim advance yang dikirim ke daerah yang akan di kunjungi presiden. Hal ini merupakan peluang bagi terjadinya ancaman teroris terhadap Presiden dan keluarga.

- 5) Sering terjadinya perubahan runwdon acara dalam waktu *last minutes* atau detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan kegiatan Presiden, menyebabkan pengamanan beberapa titik baru tercover dengan jumlah personel yang minim sehingga tidak sesuai standar pengamanan terhadap Presiden. Hal ini merupakan kerawanan terjadinya ancaman teroris terhadap Presiden.
 - 6) Batas perimeter atau sektor yang menjadi tanggungjawab antar ring untuk melaksanakan pengamanan terhadap presiden belum optimal sehingga ada celah titik kerawanan menjadi potensi ancaman.
 - 7) Perlengkapan yang dimiliki satuan baik untuk perlengkapan perorangan dan perlengkapan beregu/tim masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini merupakan celah bagi timbulnya ancaman teroris.
- b. Strategi grup A Paspampres mengatasi ancaman terorisme dalam mengatasi ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya, dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kemampuan dan kepekaan SDM Paspampres terhadap ancaman dan deteksi dini di lingkungan istana presiden.
 - 2) Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan jajaran intelijen wilayah untuk monitor perkembangan situasi dan kondisi terhadap kerawanan yang berpotensi ancaman.
 - 3) Pada prinsipnya pengamanan terhadap presiden merupakan tugas dan tanggungjawab Paspampres, sehingga tidak tebang pilih mana ancaman dari terorisme atau ancaman yang bersifat kriminal biasa. Sehingga anggota Paspampres yang melaksanakan pengamanan di lapangan tidak terjadi keraguan dalam mengambil tindakan.

- 4) Dantim advance minta tambahan personel ke staf Operasi Paspampres bila waktu memungkinkan, namun bila tidak cukup waktu dapat mengoptimalkan perkuatan BKO dari aparat wilayah untuk masuk dalam ring I.
- 5) Penerapan pola ring pada operasi pengamanan VVIP saat berjunjung ke daerah untuk menutup celah ancaman karena belum terpadunya dengan baik antar unsur ring yang ada dan saling berpengaruh (unsur ring III berpengaruh terhadap ring II dan ring II berpengaruh terhadap ring I).
- 6) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar satgas yakni Paspampres dengan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah untuk meningkatkan keberhasilan tugas operasi pengamanan VVIP dengan menggunakan pola ring.
- 7) Melakukan koordinasi kepada Mabes TNI mengenai peralatan dan perlengkapan baik perorangan maupun beregu untuk mendukung keberhasilan tugas operasi pengamanan agar optimal.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui kesimpulan di atas maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam ancaman terorisme terhadap presiden guna terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP. Peneliti lebih lanjut membagi rekomendasi yang diberikan menjadi rekomendasi akademik dan praktis.

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan operasi pengamanan VVIP yang dilaksanakan oleh Paspampres dan satuan tugas pengamana wilayah khususnya terkait dengan ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya. Dengan adanya Peraturan Panglima Tentara

Nasional Indonesia Nomor: Perpang/1287/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, bahwa Paspampres selaku pelaksana operasi pengamanan VVIP dan satuan tugas pengamanan wilayah selaku pendukung operasi pengamanan VVIP selalu bersinergi dan berkoordinasi untuk menralisir titik-titik kerawanan yang menjadi potensi ancaman terhadap presiden dan keluarganya.

Selain itu, diperlukannya kajian yang mendalam antara bidang kajian asimetris seperti halnya ancaman terorisme terhadap presiden yang berhubungan dengan ancaman teror yang terjadi beberapa kali di instalasi kepresidenan Republik Indonesia. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema dan fokus penelitian yang berbeda.

Secara khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal penanggulangan ancaman asimetris secara komprehensif. Khususnya dalam hal ancaman terorisme terhadap presiden dan keluarganya secara komprehensif khususnya dalam hal kajian terorisme.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Secara praktis, peneliti merekomendasikan beberapa hal agar strategi grup A Paspampres dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam mengamankan presiden dan keluarganya dari ancaman terorisme. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi secara kontinue antara Paspampres dan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah dirasa penting guna menghindari tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab sektor atau perimeter dalam melaksanakan pengamanan VVIP.

- b. Dalam melaksanakan operasi pengamanan VVIP dapat berjalan dengan optimal agar Paspampres menambah jumlah personel tim pendahulu (advance tim) yang dikirimkan daerah.
- c. Mabes TNI perlu mengadakan pelatihan Operasi pengamanan VVIP ke seluruh kotama operasi wilayah di seluruh Indonesia guna menyamakan persepsi kemampuan dan pengetahuan personel pengamanan wilayah tentang operasi pengamanan VVIP dan melibatkan Paspampres sebagai supervise.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aliminsyah & Pandji, (2004), *Kamus Istilah Manajemen*, Bandung: CV. Yrama Widya
- Arikunto, Suharsimi. (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arthur, F & Lykke Jr. (2010). *Military Strategy: Theory and Application. Pennsylvania: U.S. Army War College*.
- Barry Buzan (1991) *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Budihardjo, M. (2014) *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Creswell, J.W.(2013). *Research Design (Pendekatan Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods) Edisi Revisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- David Jablonsky (2002) *Why Is Strategy Difficult Carlisle Barracks, PA Strategic Studies Institute, U.S. Army War College*
- Daoed Joesoef. (2014). *Studi Strategi: Logika Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia Kompas
- Departemen Luar Negeri AS (1998) *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fatlolon. (2016). *Masalah Terorisme Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- James. J.F Forrest (2007) *Countering Terrorism and Insurgency in The 21st Century,Prager Security International*. London, 2007.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Negara*. Jakarta

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Buku Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). *WIRA: Media Informasi Kementrian Pertahanan Jakarta dalam Eksistensi TNI dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer multidimensional di era milenial*.
- Kukuh Pamuji (2010) dalam *Komunikasi Dan Edukasi Di Museum Istana Kepresidenan Jakarta* , Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Magister Arkeolog, Universitas Indonesia
- Lexy J. Moleong, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Ed. Rev. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya).
- Muladi (2004) dalam *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus.
- Michel Wieviorka (2004) *The Making of Terrorism*. (Chicago: University of Chicago Press)
- Moleong, Lexy J. (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman (2014) *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Pertahanan, Universitas. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bogor: Unhan Press
- Putu Primayanti (2019) dalam *Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara*, Tesis Universitas Pertahanan
- Sugiyono (2005:83). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta.
- Sugiyono (2007) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sri Yunanto (2017) dalam *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*, Penerbit *Institute For Peace and Security Studies* (IPSS).
- Tippe, Syarifuddin. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Yonah Alexander & Seymour Maxwel (1977) *Terrorism Interdisciplinary Perspectives* ed. Yonah Alexander & Seymour Maxwell Finger, The John Jay Press, New York.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Walt, Stephen M. (1987). *Origins of Alliances* Ithaca: Cornell University Press.

B. JURNAL

- Armaidly Armawi (2013) *Kajian Pengutan Komunikasi Intelijen Daerah*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Benyamin Boy (2020) dalam *Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme di Indonesia*, Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.
- Corneles Tamawiyw A (2019) Dalam *Terorisme Dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Vol 4 No 2 (2019): Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta
- Erfani Muhamad (2016) dalam karyanya *Sinkronisasi SOP Pengamanan VVIP dengan Kebijakan Objek*, Program Studi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.
- Ferri DB (2020) dalam *Desain Konseptual Integrasi Sistem Drone/Uav dan Sensor Radar Pasif sebagai Fungsi Situasional Blank Spot Filler Sistem*

Radar Pertahanan Udara (Studi: Satuan Radar 211 Tanjung Kait)
Program Studi Teknologi Penginderaan Universitas Pertahanan

Fortunata Okto Fermula (2018) dalam *Peran Pasukan Pengamanan Presiden pada Operasi Pengamanan VVIP di daerah*, Program Studi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Gumilar, Nugraha (2015). *Ilmu Pertahanan Dan Pendidikan Bela Negara Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan*. Jurnal WIRA Kementerian Pertahanan. Volume 54 /No. 38/Mei-Juni 2015

Hanri WK (2018) dalam *Pengaruh pendidikan pengembangan spesialisasi dan stres kerja terhadap kemampuan personel Satuan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor dalam pengamanan Presiden dan Keluarga di Istana Kepresidenan Bogor*, Program Studi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Juwono Sudarsono (2004) *Globalisasi Ekonomi Dan Demokrasi Indonesia*, Artikel Dalam Majalah Prisma, Jakarta.

Ricky Arinuryadi (2018) dalam *Strategi peningkatan kemampuan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*, Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Subekti (2012) "*Modernisasi Alutsista TNI AD Untuk Mencapai Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum*". Jurnal Angkatan Darat Yudhagama Vol.32. No.1. Maret 2012.

Tiara Firdaus Jafar (2019) dalam *Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat*, Departemen Hubungan Internasional FISIP Unpad.

C. INTERNET / WEBSITE

Adi P (2019) *Belajar Memahami Teori Ancaman dari Prof. Purnomo Yusgiantoro*, ITB <https://www.itb.ac.id/news/read/57328/home/belajar-memahami-teri-ancaman-dari-prof-purnomo-yusgiantoro>, di akses tanggal 23 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Agib Tanjung (2014) *Repotnya Paspampres kawal Presiden Jokowi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/repotnya-paspampres-kawal->

presiden-jokowi.html diakses pada tanggal 28 Desember 2020, Pukul 10.20 wib.

BBC News (2017) *Perempuan calon pengebom Istana Presiden dihukum tujuh setengah tahun* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40861991>, diakses pada tanggal 25 September 2020, Pukul 11.20 wib.

Detiknews (2007) *SBY Marah Disuguhi Bendera RMS dan Tarian Cakalele*, <https://news.detik.com/berita/d-799130/sby-marah--disuguhi-bendera-rms-dan-tarian-cakalele>, di akses tanggal 7 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

Iwan Supriyatna (2017) *Upaya Terobos Istana, dari Minta Jokowi Menikahkan Hingga mengaku ISIS* <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/20/10453831/3-upaya-terobos-istana-dari-minta-jokowi-menikahkan-hingga-mengaku-isis>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020, Pukul 11.20 wib.

Liston Damanik (2017) *Tanpa Busana Ingin Terobos Masuk Istana, Ini yang Diteriakkan Sianturi* <https://medan.tribunnews.com/2017/08/31/tanpa-busana-ingin-terobos-masuk-istana-ini-yang-diteriakkan-sianturi>. diakses pada tanggal 25 Desember 2020, Pukul 11.20 wib.

Maryland, U. (2019). *Global Terror Index 2019*. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI2019web.pdf> Diakses pada tanggal 20 September 2020, Pukul 11.20 wib.

Soewidia Henaldi (2016) *Jangan Sembarangan Terbangkan Drone di Kota Bogor, Melintas Diatas Lokasi Ini Bakal Ditembak* <https://bogor.tribunnews.com/2016/04/25/jangan-sembarangan-terbang-drone-di-kota-bogor-melintas-diatas-lokasi-ini-bakal-ditembak>. diakses pada tanggal 27 Desember 2020, Pukul 10.20 wib.

Silaban MW (2020) *Abu Rara Penyerang Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara*, <https://metro.tempo.co/read/1354255/abu-rara-penyerang-wiranto-dituntut-16-tahun-penjara/full&view> di akses 22 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB

Putra RA (2017) *Pemotor Terobos Iring-iringan Jokowi di Tugu Kujang*, <https://nasional.okezone.com/read/2017/04/02/337/1657083/wah-pemotor-terobos-iring-iringan-jokowi-di-tugu-kujang> diakses pada tanggal 30 Desember 2020, Pukul 10.20 wib.

Republik.Co.id.Bogor (2014) *Paspampres Serap Ilmu Tentara Khusus AS*, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/08/n22vrf-paspampres-serap-ilmu-tentara-khusus-as> diakses pada tanggal 30 Desember 2020, Pukul 22.20 wib.

Vento Saudale (2019) *Polisi Stres Paksa Masuk Istana Bogor Ingin Temui Jokowi* <https://www.beritasatu.com/megapolitan/573030/polisi-stres->

paksa-masuk-istana-bogor-ingin-temui-jokowi diakses pada tanggal 27 Desember 2020, Pukul 10.20 wib

D. DOKUMEN DAN UNDANG - UNDANG

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tentang *Petunjuk penyelenggaraan operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.*

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1288/XII/2018 tentang *Petunjuk teknis Pengamanan Pribadi Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI Dan Mantan Wakil Presiden RI Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan*

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1337/XII/2018 tentang *Petunjuk teknis Pengamanan Instalasi Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI Dan Mantan Wakil Presiden RI Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan*

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1291/XII/2018 tentang *Petunjuk teknis Pengamanan Penyelamatan Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI Dan Mantan Wakil Presiden RI Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan*

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang *penyempurnaan organisasi Paspampres*

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2013 tentang *pengesahan Validasi organisasi dan Tugas Paspampres*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 Tentang *Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia*

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Doktrin Pertahanan Negara*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Pembukaan.*


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"


Nomor : B/2823 /XI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 11 November 2020

Kepada
Yth. Komandan Paspampres
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Komandan Paspampres mengizinkan Pejabat dalam Lampiran, untuk membantu mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Mashudi Rofik NIM. 120190102009, mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Grup A Pasukan Pengaman Presiden dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisisioner. *Contact Person*: e-mail: rofikmashudi72@gmail.com dan HP. 081586150113.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Wakil Kepala Kerjasama dan Kelembagaan Unhan


Benny Santanto Rudy S., M.B.A.
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 – 87951555

LAMPIRAN 2

PANDUAN WAWANCARA

Interview :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan data wawancara sebagai data penguat hasil temuan penelitian dan minta data pendukung yang digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, yang selanjutnya melakukan pengkajian hasil penelitian lebih dalam.

Teori / Konsep	Indikator	Pertanyaan
Konsep Strategi	Ends	1. Bagaimana Instansi Bapak/Ibu menetapkan tujuan jangka panjang dalam menanggulangi ancaman teror terhadap VVIP di Indonesia?
	Ways	2. Bagaimana Instansi Bapak/Ibu menetapkan tujuan jangka panjang dalam menanggulangi ancaman teror terhadap VVIP di Indonesia?
	Means	3. Bagaimana penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan?

Konsep Pertahanan	Kekuatan Nasional	4. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
Konsep Terorisme	Metode	5. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mengidentifikasi metode ancaman terorisme terhadap keluarga presiden?
	Sasaran	6. Bagaimana instansi Bapak/Ibu memprediksi sasaran ancaman teror terhadap keluarga Presiden?
	Tujuan	7. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menganalisa tujuan dari serangan teror terhadap keluarga Presiden?
Teori Pengamanan	Peluang	8. Bagaimana instansi Bapak/Ibu meniadakan peluang bagi pihak lawan untuk penyelidikan dan penggalangan terhadap Presiden dan keluarganya? 9. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah peluang bagi pelaku teror untuk menyusup ke kerabat?
	Pengaruh	10. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah lingkungan yang negatif kerabat presiden?
	Kerugian	11. Bagaimana instansi Bapak/Ibu mencegah kerugian atau korban terhadap presiden beserta keluarganya?

Teori Ancaman	Kekuatan	12. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan kekuatan dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
	Peluang	13. Bagaimana instansi Bapak/Ibu menggunakan peluang dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
	Kelemahan	14. Bagaimana instansi Bapak/Ibu meminimal kelemahan dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?
	Ancaman	15. Bagaimana instansi Bapak/Ibu dalam menghadapi ancaman teror terhadap VVIP?

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto
Jabatan : Komandan Paspampres
Hari/Tanggal : Selasa / 11 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Kolonel Inf Muhamad Imam Gogor
Jabatan : Asisten Operasi Danpaspampres
Hari/Tanggal : Selasa / 12 Desember 2020
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Letnan Kolonel Mar Ahmad Effendi
Jabatan : Wakil Asisten Intelijen Danpaspampres
Hari/Tanggal : Senin / 10 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Letnan Kolonel Mar Tri Maryanto, S.E., M. Hanla
Jabatan : Wakil Komandan Grup A Paspampres
Hari/Tanggal : Senin / 10 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Letnan Kolonel Inf Fangky Susanto
Jabatan : Komandan Detasemen 1 Grup A Paspampres
Hari/Tanggal : Senin / 10 Desember 2020
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Kolonel Pas Dili Setiawan, M.Si (Han)
Jabatan : Asisten Intelijen Koopssus TNI
Hari/Tanggal : Senin / 23 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Komando Operasi Khusus TNI



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Kolonel Pas Cendy Arief Tjahtono
Jabatan : Paban Utama Dit. D Bais TNI
Hari/Tanggal : Jumat / 7 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Instansi : Badan Intelijen Strategis TNI



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Mayor Inf Reno Handoko, SE
Jabatan : Pabandya Operasi Paspampres
Hari/Tanggal : Kamis / 19 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Mayor Kav Wicaksana HN
Jabatan : Kasi Intelijen Grup A Paspampres
Hari/Tanggal : Kamis / 5 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Instansi : Pasukan Pengamanan Presiden



DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Al Chaidar Puteh
Jabatan : -
Hari/Tanggal : Senin / 11 Januari 2021
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Instansi : -



RIWAYAT HIDUP PENELITI



MASHUDI ROFIK Lahir di Ponorogo, pada tanggal 31 Januari 1972. Anak ke tiga dari lima bersaudara dari bapak bernama Heru Wijono dan ibu bernama Sumiin. Pendidikan awal di SD Negeri Semanding II lulus pada tahun 1985, melanjutkan ke SMP PGRI Somoroto pada tahun 1988, kemudian masuk STM PGRI Ponorogo Jurusan Teknik Mesin lulus tahun 1991. Saat ini mengikuti program magister (S2) di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Peneliti saat ini masih aktif sebagai Perwira TNI AD berdinasi di Universitas Pertahanan. Mengawali karir sebagai Bintara Militer Sukarela XI tahun 1993 di Pusdik Peralatan Angkatan Darat Cimahi Bandung dan ditempatkan di Detasemen Peralatan Pasukan Pengamanan Presiden. Melanjutkan pendidikan Perwira Secapa Reguler (Panorama X) di Pusdik Secapa Bandung pada Tahun 2001 dan ditarik ke Paspampres. Melanjutkan pendidikan Selapa II di Pusdik Peralatan Angkatan Darat, Cimahi Bandung pada Tahun 2012. Adapun jabatan yang pernah diemban adalah Bintara Detasemen Peralatan Pasukan Pengamanan Presiden, Paur Pembekalan Senjata dan Munisi Denpal Paspampres, Kepala Bengkel Kendaraan Denpal Paspampres, Kepala Urusan Pemeliharaan Denpal Paspampres, Kaur Pengendalian Teknik Direktorat Peralatan, Penyusun Bahan Progja Subbag TU Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Penyusun Subbag TU Fakultas Strategi Pertahanan Unhan. Tanda jasa yang dimiliki Satya Lancana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lancana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lancana Kesetiaan XXIV Tahun, Satya Lancana Wira Siaga, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya.

Riwayat pendidikan militer peneliti antara lain Kursus Senjata dan Munisi di PT Pindad pada tahun 1995, Kursus Perwira Kendaraan di Pusdik Peralatan tahun 2004, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat Golongan I Kemhan tahun 2014, Kursus Manajemen Penatausahaan barang Milik Negara Pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2017.

Menikah pada tahun 1998 dengan PARTINI di Klaten, Jawa Tengah dan dikaruniai dua orang anak bernama MUNISA FIKTIA NINGRUM dan FACHREL NAUFAL KURNIAWAN.